

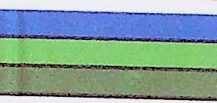
Drs. T. MAY RUDY, S.H., MIR., M.Sc.



HUBUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER DAN MASALAH-MASALAH GLOBAL

Isu, Konsep, Teori dan Paradigma

SKOAD



PERPUSTAKAAN AD
SESKOAD

2-W-1-3

20072463
327
RUD

PERPUSTAKAAN SESKOAD

Tanggal kembali

AL

AL

No. Inv: 05391 /SESKOAD

Drs. T. May Rudy, S.H., MIR., M.Si.

**HUBUNGAN
INTERNASIONAL
KONTEMPORER
DAN
MASALAH-MASALAH
GLOBAL**

Isu, Konsep, Teori & Paradigma



RF.SP. 17.01.2003

Drs. T. May Rudy, S.H., MIR., M.Si.

HUBUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER & MASALAH-MASALAH GLOBAL

Editor Ahli: Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M.

Editor: Aep Gunarsa, S.H.

Desain Sampul: Rismansyah Taofik, B.A.

Diterbitkan oleh PT Refika Aditama

Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung 40254

Telp. (022) 5205985, Fax. (022) 5205984

e-Mail: refika1@rad.net.id

Anggota Ikapi

Cetakan Pertama: Juni 2003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dicetak oleh PT Refika Aditama - Bandung

ISBN 979-96055-3-9

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
TANPA IZIN TERTULIS dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Hubungan Internasional berlangsung dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial manusia dan juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan (alam). Oleh karena itu ilmu hubungan internasional pun perlu berkembang secara dinamis pula. Tujuan ilmu pengetahuan atau hakikat substansial ilmu-ilmu yang dipelajari manusia adalah untuk memahami kehidupan (manusia) dan lingkungan (alam) di sekitarnya, untuk kemudian berusaha memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan ilmu (pemahaman) itu.

Tak terkecuali pula ilmu hubungan internasional, dan untuk itulah para penstudi hubungan internasional perlu terus mengikuti perkembangan jaman, perubahan fenomena dan pola interaksi, pergeseran paradigma dan penajaman konsep, perluasan ruang lingkup kajian, sampai upaya membangun teori (*theory building*) dan upaya pemecahan masalah (*problem solving*). Perubahan kurikulum adakalanya diperlukan untuk terus menata dan meningkatkan kehandalan atau reliabilitas keilmuan pada FISIP Jurusan [Ilmu] Hubungan Internasional, tetapi yang lebih penting lagi adalah penyesuaian materi yang diajarkan. Bisa jadi jumlah serta nama matakuliah-matakuliah tidak perlu mengalami perubahan, tetapi pokok-pokok bahasan dan sub-sub pokok bahasan yang terus dilengkapi, diperbarui, ditata lebih komprehensif, dan disampaikan secara lebih sistematis.

Perubahan besar yang nyata dapat dilihat (*tangible*) pada dasawarsa terakhir abad ke-20 memang adalah berakhirnya perang dingin (*cold war*), runtuhnya imperium komunis (Uni Soviet), maraknya globalisasi, dan anjang-angang liberalisasi perdagangan. Namun tidak bisa kita abaikan beberapa perubahan besar lainnya dalam kehidupan manusia dan masyarakat internasional, pola interaksi negara-negara (*state actors*) dan kesatuan-kesatuan (*entities*) yang bukan negara (*non state actors*), pengelompokan kerjasama-regional dengan ciri-ciri yang bervariasi, yang tampaknya tergolong *intangible* (sukar untuk dilihat/diukur). Lalu ada

perubahan global atau perkembangan masalah global yang perlu ditanggulangi dan (seharusnya) merupakan kepentingan serta tanggung jawab bersama, yaitu masalah lingkungan hidup, kelangkaan sumber daya alam, pencemaran udara, demokratisasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama), maraknya persenjataan pemusnah massal, dan hak-hak asasi manusia (HAM).

Singkatnya bahwa proses pembelajaran ilmu hubungan internasional perlu secara komprehensif (terpadu dan menyeluruh) serta berkesinambungan menyesuaikan ruanglingkup kajian ilmu ini dengan gejala, kondisi, dan realita pada bidang-bidang yang merupakan "subject matter" keilmuannya. "Kesinambungan dan Perubahan" (*Continuity and Change*) serta "Kecenderungan dan Transformasi" (*Trends and Transformations*) perlu dicermati secara arif dan dijadikan perspektif utama. Tentunya termasuk mengenai di mana dan bagaimana posisi negara dan bangsa Indonesia dalam tatanan dunia masa kini (kontemporer) serta upaya apa yang bisa dan perlu kita tempuh.

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT., penulis berhasil menyelesaikan naskah buku ini. Terimakasih dan penghargaan penulis tujukan kepada Penerbit Refika yang tanggap terhadap perkembangan khazanah ilmu pengetahuan sehingga berkenan menerbitkan dan mempublikasikan buku ini. Terimakasih kepada orangtua, istri, dan putra-putri penulis yang telah memberi restu dan motivasi, kepada rekan-rekan sejawat (dosen) dan para mahasiswa yang berkontribusi mengajukan bahan-bahan yang penulis gunakan untuk melengkapi penulisan buku ini.

Sebagai manusia biasa, penulis hanya bisa berusaha, tetapi tentunya tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan kelemahan, termasuk dalam penyusunan materi buku ini. Kritik dan saran akan penulis terima dengan lapang dada, baik untuk penyempurnaan isi buku ini maupun untuk penulisan buku-buku berikutnya. Penulis berharap bahwa pembahasan dalam buku ini bisa bermanfaat bagi pengembangan materi keilmuan Hubungan Internasional dan wawasan pengetahuan para mahasiswa dan pembaca. Wa billahi Taufiq wal Hidayah.

Bandung, Mei 2003.

T. May Rudy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR — v

DAFTAR ISI — vii

BAB 1	GLOBALISASI DAN EKONOMI LIBERAL — 1	
	A. Hubungan Internasional (HI) Kontemporer.....	1
	B. Globalisasi	3
	C. Kemenangan Sistem Ekonomi Liberal Terhadap Sistem Ekonomi Komunis - Sosialis.	5
BAB 2	PENGESERAN PEREKONOMIAN DUNIA (DARI INTERAKSI TERBATAS MENUJU GLOBALISASI) — 11	
	A. Negara Dan Ekonomi Internasional.....	11
	B. Pengaruh Negara Besar bagi perkembangan Globalisasi.....	13
	C. Kekuatan Hegemoni Amerika Serikat dan Perdagangan Bebas Global.....	19
	D. Pengaruh Jepang dalam perkembangan Globalisasi dan Liberalisasi ekonomi di Asia	23
	E. Pembentukan Aliansi Perdagangan Dunia	31
BAB 3	GLOBALISASI DAN LIBERALISASI EKONOMI — 35	
	A. Globalisasi atau Kapitalisme Global.	35
	B. Negara dalam Sistem Globalisasi	40
BAB 4	HAK ASASI MANUSIA — 45	
	A. HAM Sebagai Proses Globalisasi	46

B. Demokratisasi	50
C. Faktor-faktor Global Demokrasi	54
D. Lingkungan Hidup	55
E. Kesimpulan	58

BAB 5 BENTROKAN PERADABAN DAN KONFLIK ETNIS — 61

A. The Clash Of Civilizations (Benturan Antar Peradaban)	61
B. Pengeseran Peradaban	67
C. Ethnic Conflict (Konflik etnis)	76

BAB 6 PERUBAHAN GLOBAL LINGKUNGAN HIDUP — 91

A. Kerangka Teoritis	92
B. Realita Pemasaran Global	93
C. Pencemaran Lingkungan	99
D. Kemajuan Teknologi dan Efek Sampingnya	103
E. Penutup	108

DAFTAR KEPUSTAKAAN — 113

A. HUBUNGAN INTERNASIONAL (HI) KONTEMPORER

Hubungan Internasional pada masa lampau berfokus kepada kajian mengenai perang dan damai serta kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara atau antar bangsa dalam konteks sistem global tetapi masih bertitik berat kepada hubungan politik yang lazim disebut sebagai "high politics". Sedangkan hubungan internasional kontemporer selain tidak lagi hanya memfokuskan perhatian dan kajiannya kepada hubungan politik yang berlangsung antar negara atau antar bangsa yang ruang lingkupnya melintasi batas-batas wilayah negara, juga telah mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara (*non-state actors*).

Hubungan Internasional (HI) Kontemporer, selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependensi perekonomian, kesenjangan Utara-Selatan, keterbelakangan, perusahaan transnasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya.¹ Dengan demikian ruang lingkup yang

¹ Lihat juga: Robert Jackson & Georg Sorensen, *Introduction to International Relations*, New York: Oxford University Press, 1999, hlm. 34-35.

dikaji oleh ilmu hubungan internasional menjadi lebih luas dengan mencakup pengkajian mengenai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat (politik, ekonomi, sosial, budaya). Batasannya adalah bahwa Hubungan Internasional mengkaji hal-hal atau aspek-aspek tersebut dari segi keterhubungan global (*global connections*), yang non-domestik, yang melintasi batas wilayah masing-masing entitas negara.

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara-negara (*state-actors*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*).² Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa Kerjasama (*Cooperation*), Persaingan (*Competition*), dan Pertentangan (*Conflict*). Tentu yang diharapkan adalah berlangsungnya pola-pola kerjasama. Jadi masalahnya adalah bagaimana memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan kerjasama yang berlangsung secara adil dan saling menguntungkan; bagaimana mencegah dan menghindari konflik, serta bagaimana mengubah kondisi-kondisi persaingan (kompetisi) dan pertentangan (konflik) menjadi kerjasama.

Memang konflik (pertentangan) dan juga kompetisi (persaingan) merupakan hal-hal yang tidak mudah terhindarkan dalam interaksi hubungan internasional. Masalahnya adalah bagaimana menempuh langkah-langkah untuk membina upaya bersama guna mengurangi serta menghindari konflik yang berkepanjangan. Sumber konflik bisa terletak pada kelangkaan sumber-sumber daya (berebut menguasai sumber-sumber daya alam pada khususnya) serta egosentrisme masing-masing negara atau kesatuan (entitas) sosial tertentu, yaitu aspirasi untuk terus meningkatkan kekuatan serta kedudukan dalam hubungan (interaksi) dengan negara-negara lain atau kesatuan (entitas) sosial lainnya.³

2 Lihat juga: K.J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1995, atau buku terjemahannya: Wawan Juanda, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*, Bandung, Bina Cipta, 1997, hlm. 26-28.

3 Lihat juga: Howard H. Lentner, 1974, *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach*, Ohio: Charles E. Merrill Publishing Co, hlm. 85-86; dari R. Suprpto, 1997, *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi, dari Perilaku*, Jakarta: Rajagrafindo, hlm. 155-156.

Dalam kajian HI Kontemporer, Konflik tidak selalu berarti perang atau langsung berada pada taraf setara perang atau “perang asimetris”⁴, tetapi bisa berupa krisis hubungan diplomatik, protes, penolakan, tuduhan, tuntutan (*claim*), peringatan (*warning*), ancaman, tindakan balasan (retorsi atau reprisal), serta pemboikotan produk. Timbulnya konflik bisa dipicu oleh sikap serta tindakan yang bernuansa permusuhan atau saling ketidakpercayaan yang bertalian dengan kecenderungan (baik pemerintah maupun rakyat) untuk memberikan reaksi keras dan berlebihan terhadap suatu peristiwa di antara dua atau lebih entitas sosial yang berbeda.

Lalu solusi yang perlu dicapai serta dikembangkan adalah kerjasama. Dewasa ini pola-pola kerjasama multilateral dan global perlu diperbanyak dan terus ditingkatkan, karena semakin luas dan banyak masalah global yang tidak bisa lagi diatasi atau ditanggulangi hanya oleh beberapa negara saja, tetapi perlu pemecahan masalah bersama-sama oleh banyak negara dan dengan mengikutsertakan pula aktor-aktor non-negara. Selain masalah global yang merupakan kelanjutan, dari masalah yang sudah ada di masa lampau seperti pertumbuhan penduduk (populasi dunia) yang lebih besar dibanding pertambahan produksi makanan dan ketersediaan air, kemiskinan, kelaparan, dan lain sebagainya, muncul masalah-masalah baru seperti pencemaran lingkungan hidup (*environmental issues*), persenjataan pemusnah massal (*weapons of mass destruction*), perkembangan industri dan berbagai dampak (positif dan negatif) dari globalisasi, liberalisasi perdagangan dunia, dan “Tripple T Revolution” (Revolusi di bidang Teknologi, Transportasi, Telekomunikasi).

B. GLOBALISASI

Ketika suatu istilah baru menjadi populer, hal ini sering kali meliputi suatu perubahan penting sebagai bagian dari dunia ini. Ide baru ini dibutuhkan

4 Perang Asimeteris (Asymmetric Warfare) merupakan istilah yang relatif baru yang bermakna penggunaan metode atau taktik non-konvensional untuk menandingi/membalas kepada pihak lawan sehubungan dengan tidak seimbang-nya kapabilitas militer (superioritas kekuatan militer konvensional pihak lawan) bila terjadi perang/pertempuran. Jadi taktik yang digunakan adalah terorisme, perang inkonvensional atau perang gerilya, sampai penggunaan teknik baru yang inovatif seperti perang informasi “cyber attacks” atau “cyber warfare” (perusakan jaringan melalui komputer atau *cyber technology*).

untuk menggambarkan suatu kondisi baru. Sebagai contoh, ketika seorang filosof Jeremy Bentham mengistilahkan “Internasional” di tahun 1780, yang mana ditangkap sebagai suatu pencerahan dari apa yang merupakan pendalaman dari kenyataan hidupnya keseharian, yaitu berkembangnya negara-bangsa dan transaksi yang terjadi melintasi batas di antara masyarakat di dunia ini. Orang belum membicarakan mengenai “hubungan internasional” sebelumnya, ketika umat manusia belum terorganisir menjadi suatu komunitas nasional yang diatur berdasarkan aturan dari wilayah suatu negara tertentu.

Dua ratus tahun kemudian, di tahun 1980, perbincangan mengenai globalisasi menjadi tersebar luas. Istilah ini secara cepat menjadi standar daftar kata-kata yang mana tidak hanya di lingkungan akademis, tetapi juga di antara jurnalis, politisi, bankir, periklanan, dan hiburan. Perkataan atau istilah yang sama artinya diduga telah tersebar dengan luas secara cepat dan simultan pada berbagai macam jenis bahasa. “*Globalization*” dalam bahasa Inggris diartikan sama dengan *Quan Qui Hua* dalam bahasa Cina, *globalizzazione* dalam bahasa Italia, *jatyanthareekaranaya* dalam bahasa Sinhalese, dan sebagainya. Hal ini menjadi suatu hal yang umum untuk dibicarakan seperti pasar global, komunikasi global, konferensi global, dan sebagainya. Selama tahun 1980 penstudi dari hubungan internasional dan disiplin ilmu lain mulai untuk meneliti pertanyaan dari peraturan global (perbedaannya dengan peraturan internasional) perubahan lingkungan global, hubungan gender global, ekonomi politik global, dan lain-lain. Kata dari “globalisasi” juga dapat ditemukan pada beberapa sampul buku saat ini.

Adalah benar bahwa ide mengenai global ini telah beredar dengan baik sebelum tahun 1980. Seorang pembicara Inggris telah mulai untuk menggunakan kalimat adjektif dari “global” untuk mengartikan “dunia secara keseluruhan” sebagai akhir dari abad kesembilan belas. Sebelumnya kalimat ini hanya berarti “hal yang berhubungan dengan bola atau berbentuk bola”. Istilah “globalisasi” dan “globalisme” dikenalkan pada buku saku bacaan yang diterbitkan di tahun 1944, ketika kata benda dari “globalisasi” terdapat di dalam kamus untuk pertama kalinya di tahun 1961 (Reiser and Davies 1944: 212, 219; *Webster Dictionaries*).

Meski pun begitu, bagaimana pun juga perbincangan mengenai globalisasi ini telah memasuki masa persiapan yang lama, tidak menjadi bagian dari perkataan atau istilah dalam kehidupan sehari-hari sampai akhir dari perempat abad kedua puluh. Sebagai contoh hampir tidak ada judul dari sebuah buku dan artikel sebelum tahun 1975 yang meliputi tentang referensi mengenai globalisasi, seperti halnya sekarang, diambang akhir abad kedua puluh, konsep ini telah begitu meresap.

Bagaimana pun juga, suatu hal penting telah terbuka di dunia dan selama ini telah dengan cepat berkembang hampir empat dekade dari abad kedua puluh, dan istilah "globalisasi" telah membentuk menjadi suatu karakteristik dengan baik. Sebagaimana kalimat itu disebutkan di sini, globalisasi merupakan suatu proses hubungan sosial secara relatif yang menemukan tidak adanya batasan jarak dan menghilangnya batasan-batasan secara nyata, jadi ruang lingkup kehidupan manusia itu makin bertambah dengan memainkan peranan yang lebih luas di dalam dunia sebagai satu kesatuan tunggal. Hubungan sosial, yang mana tidak lagi diperhitungkan sebagai suatu jalan yang rumit di mana orang berinteraksi dengan saling memanfaatkan satu sama lain tetapi telah berkembang menjadi pola hubungan bahkan sampai ada yang tidak lagi menggunakan kata politik internasional atau "politics among nations", tetapi politik global dan politics of the planet. Demikian pula "ekonomi global" mulai menggantikan "ekonomi internasional" terorganisir dan terbina dengan berbasiskan unit-unit dari satu planet.

C. KEMENANGAN SISTEM EKONOMI LIBERAL TERHADAP SISTEM EKONOMI KOMUNIS-SOSIALIS

Beberapa faktor yang menyebabkan struktur ekonomi berdasarkan Paham Komunis (sosialis) tidak mampu bertahan dalam percaturan perekonomian di negara dunia ketiga, adalah sebagai berikut:

1. Pada struktur pemerintahan negara-negara berdasarkan paham Komunis biasanya yang menjalankan kekuasaan politik adalah partai komunis sehingga pemerintahannya bersifat Monopolis Absolut. Melalui apa yang dikenal sebagai sentralisme yang demokratis, Partai Komunis mengawasi seluruh kehidupan politik (pengawasan vertikal) serta mengawasi pula organ-organ pemerintah dan

organisasi massa. Akibatnya sektor-sektor kunci ekonomi di bidang industri, pertanian, dan jasa biasanya berada di bawah pengawasan Partai Komunis atau birokrasi yang turut menentukan segi perencanaannya. Dan hal yang telah disebutkan di atas maka berarti kehidupan ekonomi di negara tersebut ditentukan secara politik, bukan oleh mekanisme pasar.

2. Untuk bidang pemerintahannya sendiri, beberapa negara penganut Paham Komunis ini mencoba mempertahankan kekuasaannya melalui kediktatoran yang dijalankan oleh sekelompok kecil pimpinan Partai Komunis akibatnya terjadi kekuasaan di bawah satu orang yang dianggap kuat. Keadaan seperti ini memungkinkan terjadinya penindasan terhadap rakyatnya sendiri, seperti di Uni Soviet pada masa Stalin, Cina pada masa Mao Zedong, Kamboja di bawah Pol Pot Khmer Merahnya, serta negara lainnya.
3. Dalam struktur perekonomian, struktur produksi dari negara-negara penganut paham komunis tersebut dipisahkan dari struktur permintaan (*demand*) yang diakibatkan oleh pengaruh politik yang besar dalam menentukan kebijakan ekonomi. Salah satu contoh kasus dalam masalah ini adalah ditentukannya target produksi oleh para pembuat rencana nasional dalam partai komunis atau di tubuh birokrasi, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kelebihan atau kekurangan produksi yang disebabkan oleh tidak adanya hubungan produksi atau penawaran dengan struktur permintaan tadi. Contoh konkrit yang terjadi di negara-negara berpaham komunis itu salah satunya adalah dalam hal permodalan, seorang pemilik perusahaan besar di negara tersebut tidak perlu memikirkan modal bagi perusahaannya, sebab alokasi modal bagi perusahaan-perusahaan di negara-negara komunis sudah diatur secara nasional, sehingga kelak sekiranya mendapatkan keuntungan maka keuntungan itu sebagian besar diambil oleh negara sebagai pajak. Hal ini yang menyebabkan tingkat kehidupan para karyawan di perusahaan-perusahaan tersebut tidak berkembang karena mereka tidak mendapatkan insentif ekonomi dari perusahaan sehingga proses produksi pun tidak dapat berjalan secara efisien.

- Kendala-kendala di atas ternyata sangat memperburuk usaha negara-negara sosialis tersebut untuk mempertahankan struktur perekonomian menurut paham komunis yang dianutnya, karena dengan struktur yang seperti itu mereka lambat laun mengalami kesulitan ekonomi yang kemudian dapat membawa dampak bagi kestabilan politiknya. Sistem perekonomian sosialis itu bukan saja tidak efisien namun juga telah gagal mencukupi kebutuhan sehari-hari negara beserta rakyatnya, negara-negara sosialis tersebut selalu dibayangi defisit perdagangan internasional yang membawa mereka ke dalam lilitan utang dan masalah-masalah perekonomian lainnya. Demi target-target politik, taraf hidup masyarakat ditekan, kebutuhan rakyat ditaruh pada prioritas yang paling rendah demi kekuatan industri dan kekuatan militer.
- Pada negara yang telah mencapai keadaan seperti itu maka negara tersebut akan rentan terhadap kekacauan atau *chaos* yang berawal dari rasa ketidaksenangan rakyat terhadap para pemimpinnya sehingga terjadi pemogokan demonstrasi atau bisa juga terjadi pemberontakan (kudeta). Dalam segi ekonomi, kebutuhan dasar masyarakat menjadi terbatas dan susah untuk didapatkan, maka timbullah "pasar gelap", korupsi, serta pengelompokan massa. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap negara-negara tersebut akibat dari ketidakstabilan ekonomi dan politik tadi sehingga mereka sulit untuk melaksanakan rencana-rencana dalam sistem internasionalnya (politik, ekonomi, sosial dan budaya) baik itu kawasan atau pun di dunia.

Kemenangan sistem liberalis atas sistem sosialis, lain dapat kita lihat dari berakhirnya perang dingin (cold war), juga dicirikan oleh "model ekonomi jepang" sebagai berikut:

1. Perkembangan ekonomi negara-negara di Asia dan Pasifik banyak menimbulkan kekaguman dan juga ketidaksenangan dari negara-

negara lain di dunia, hal ini disebabkan oleh tertariknya perhatian dunia terhadap usaha penggalan kegiatan ekspor, pembangunan sektor-sektor industri manufaktur, penarikan modal asing yang pada akhirnya negara-negara tersebut mulai mengungkit-ungkit "model ekonomi Jepang", (Jepang merupakan negara yang menerapkan sistem kapitalisme/liberalisme dalam sistem perekonomiannya) sebagai suatu strategi pembangunan ekonomi yang telah berhasil dan perlu mendapatkan perhatian ekstra.

2. Banyak perdebatan yang timbul mengenai peranan dan arti penting dari kebijakan-kebijakan yang diambil dibalik kesuksesan pembangunan perekonomian ini, sebagian dari mereka percaya bahwa keberhasilan itu ditunjang oleh liberalisasi perdagangan dengan menggunakan sistem mekanisme pasar yang diramu oleh para ahli neoklasik ekonomi. Di lain pihak banyak juga dari mereka yang meyakini bahwa keberhasilan itu disebabkan oleh diterapkannya serangkaian kebijakan-kebijakan neomerkantilis oleh pihak pemerintah masing-masing negara.
3. Sementara itu disadari bahwa peranan sistem internasional ternyata sangat besar dalam membantu keberhasilan ekonomi Jepang dan negara-negara di Asia lainnya. Sistem ini dapat mencapai posisi ekuilibrium apabila negara yang mendominasi yaitu Amerika Serikat dengan paham Liberalnya bersedia mendukung kestabilan dan kelangsungan sistem tersebut. Dari pernyataan di atas kita dapat melihat betapa kuatnya pengaruh liberal dalam sistem internasional kepada struktur perekonomian negara-negara di Asia (yang notabene merupakan negara-negara dunia ketiga).
4. Perkembangan ekonomi di Asia sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Jepang dan segala dampaknya di kawasan itu dari masa ke masa, juga pengaruh Paham Liberal Amerika Serikat yang dalam kedudukannya sebagai negara hegemoni yang sangat berkepentingan atas kelanggengan *system international* pasca Perang Dunia Kedua.
5. Pada periode pertama Jepang lebih merupakan sebuah negara hegemoni berskala regional dengan kebijakan politik imperialisme-

nya yang mencoba mengintegrasikan segenap wilayah jajahannya ke dalam *core*, yakni Jepang sendiri, sementara Jepang mengalami keterlambatan dalam memasuki sistem internasional yang bersifat imperialisme pada masa itu. Faktor keterlambatan itu telah memaksa Jepang untuk memperkeras usahanya dalam melancarkan kegiatan dan upaya industrialisasi dalam rangka mengontrol wilayah-wilayah jajahannya.

6. Usaha-usaha integrasi ekonomi ala kapitalisme/liberalisme yang dilakukan oleh Jepang atas beberapa wilayah jajahannya dilancarkan secara intens dan serius, hal ini membawa dampak positif berupa perbaikan sarana dan perbaikan fasilitas infrastruktur di beberapa negara jajahannya tersebut antara lain Korea dan Taiwan. Usaha integrasi ekonomi tersebut melibatkan pula kebijakan transformasi sosial-politik untuk memperlancar usaha mobilisasi ekonomi tersebut. Dari penjelasan di atas kita harus memperhitungkan “warisan” kolonialisme Jepang yang memberi dampak positif bagi negara jajahannya di Asia sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang sehat di negara-negara tersebut.

Pergeseran Perekonomian Dunia (Dari Interaksi Terbatas Menuju Globalisasi)

A. NEGARA DAN EKONOMI INTERNASIONAL

Hubungan negara dengan ekonomi internasional selalu mempunyai masalah karena menurut Teori Realis, sistem internasional adalah anarki. Dan anarki sangat sulit untuk diatur walau pun dengan rezim yang efektif sekali pun. Apabila ekonomi internasional sangat penting terhadap kesejahteraan dari suatu negara maka otomatis menjadi suatu isu-isu politikal yang signifikan. Secara keseluruhan dari ekonomi nasional menjadi struktur internasional seperti produksi, perdagangan, sumber daya, finansial dan lain-lain, akan membuat beberapa isu-isu ekonomi politik, di mana resolusi akan menjadi berbeda menurut keadaan yang spesifik dari industri dan sektor-sektor nasional ekonomi lainnya.

Seperti melindungi industri domestik melalui ketentuan perdagangan (term of trade), proteksi, tarif prinsip (pajak) dan kuota (limit dari jumlah impor), telah menjadi cara yang konvensional untuk meyakinkan produksi domestik bukanlah tumpahan oleh import yang murah saja. Tapi apabila suatu industri sukses di perdagangan internasional maka perhatian industri tersebut kemungkinan tidak harus dilindungi, karena harus memikirkan biaya dari komponen-komponen yang essensial dan karena kekhawatiran dari ancaman-ancaman pesaingnya. Maka sangat wajar apabila sebagian sektor industri/ekonomi menginginkan dukungan dan perlindungan.

Masalah dari politik ekonomi internasional adalah salah satu dari aktual atau struktural potensial yang tidak seimbang antara sistem negara yang formal berdasarkan teritori (nation state) dan sistem ekonomi yang meningkat secara non-teritorial dan globalisasi. Perdagangan telah banyak mengundang kontroversi politik seperti AS-Jepang di mana keseimbangan perdagangan telah menjadi masalah yang timbul dari politik domestik AS dan AS-Jepang dalam hubungan Internasional, tapi penjelasan dan resolusi sebagai isu politik tergantung dari identifikasi dan pengertian dari kerangka kerja ekonomi internasional dengan di mana perdagangan tersebut dilakukan. Perbedaan kerangka kerja menghasilkan perbedaan penjelasan dan kebijakan menurut objektif politik kita.

Apabila kita tinggal di dunia dengan model ekonomi internasional yang secara akurasi didefinisikan sebagai cara hubungan ekonomi antar negara distrukturisasikan, maka pendekatan kita untuk mengerti dan menjelaskan permasalahan yang telah dibuat akan mengarahkan kita untuk mencari kompetensi dan otoritas dari pemerintahan nasional dan organisasi pemerintahan internasional, konstruksi dan pengoperasian rezim internasional untuk menjalankan aktivitas ekonomi internasional. Maka pemecahannya akan menimbulkan keutamaan secara berkesinambungan dari perubahan-perubahan dan kita akan bekerja di dalam dunia dengan esensi yang belum berubah sejak formalisasi dari sistem negara modern 200 tahun yang lalu.

Akan tetapi banyak pengusaha, politikus dan akademika yang menyatakan bahwa kita tidak mempunyai lagi ekonomi internasional yang sederhana berdasarkan hubungan perdagangan dan investasi antara ekonomi nasional dengan pengendalian oleh pemerintahan nasional. Hasil daripada ekonomi internasional yang kompleks memerlukan modifikasi dan perkembangan untuk menghadapi global ekonomi politik. Esensi ekonomi global adalah di mana kita mempunyai struktur dan tambahan terhadap ekonomi internasional, dan terbuat dari perusahaan yang menjalankan secara transnasional.

Aktivitas dari perusahaan tersebut berdasarkan produksi global dan pelayanan bagi pasar global, dengan berbagai aktivitas ekonomi mereka yang ditempatkan di luar pasar dalam struktur global mereka. Secara bersamaan

konstitusi aktivitas ini mengganti fundamental secara keseluruhan struktur dari ekonomi politik internasional. Struktur dari ekonomi politik global memiliki ekonomi internasional lama dalam kerangka kerja baru berdasarkan negara teritorinya, tapi tidak harus nasionalnya diartikan dalam kebutuhan, organisasi dan keuntungan. Mungkin cara yang tepat adalah mendemonstrasikan dari kegunaannya dan mengembangkan ilustrasinya untuk ekonomi internasional.

Gambaran secara keseluruhan dari totalitas aktivitas dunia dalam ekonomi politik global adalah tingkatan struktural yang kompleks. Ekonomi global adalah ekonomi internasional ditambah aktivitas dari pembuatan produksi dan pelayanan ekonomi yang dijalankan sebagai sistem total. Objektif dan perhatian aktor ekonomi global tidak menjadi faktor yang sama untuk mendukung pemerintahan individual atau sistem secara keseluruhan. Semakin tinggi tingkatan dari globalisasi maka akan lebih kompleks ekonomi politik internasionalnya, lebih tinggi masalah untuk mengendalikan negara dan organisasi pemerintahan internasional, maka lebih susah untuk meraih pengendalian demokrasi dari kehidupan ekonomi nasional dan lebih jauh perbedaan antara kaya dan miskin dalam global ekonomi politik.

B. PENGARUH NEGARA BESAR BAGI PERKEMBANGAN GLOBALISASI

Di lingkungan praktisi dan akademisi Hubungan Internasional pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an ini, secara luas dikenal sebagai era Pasifik. Sebutan ini bertolak dari kekaguman masyarakat internasional atas kinerja pembangunan ekonomi yang begitu mengesankan dari sejumlah negara-negara yang ada di kawasan ini seperti Australia dan Selandia Baru. Selain Jepang yang sudah tampil sebagai kekuatan ekonomi kelas dunia sejak dasawarsa 1980-an yang memberikan pengaruh pada perkembangan Globalisasi dan Liberalisasi ekonomi di kawasan Asia, kini bermunculan negara-negara industri baru di Asia seperti Korea Selatan, Hongkong dan Singapura yang mendapat julukan 4 Naga Kecil Asia atas prestasi ekonomi yang luar biasa. Selain itu, banyak negara berkembang di kawasan ini yang diyakini akan tampil sebagai negara industri baru pada era beberapa tahun

mendatang seperti Malaysia.

Di kawasan ini juga terletak negara Republik Rakyat Cina, sebuah raksasa industri yang baru bangun dari tidurnya yang panjang. Sejumlah negara yang semula sibuk bergelut dengan konflik internal berkepanjangan seperti Vietnam kini juga mulai melangkah membenahi potensi ekonominya yang besar.

Penghujung dasawarsa 1980-an juga ditandai dengan begitu banyak peristiwa penting yang bahkan berada di luar dugaan para pengamat, diplomat dan negarawan yang paling optimis sekali pun. Di mulai dengan gelombang liberalisasi dan demokratisasi (setelah mendapatkan kemenangan pada perang ideologi) di negara-negara sosialis Eropa Timur yang berpuncak pada runtuhnya Tembok Berlin, simbol kebekuan perang dingin pada tahun 1989. Uni Soviet yang semula begitu menakutkan justru mengalami disintegrasi sehingga pecah menjadi 15 negara.

Semua itu menjadikan kawasan Asia menjadi begitu penting, apalagi setelah berakhirnya perang dingin yaitu setelah dunia sekian lama tercekam oleh hingar-bingar persaingan ideologi antara liberalis yang dibawa oleh Amerika Serikat dengan komunis (sosialis) yang dibawa oleh Uni Soviet.

Seperti telah diutarakan sebelumnya, Korea Selatan dan Taiwan mulai berhasil mengatasi kesulitan perekonomiannya pada awal dasawarsa 1980-an, yaitu manakala Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Ronald Reagan berhasil memperbaiki perekonomiannya, dan hal ini dibarengi pula dengan adanya penurunan harga minyak secara tajam. Jadi meski pun mengalami sedikit gangguan, perekonomian Korea Selatan sejak tahun 1883 terus berkembang dengan pesat. Penurunan yang sempat terjadi pada tahun 1985 itu disebabkan oleh terjadinya kemerosotan tingkat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Oleh karena itu, jelaslah bahwa angka perdagangan ekspor Korea Selatan sangat bergantung kepada akses pasar di Amerika Serikat. Pada tahun 1988, proporsi ekspor Korea Selatan yang diarahkan ke Amerika Serikat hampir mencapai 40% dari total ekspornya. Maka tidaklah mengherankan apabila kelesuan ekonomi di negara adidaya itu membawa dampak negatif sangat terasa bagi Korea Selatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang berturut-turut selama tiga tahun berikutnya terutama disebabkan oleh adanya revaluasi

mata uang Yen terhadap dolar yang bersumber dari persetujuan antara pihak Jepang dan Amerika Serikat serta sejumlah negara industri maju lainnya yang dikenal dengan *Plaza Accord*.

Alasan naik dan turunnya laju pertumbuhan ekonomi Taiwan itu juga sama dengan Korea Selatan, yakni kondisi ekonomi Amerika Serikat. Resesi kecil yang terjadi di Amerika Serikat berdampak negatif pada perekonomian Taiwan, seperti yang diperlihatkan pada pertumbuhan tahun 1985. Dibandingkan Korea Selatan, ketergantungan Taiwan terhadap Amerika Serikat ternyata lebih besar lagi. Hampir separuh dari total ekspor Taiwan sangat tergantung kepada penyerapan pasar domestik Amerika Serikat. Persetujuan tentang revaluasi Yen juga memberi keuntungan bagi negara ini.

Ketergantungan ekonomi Jepang kepada Amerika Serikat juga terlihat pada proporsi ekspornya ke sana. Pada tahun 1987, sekitar 36,5% dari total ekspor Jepang diserap oleh pasar Amerika Serikat. Sebagaimana kita ketahui arus ekspor dari Jepang yang begitu deras telah menyebabkan defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Jepang yang sangat besar. Selanjutnya defisit ini menimbulkan friksi yang berkepanjangan antara kedua negara tersebut. Masalah itu pulalah yang sedikit mulai menumbuhkan proteksionisme yang kemudian berkembang dengan subur di Amerika Serikat.

Untuk mengatasi defisit perdagangannya, berbagai cara telah dilakukan oleh Amerika Serikat, yakni mulai dari upaya untuk memaksakan "*Voluntary export restraints*" terhadap aneka produk luar negeri seperti tekstil, pakaian jadi, negatif film berwarna, televisi berwarna, mobil, dan sebagainya, sampai dengan tekanan-tekanan terhadap pihak Jepang untuk merevaluasi nilai mata uang Yen terhadap US\$ yang mulai berlangsung mulai sejak tahun 1985, dan juga desakan terhadap Jepang agar mau menerima impor lebih banyak dari Amerika Serikat. Upaya pihak Washington yang terakhir ini ternyata menimbulkan kesulitan politik yang cukup fatal bagi partai yang tengah berkuasa di Jepang pada saat itu, yaitu LDP. Dalam pemilihan umum untuk mengangkat para anggota Majelis Tinggi pada bulan Juli 1989 para pendukung tradisional LDP yang kebanyakan berasal dari daerah pedesaan menolak memberikan suara mereka untuk LDP sebagai protes dari kebijakan LDP untuk mengadakan liberalisasi impor produk-produk pertanian; termasuk

beras. Ada pun usaha lain yang dilakukan LDP dalam rangka mengerem arus ekspor Jepang ke Amerika Serikat adalah menciptakan kebutuhan domestik atau berusaha menaikan tingkat permintaan domestik guna menyerap lebih banyak produk-produk dari Jepang sendiri atau pun barang-barang impor. Ini sama sekali bukanlah hal mudah, mengingat bangsa Jepang terkenal hemat dan sangat gemar menabung.

Namun pada saat yang bersamaan, pihak Jepang juga telah meningkatkan Penanaman Modal Asingnya di Asia Tenggara dengan tujuan yang sama. Pada tahun 1986 Jepang melakukan investasi asing tiga kali lebih banyak daripada yang dilakukan oleh NICs (kecuali Singapura) di ASEAN. Kemudian pada tahun 1987, PMA Jepang di kawasan itu berjumlah US\$ 1 milyar, sedangkan yang dilakukan oleh NICs baru berjumlah US\$ 350 juta. Pada tahun 1988 PMA Jepang masih tetap memegang peranan dominan di ASEAN, terutama di Thailand (secara akumulatif mencapai US\$ 5,6 milyar). Dua tujuan investasi terpenting bagi Jepang pada tahun itu adalah Amerika Serikat dan Taiwan. Pada tahun itu saja, investasi Jepang di masing-masing negara berjumlah US\$ 3,5 milyar dan US\$ 2 milyar. Di Malaysia, PMA Jepang ternyata juga cukup besar (nilainya mencapai US\$ 444 juta selama tahun 1988). Dari peringkat para investor asing di Malaysia, Taiwan tercatat nomor dua terbesar dengan nilai investasi sebesar US\$ 307 juta, disusul Amerika Serikat dengan investasi sebesar US\$ 196 juta. Hanya di Filipina dan Indonesia, PMA Jepang tercatat kurang menonjol (US\$ 91,2 juta dan US\$ 256 juta). Di Filipina investasi Jepang kalah dibandingkan dengan investasi dari Amerika Serikat dan Taiwan (masing-masing berjumlah US\$ 147 juta dan US\$ 105 juta). Sementara itu di Indonesia, PMA Taiwan tercatat paling tinggi (US\$ 913 juta) disusul oleh investasi asing dari Amerika Serikat sebesar US\$ 671 juta.

Seperti disinggung sebelumnya, proses pengalihan industri-industri Jepang ke manca negara tersebut bertolak dari kebutuhan untuk memperbaiki daya saing internasional mereka yang terancam menurun maupun untuk menembus proteksionisme yang semakin merajalela di kalangan mitra dagang Jepang. Misalnya saja, menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Perburuhan Jepang, terungkap bahwa 26% perusahaan-perusahaan Jepang dengan jumlah buruh lebih dari 1.000 orang sangat ingin mengadakan ekspansi dan pengalihan usaha ke negara-negara Asia,

sedangkan sekitar 26% perusahaan Jepang lainnya sedang mempertimbangkannya secara serius.

Tentu saja hal itu sejalan dengan usaha pemerintah untuk mengurangi arus ekspor dari Jepang ke luar negeri yang sering menggusarkan para mitra dagangnya itu, terutama sekali Amerika Serikat. Namun selanjutnya timbul persoalan tentang kelanggengan suplai barang-barang tersebut untuk pasar domestik di Jepang sendiri, seandainya kegiatan usaha dari sejumlah besar perusahaan-perusahaan Jepang tadi benar-benar dipindahkan ke seberang lautan. Untuk mengatasi masalah itu Pemerintah Tokyo mulai melakukan liberalisasi impor barang-barang dari Asia, sehingga ekspor NICs ke Jepang meningkat.

Pemerintah Jepang, atas dasar alasan yang sama, juga mulai mempertimbangkan untuk meningkatkan ekspor dari berbagai perusahaannya yang beroperasi di negara-negara ASEAN ke Jepang atau negara ketiga. Mengenai hal ini, berbagai laporan yang terbit pada tahun 1985 telah menunjukkan bahwa perusahaan Jepang yang mengadakan investasi di kawasan itu telah mempersiapkan diri untuk memacu kegiatan-kegiatan ekspornya. Untuk memperlancar maksud tersebut, dan juga dalam rangka mendorong PMA baru Jepang, Pemerintah Tokyo telah mengupayakan penyediaan Rencana Bantuan Luar Negeri baru (*"keyzai kyoryoku"*, yang arti sesungguhnya adalah kerja sama ekonomi) untuk lebih membantu kalangan swasta dan meningkatkan kegiatan ekspor manufaktur diberbagai negara ASEAN. (Strategi inilah yang disebut sebagai *"san' I ittai"* atau pihak ketiga, satu badan). Rencana tersebut memperbolehkan dipergunakannya bantuan ekonomi dari Tokyo untuk mengembangkan usaha-usaha patungan (*joint ventures*) antara pengusaha Jepang dengan pengusaha domestik.

Dengan strategi perusahaan dan kebijakan pemerintah yang beriringan semacam itu, Jepang berhasil mempertahankan dominasi ekspor berbagai jenis barang, mulai dari yang berharga murah sampai dengan yang paling *luks*, untuk kalangan konsumen yang berpenghasilan terendah hingga yang paling tinggi, serta untuk negara-negara yang tergolong masih terbelakang maupun kelompok negara yang sudah maju.

Sampai di sini jelaslah bahwa perkembangan perekonomian dunia yang terakhir, khususnya meningkatnya proteksionisme Amerika Serikat dan

negara-negara Eropa Barat, serta melemahnya perekonomian Amerika Serikat itu sendiri telah mengkhawatirkan Jepang dan mendorongnya untuk merumuskan strategi-strategi yang baru. Berbagai usaha telah dilakukan Jepang guna menghindari proteksionisme tersebut sambil mencari segala kemungkinan untuk meningkatkan usaha integrasi perekonomian di Asia Pasifik yang sesuai dengan kepentingannya sendiri.

Sejauh ini negara-negara di Asia bersikap positif dalam menerima tindakan-tindakan Jepang semacam itu, oleh karena mereka sendiri masih sangat membutuhkan kerja sama Jepang untuk melakukan berbagai perbaikan di dalam struktur industrinya. Sementara itu ada usaha-usaha dari pihak Korea Selatan dan Taiwan untuk mengurangi ketergantungannya dengan mengimpor teknologi lebih tinggi dari Jepang. Namun ini memperoleh hambatan dari Pemerintah Jepang yang jauh-jauh hari telah mencurigainya sebagai sumber saingan di masa depan. Lagi pula struktur industri di kedua negara itu pun masih belum sepenuhnya kuat. Industri-industri kecil dan menengah Korea Selatan dan Taiwan belum cukup banyak dan mampu memasok berbagai komponen dan input pendukung yang dibutuhkan industri-industri besarnya.

Belakangan ini muncul tanda-tanda di kalangan publik di Korea Selatan, Taiwan, dan juga Jepang untuk bersikap lebih nasionalis. Di Korea Selatan berbagai kerusuhan pada masa pasca Kwangju pada akhirnya sedikit demi sedikit mampu memaksa pihak pemerintah untuk bersikap lebih defensif.

Perkembangan-perkembangan terakhir di sejumlah negara industri baru telah memperlihatkan betapa keberhasilan untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi memang membawa konsekuensi berupa kecenderungan keterbukaan atas sistem ekonomi dari yang interaksi terbatas menuju globalisasi dan liberalisasi. Tetapi salah satu unsur negatif dari perubahan di atas yang agaknya sangat perlu diwaspadai adalah semakin mencoloknya gejala-gejala kebangkitan nasionalisme, baik di negara industri baru maupun di negara yang perekonomiannya sudah maju seperti Jepang sendiri. Gejala itu semakin kuat justru di tengah-tengah meningkatnya kebutuhan akan perhatian mereka yang lebih besar atas penyelesaian berbagai masalah internasional, seperti tumbuhnya proteksionisme. Mungkin saja perbaikan struktur politik yang mengeraskan nasionalisme ini semata-mata

merupakan suatu solusi untuk mempersiapkan diri masing-masing dalam menghadapi globalisasi. Kalau pun itu benar, hal tersebut tetap saja berpotensi sangat besar dalam memunculkan berbagai bentuk friksi dan konflik yang lebih sengit di antara negara-negara tersebut.

C. KEKUATAN HEGEMONI AMERIKA SERIKAT DAN PERDAGANGAN BEBAS GLOBAL

Sebenarnya kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang di dunia umumnya dan di kawasan Asia-Pasifik pada khususnya tidak bisa dilepaskan dari usaha-usaha, pengaruh, serta tindakan Amerika Serikat sebagai negara hegemoni yang menjamin terpeliharanya sistem perekonomian Global yang Liberal. Selain menjamin terlaksananya sistem liberal itu: (1) negara hegemoni semacam itu memiliki beberapa fungsi penting lainnya (Robert Gilpin; 1987), Ia biasanya memiliki (2) keunggulan teknologi, yang kelak akan menyebar ke negara-negara pendukung negara hegemoni sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan membantu pertumbuhan ekonomi mereka. Penyebaran ini dibarengi oleh (3) bantuan ekonomi dan (4) perlindungan militer kepada setiap negara yang dianggap berpotensi untuk menjadi sekutu terkuatnya. Tentu saja kelak penyebaran bantuan ekonomi kelak juga akan diberikan kepada negara-negara yang kurang maju. Bantuan ekonomi kelak juga akan diberikan kepada negara-negara yang kurang maju untuk membantu usaha-usaha pembangunan negara bersangkutan guna memacu pertumbuhan ekonomi mereka. Fungsi yang juga penting adalah kedudukannya (5) sebagai pasar global raksasa yang mampu menyerap barang-barang ekspor dari negara-negara sekutunya. Jadi, hanya negara dengan pasar domestik yang sangat besar saja yang pantas menjadi negara hegemoni. Hampir semua negara di kawasan Asia-Pasifik sangat mengandalkan ekspornya kepada pasar domestik Amerika Serikat. Kemudian negara hegemoni ini harus mampu menyediakan (6) mata uang internasional dengan jaminan pasokan yang memadai guna menjamin likuiditas, kehandalan ekonomi guna menjamin kredibilitasnya di mata semua unsur masyarakat ekonomi internasional.serta disertai pula oleh serangkaian kebijakan dan mekanisme-mekanisme penyesuaian guna menjamin revilitasnya.

Boleh dikatakan semua negara-negara yang di kawasan Asia Pasifik, secara langsung maupun tidak langsung, pernah menikmati keuntungan tertentu dari Amerika Serikat dalam fungsi dan kapasitasnya sebagai negara hegemoni. Tentu saja distribusi keuntungan itu tidak merata. Jepang yang selama ini memperoleh prioritas tertinggi untuk menikmati segala manfaat tersebut, di samping itu, Jepang merupakan salah satu negara yang mampu memanfaatkan segala dukungan dan bantuan dari Amerika Serikat tersebut (di samping negara-negara Eropa Barat). Setelah itu negara-negara seperti Korea Selatan dan Taiwan ikut diprioritaskan mengingat posisi geopolitik mereka yang sangat strategis bagi kelangsungan "*containment policy*"-nya Amerika Serikat (kedua negara itu langsung berhadapan dengan raksasa-raksasa komunis, yakni Uni Soviet, RRC dan Korea Utara). Akan tetapi, negara-negara lainnya kemudian juga turut memperoleh manfaat tersebut. Ketika Jepang mencapai tarap ekonomi yang kuat, maka terjadilah apa yang dinamakan sebagai proses pelimpahan ke negara-negara tetangga terdekatnya yang kemudian berhasil tampil sebagai Naga-naga Kecil Asia tersebut dalam perkembangan selanjutnya proses pelimpahan itu meluas ke negara-negara ASEAN, termasuk ke Indonesia. Korea Selatan dan Taiwan, di samping Jepang sendiri tengah melakukan relokasi industri secara besar-besaran ke Asia Tenggara.

Dengan demikian kita sudah bisa menjawab pertanyaan di atas. Yakni, memang ada batas-batas tertentu bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Akan tetapi, jika negara hegemoni itu mulai melemah, maka yang akan terjadi sebaliknya yakni setiap negara dalam sistem sedikit banyak akan terkena getahnya, ini di buktikan ketika posisi dan kekuatan ekonomi Amerika Serikat melemah. Pembalikan posisi Amerika Serikat dari negara pendukung pola perdagangan bebas menjadi negara yang cenderung proteksionis membawa seluruh kawasan Asia Pasifik bahkan sistem ekonomi global di bawah proteksionisme. Sedangkan tujuan Washington dalam menyediakan aneka subsidi tersebut adalah untuk memperkuat negara-negara sekutu di dalam membendung ancaman komunis sejak tampil sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia pada awal dasawarsa 1960-an, Jepang kemudian terus tampil semakin kukuh sehingga mulai menguasai pasar domestik Amerika Serikat selama dasawarsa 1980-an. Maka sebagai akibatnya, mulai timbulah reaksi-reaksi keras dari kalangan ekonomi domestik Amerika

Serikat yang terejawantahkan berupa gerakan proteksionisme, misalnya tuntutan VER (*Voluntary Export Restraint*), atau paksaan dari Amerika bagi mitra-mitra dagangnya khususnya Jepang, untuk membatasi ekspor mereka ke pasar Amerika secara sukarela. Sejak saat itu dunia dipenuhi oleh kompetisi dagang yang semakin ketat sehingga langsung membahayakan kelanggaran perdagangan bebas global. Hal ini cenderung membawa dampak berupa pertumbuhan perusahaan-perusahaan oligopolistik, atau yang kita kenal sebagai konglomerasi.

Tumbuhnya gejala oligopolistik tersebut juga disebabkan biaya-biaya persaingan yang semakin mahal akibat globalisasi. Pihak perusahaan harus senantiasa berusaha mencari lokasi yang memiliki keunggulan komparatif untuk bisa menekan biaya-biaya produksi. Oleh sebab itu terjadilah relokasi industri yang mempercepat proses alih teknologi produksi dan industrialisasi ke seluruh dunia. Gejala seperti ini tidak hanya terjadi di kawasan Asia Pasifik saja, tapi juga di seluruh dunia, teristimewa pada dasawarsa 1990-an.

Sampai sekian jauh Jepang memang telah berusaha untuk: menopang kekuatan hegemoni Amerika Serikat di Asia. Dalam beberapa hal Tokyo telah mampu mengambil alih fungsi-fungsi ekonomi global yang semula dipikul oleh Washington. Kelebihan dana yang dimiliki Jepang telah disalurkan untuk membantu perekonomian di negara-negara lainnya di Asia Pasifik, bahkan juga di kawasan lain seperti Amerika Latin. Terdapat sejumlah alasan untuk menegaskan kenyataan tersebut.

Pertama, pasar domestik Jepang tidak cukup besar bila dibandingkan pasar domestik Amerika Serikat untuk menampung barang-barang dari negara-negara lain. *Kedua*, negara-negara di kawasan Asia Pasifik belum bisa menerima Yen untuk menggantikan Dollar sebagai mata uang internasional. Keengganan ini terutama sekali disebabkan ketidakpercayaan negara-negara tersebut terhadap Jepang, khususnya bertolak dari berbagai pertimbangan sejarah. Karena, begitu suatu mata uang telah *internationalized*, maka pemerintah negara yang membuatnya pun tidak akan mampu mengendalikannya (baik volume maupun nilai tukarnya) secara penuh. Hal ini dibuktikan oleh kegagalan Amerika dalam mengelola Dollar, khususnya yang beredar di pasar-pasar uang luar negeri.

Dalam bidang teknologi, Jepang sudah mampu melepaskan diri dari

ketergantungan kepada Amerika Serikat. Namun ada satu hal yang penting yang perlu diingat, yakni bahwa perusahaan-perusahaan Jepang maupun kalangan akademisnya jauh lebih menitikberatkan kegiatan-kegiatan penelitian terapan yang menghasilkan teknologi terapan dan siap pakai (untuk keperluan bisnis), bukan penelitian dasar dan ilmu-ilmu murni yang mampu menghasilkan perubahan-perubahan teknologi yang lebih bersifat mendasar. Alasan berikutnya yang tidak kalah pentingnya, Jepang tidak bersedia memberikan perlindungan militer menggantikan Amerika Serikat (lagi pula kemampuan Jepang untuk itu masih diragukan). Negara-negara Asia Pasifik yang pernah mengalami kejayaan tentara Jepang tidak akan membiarkannya begitu saja. Itulah sebabnya Jepang merasa perlu untuk terus menopang Amerika Serikat dalam mempertahankan kekuatan dalam peran hegemoninya tersebut.

Sejak awal tahun 1990 usaha Tokyo dalam mendukung hegemoni Washington tersebut mulai berjalan tersendat-sendat. Surplus neraca pembayaran Jepang juga terus menyusut lebih dari sepertiganya sejak 1987 sehingga mulai membatasi kelancaran arus modal ke luar Jepang. Kemerosotan ekonomi ini masih ditambah lagi penurunan pendapatan Jepang dari ekspor.

Sementara itu tekanan-tekanan inflasi, apalagi dengan naiknya harga minyak impor akibat krisis teluk, dan kekurangan buruh, memaksa pemerintah Jepang untuk menaikkan suku bunga pinjaman. Memang tindakan ini bisa membuat investasi di sektor perumahan bahkan perluasan pabrik menjadi tidak menarik. Perhatian Jepang untuk mengadakan PMA di seluruh dunia hampir bisa dipastikan menurun akibat penurunan kinerja ekonominya itu. Meskipun demikian, PMA Jepang selain yang terarah ke Amerika untuk negara-negara tetangganya di Asia Timur dan Asia Tenggara akan tetap menjadi prioritas, apalagi kawasan ini boleh dikatakan "halaman belakang Jepang".

Perlu kita ingat kembali tentang kemungkinan dunia mulai berada di akhir siklus ekonomi *Pax Americana* dengan segala manfaat dan keuntungannya. Kemerosotan sistem hegemoni biasanya ditandai oleh tiadanya kepemimpinan internasional yang cukup menonjol. Hal ini bisa mengakibatkan meningkatnya kompetisi dan bahkan konflik di berbagai sektor kegiatan dan kawasan. Sistem hegemoni di bawah kepemimpinan

Amerika Serikat mulai melemah; tetapi belum runtuh. Apalagi ke dua negara ekonomi kuat, yakni Jepang dan Jerman, masih merasa perlu, sampai batas tertentu, untuk mendukung kelanjutan hegemoni Amerika Serikat. Usaha-usaha deregulasi dan globalisasi aneka kegiatan ekonomi di negara-negara tersebut sebenarnya masih berkaitan dengan hal itu. Namun usaha globalisasi juga ada batasnya, karena masing-masing negara dengan sendirinya selalu berusaha untuk mengutamakan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya. Pertimbangan ekonomi tidak selalu menjadi bahan pemikiran nomor satu. Banyak hal lain yang juga dipentingkan oleh masing-masing negara atau pemerintah. Sistem internasional yang ada dewasa ini masih di dominasi oleh negara (pemerintah) dan belum menunjukkan tanda-tanda akan digantikan bentuk lain. Selain itu banyak kelompok-kelompok kepentingan di masing-masing negara yang mendukung usaha pemerintahnya untuk melawan globalisasi demi mengamankan kepentingan mereka sendiri. Memang ada juga kelompok-kelompok kepentingan lainnya yang membela globalisasi. Akan tetapi, bahwa globalisasi itu perlu didukung justru memperlihatkan betapa proses globalisasi itu sendiri juga ada batasnya.

Untuk beberapa negara, kondisi dunia yang semakin menjurus ke arah proteksionisme yang membutuhkan peranan birokrasi itu, tidak akan langsung memunculkan tekanan-tekanan bagi dilakukannya serangkaian penyesuaian politik. Lagi pula, peranan birokrasi di negara-negara tersebut sudah begitu kuat sehingga mereka mampu menjalankan peran sejauh yang dibutuhkan.

D. PENGARUH JEPANG DALAM PERKEMBANGAN GLOBALISASI DAN LIBERALISASI EKONOMI DI ASIA

Keperkasaan kedudukan Jepang sebagai pasar impor, penyedia bantuan luar negeri dan sumber investasi asing begitu dominan bagi perekonomian Asia Tenggara. Pembangunan negara-negara di kawasan Asia Pasifik banyak menimbulkan kekaguman dan juga kekesalan di sejumlah negara-negara lain. Istilah seperti "*The Pasific Century*" sebenarnya mengacu pada perkembangan tersebut secara keseluruhan. Sementara itu bermunculan istilah-istilah lain seperti negara-negara industri baru yang lebih dikenal dengan sebutan 4 Naga Asia untuk menunjuk Korea Selatan, Taiwan,

Hongkong dan Singapura yang prestasi kinerja ekonominya dianggap paling mengagumkan di kawasan ini.

Dunia semakin tertarik pada model perekonomian liberal yang menfokuskan pada usaha penggalangan ekspor, pembangunan sektor-sektor industri manufaktur, penarikan modal asing, dan pada akhirnya mereka mulai mengungkit-ungkit model ekonomi Jepang yang liberalis sebagai suatu strategi pembangunan yang telah terbukti berhasil dan perlu mendapat perhatian ekstra. Beberapa ahli percaya bahwa keberhasilan itu ditunjang oleh liberalisasi perdagangan dengan menggunakan segala resep pengenalan mekanisme pasar yang diramu oleh ahli neoklasik ekonomi.

Sementara itu, disadari bahwa peranan sistem internasional ternyata sangat besar dalam membantu keberhasilan globalisasi perekonomian di dunia pada umumnya dan di Asia pada khususnya yaitu perekonomian Jepang dan ke-4 Naga Kecil (Macan) Asia. Padahal sistem ini hanya akan mencapai kondisi equilibrium bila negara "*hegemony*", dalam hal ini Amerika Serikat dengan liberalisme-nya bersedia mendukung keberhasilan dari sistem tersebut. Yang dikhawatirkan adalah apabila pengaruh negara hegemoni sedang menurun dan negara-negara lain malah sedang memperkuat pengaruhnya, maka hal ini akan membawa disequilibrium. Bagi negara-negara yang menganut model pembangunan Jepang, ini berarti keharusan untuk menurunkan laju pertumbuhan ekonomi dan mengurangi arus ekspor ke Amerika Serikat. Di samping berbagai usaha lainnya untuk mempertahankan diri. Mengingat apapun kebijakan yang diambil kelak akan membawa pengaruh kepada perkembangan politik, maka akan sangat menarik bagi kita untuk menyimak masa depan model Jepang itu sendiri.

Pada masa yang lalu, telah terbukti betapa model perekonomian Jepang yang liberalis itu ternyata lebih mampu menyesuaikan diri terhadap guncangan-guncangan yang disebabkan faktor eksternal maupun internal di kawasan Asia, terutama yang berdimensi ekonomi. Pada bab ini akan sedikit memberikan uraian tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi di Asia dengan mengambil contoh negara Korea Selatan dari Taiwan dilihat dari perspektif kegiatan dari kepentingan Jepang sebagai pelopor model perekonomian liberal di kawasan ini. Pertama-tama betapa bentuk negara di Jepang yang sering disebut sebagai "*developmental state*", mempunyai

karakter yang unik yang pada gilirannya membawa pengaruh-pengaruh tertentu ketika sektor swasta maupun publik meluncurkan ekspansi ekonomi ke luar. Tahapan-tahapan industri dan pilihan atas jenis sektor industri tersebut, beserta struktur politik yang mendukungnya, di Korea Selatan dan Taiwan pada masa pasca perang dunia kedua ternyata merupakan peralihan dari masa imperialisme Jepang. Akan tetapi terlihat nanti betapa rentetan krisis ekonomi dari politik yang terjadi pada awal dasawarsa 1960-an di Korea Selatan dari Taiwan pada akhirnya menciptakan kebuntuan ekonomi dari kestabilan politik yang mendorong pemerintah untuk merumuskan serangkaian strategi ekonomi baru yang harus didukung oleh suatu koalisi politik baru demi menuju tahap industri yang lebih tinggi.

Pada pembaharuan ini diharapkan akan diperoleh kejelasan atau pemahaman bahwa peranan negara dalam model Jepang sangat besar. Hal yang sama juga berlaku untuk Korea Selatan dan Taiwan. Peranan pemerintah di kedua negara ini sangat dominan dalam perintisan usaha ekonomi yang berorientasi ekspor. Hal ini membantah penjelasan bahwa yang percaya bahwa keberhasilan model Jepang bisa dijelaskan melalui model ekonomi makro. Dari uraian ini juga diharapkan kesan-kesan sepintas yang sempat beredar di Indonesia, baik di kalangan awam atau akademik tentang sosok manusia Jepang, Korea Selatan dari Taiwan yang serba unggul, ditunjang oleh agama dan tradisi tertentu yang merupakan faktor penentu keberhasilan mereka, bisa dihapus atau dikurangi. Karena, seperti akan kita lihat, kesan yang cenderung mengagungkan etnik Asia Timur itu bukan hanya berlebihan, tetapi juga salah.

Lebih dari itu, penjelasan seperti itu jelas berbau Chauvinisme, rasialis, terlalu menyederhanakan persoalan dan pada akhirnya tidak dapat memberikan solusi sama sekali. Lagi pula, sebenarnya pilihan-pilihan ekonomi yang diambil sebuah negara merupakan penyesuaian atas persoalan ekonomi, kebijakan koalisi politik dan tekanan-tekanan eksternal pada waktu Korea Selatan mengambil keputusan untuk menekankan usaha-usaha ekonomi nasional lebih berorientasi pada ekspor, ini merupakan tekanan dari Amerika yang mulai enggan melanjutkan pemberian subsidi melalui IMF. Faktor penyebab atas adanya reorientasi ekspor itu adalah kebuntuan perekonomian di Korea Selatan akibat kegagalan orientasi ekonomi

sebelumnya yang lebih mengarah ke strategi ISI (*Import Substitution Industry*) yang ternyata banyak menimbulkan inflasi dan keresahan politik. Dengan demikian tulisan ini mencoba untuk menjelaskan urutan-urutan peristiwa ekonomi, peranan modal asing, otonomi birokrasi dan kekuasaan negara serta strategi ekonomi yang dipilih oleh Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Faktor lain adalah dampak yang ditimbulkan oleh proses pembangunan terhadap besar kecilnya suara atau kepentingan masyarakat luas dapat tertampung dalam perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah, serta kondisi dasar dinamika politik dari kelompok-kelompok sosial ekonomi yang ada di masyarakat itu.

Pada bagian berikut ini akan dijelaskan pula perkembangan kepentingan Jepang di kedua negara tetangganya tersebut selama dasawarsa 1980-an, yang merupakan suatu dasawarsa penting bagi hubungan-hubungan ekonomi dan politik internasional. Selama dasawarsa itulah terjadi penurunan alam kekuatan ekonomi dan militer Amerika Serikat yang kemudian membawa dampak-dampak serius terhadap distribusi kekuasaan dan equilibrium sistem Pax Americana, yang pada gilirannya memberi dampak pula kepada Jepang, yang pada gilirannya juga akan menimpa Korea Selatan dan Taiwan. Perubahan-perubahan terutama sekali akan melanda negara dengan bentuk pemerintahan yang otoriter dan pilihan strategi ekonomi pasar bebas.

Contoh kasus:

Pembangunan Model Perekonomian Liberalisme Jepang (yang memacu pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara di Asia).

Jepang merupakan suatu negara yang relatif terlambat membangun perekonomiannya, faktor ini membawa dampak kuatnya intervensi negara dalam berbagai kegiatan dan usaha pembangunan ekonomi, untuk itu pemerintah Jepang cenderung untuk mengurangi peranan oposisi dan memperkuat peranan birokrasi demi mencurahkan segala perhatian bangsa kepada upaya pembangunan ekonomi. Bentuk negara ini disebut negara pembangunan yang berbeda dari model Uni Soviet maupun model negara pengawas yang dianut oleh Amerika Serikat dan negara-negara industri maju Barat lainnya.

Pada model negara pembangunan (*developmental state*) di Jepang ada beberapa hal yang sangat membedakannya. Jepang meninggalkan komitmen ideologi yang berlebihan maupun kepemilikan atas semua alat produksi dan sumber daya oleh negara pada dasawarsa terakhir abad 19, yaitu ketika korupsi dan efisiensi sudah sedemikian parah hingga memaksa pemerintah Jepang membiarkan pertumbuhan swasta. Ada pun pihak swasta yang sekarang ini tumbuh di Jepang sebenarnya adalah hasil koneksi politik dari kelas elit yang berkuasa. Unit-unit bisnis yang bersandar pada kekuasaan politik itulah yang menjadi cikal bakal (yang disebut *zaibatsu*) dan bibit proses pengambilan kebijakan yang bersifat *interconnected* antara pihak: politisi, birokrasi dan swasta menjadi besar. Tindakan mengikutsertakan swasta ini sebenarnya untuk mempercepat tujuan nasional Jepang, yaitu membentuk negara makmur dan tentara kuat (*ifokoku kyohei*), berdasarkan anggapan akan adanya bahaya dari luar, yaitu kekuatan dari Barat yang dianggap sangat mengancam eksistensi Jepang. Dengan sendirinya pembangunan ekonomi dan kekuatan militer ini diarahkan untuk mengejar kemajuan yang telah dicapai Inggris dan Amerika Serikat.

Model negara pembangunan ini mencoba menyesuaikan semua tujuan-tujuan pembangunan dengan berlangsungnya mekanisme pasar (di mana harga-harga ditentukan oleh ukuran nilai yang nyata dan bukan oleh keputusan/selera penguasa; hak milik perorangan diakui secara penuh baik dalam teori maupun prakteknya; dan pembuatan keputusan disentralisasikan). Sedangkan pada negara-negara yang lebih lambat membangun industri seperti Korea Selatan dan Taiwan, model negara pembangunan ini dipilih sebagai solusi untuk mengatasi aneka masalah keterbelakangan dan ketergantungan mereka kepada pihak-pihak luar. Biasanya sistem negara yang tumbuh dalam model negara pembangunan ini adalah sistem yang bersifat otoriter; semua usaha dan kegiatan ekonomi mendapat perhatian yang sangat besar dan disertai usaha-usaha guna menciptakan stabilisasi politik, apa pun caranya dan berapa pun harganya.

Model negara pembangunan ini berbeda dengan *regulatory state*, yaitu bentuk pemerintahan dan pola ekonomi yang bisa dijumpai di Amerika Serikat. Model ini juga melakukan intervensi ke berbagai kegiatan ekonomi, hanya intervensi ini dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya persaingan bebas, yaitu untuk mengawasi dan mengusahakan agar semua pihak

yang terlibat bekerja dalam aturan permainan yang berlaku demi tercapainya efisiensi dan efektivitas.

Negara pembangunan sendiri lebih menaruh perhatian kepada upaya-upaya peningkatan kemampuan dan daya saing internasional dari sektor-sektor industri domestiknya. Jelas ini adalah suatu kebijakan yang bersifat nasionalis. Pelaksanaannya akan diserahkan kepada kalangan birokrasi berdasarkan proses konsultasi, kooperasi dan kompetisi dengan pihak swasta dan politisi. Peranan para birokrat ini tidak selamanya besar dan dominan. Selama dasawarsa 1980-an peranan mereka semakin menurun, digantikan oleh kaum politisi sejalan dengan peningkatan kemampuan penetrasi dari *business interest groups* serta kelompok ekonomi sosial lainnya atas keseluruhan proses pembuatan kebijakan nasional. Tekanan dari luar ini dilakukan lewat agen-agen birokrasi sendiri, fraksi-fraksi partai yang berkuasa maupun pihak oposisi. Persoalan bertambah kompleks manakala hal itu dikaitkan dengan kepentingan mitra dagang dari luar negeri yang menuntut perlakuan yang lebih adil dalam hubungan dagangnya dengan Jepang. Dengan demikian, di Jepang sendiri sejak 1980-an muncul kecenderungan pergeseran dari bentuk negara pembangunan yang menjurus ke arah *regulatory state* di mana penyelesaian konflik baru melalui jalur hukum dan parlemen. Padahal sementara itu di AS sendiri pemerintah semakin sering mengadakan intervensi, khususnya dalam rangka melindungi unit-unit ekonomi domestik dari persaingan dengan pihak asing sehingga menimbulkan kesan berbau proteksionis. Meskipun demikian hal itu tidak mengubah karakter dasar logika negara kapitalis *regulatory state*-nya menjadi negara pembangunan atau model lain, kecuali apabila di kemudian hari terjadi serangkaian perubahan yang sangat revolusioner.

Pada model negara pembangunan (*developmental state*) yang ada di Korea Selatan atau Taiwan, sistem politiknya bahkan lebih otoriter daripada yang ada di Jepang. Hal ini terlihat jelas ketika kedua negara tersebut mengambil sikap yang sangat keras ketika terjadi krisis, seperti krisis ekonomi ketika kebijakan ISI mengalami stagnasi pada tahun 1960-an akibat krisis tersebut, kaum militer mengambil alih kekuasaan di bawah pimpinan Jenderal Park Chung Hee dan melancarkan tindakan yang keras demi menciptakan stabilisasi politik. Selanjutnya ia mengundang para investor

Jepang serta melancarkan strategi ekspor sebagai solusi atas krisis tersebut. Rezim-rezim keras seperti itulah yang kemudian dikenal dengan nama “rezim birokratik otoriter” atau BAIRs (*bureaucratic authoritarian industrializing regimes*).

Yang tidak kalah menarik untuk diamati adalah perkembangan Korea Selatan dan Taiwan pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an. Setelah mencapai kinerja ekonomi yang mengesankan, dan standar hidup penduduknya sudah jauh lebih baik, sistem politik di Korea Selatan dan, dalam taraf yang berbeda, Taiwan mulai terbuka. Kaum oposisi mulai mendapat tempat yang lebih baik dan aneka prinsip demokrasi mulai dipraktikkan secara luas. Ternyata strategi ekonomi yang sangat menekankan kepada pertumbuhan ini membawa perubahan-perubahan pula terhadap struktur pekerjaan, pada rasio, modal dalam setiap sektor industri, tingkat keahlian dan pendidikan, dan juga memicu serangkaian perubahan yang bersifat mendasar dalam kehidupan politik. Namun lagi-lagi, tekanan dari mitra ekonomi dan strategi dasar dari kedua negara itu sendiri juga ikut berperan.

Kepentingan Jepang dan Dampaknya di Asia-Pasifik

Perkembangan ekonomi di Asia-Pasifik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Jepang dan segala dampaknya di kawasan itu dari masa ke masa. Dalam kedudukannya sebagai negara hegemoni yang sangat berkepentingan atas kelanggengan sistem internasional pasca perang dunia kedua, maka seluruh pengaruh Amerika Serikat juga harus diperhitungkan. Di samping itu, tentu saja kita juga tidak akan dan tidak bisa mengabaikan begitu saja pengaruh dan usaha-usaha domestik dari Korea Selatan dan Taiwan sendiri.

Kepentingan dan pengaruh Jepang atas Korea Selatan dan Taiwan ini terbagi ke dalam dua periode. *Pertama*, antara tahun 1900 hingga 1945, yaitu pada masa sistem imperialisme regional di kawasan Asia-Pasifik. *Kedua*, sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua sampai sekarang ini, di bawah sistem *Pax Americana*. Jepang, pada periode yang kedua ini sudah tentu lebih mendekati posisi *semi periphery*.

Pada periode pertama, Jepang lebih merupakan sebuah negara hegemoni berskala regional di kawasan Asia Timur, yang mencoba mengintegrasikan segenap wilayah jajahannya ke dalam core, yakni Jepang sendiri. Perlu

dijelaskan bahwa Jepang sebenarnya agak terlambat memasuki sistem internasional yang bersifat imperialis pada masa itu. Faktor keterlambatan itu bersama dengan keterlambatan dalam melancarkan kegiatan dan upaya industrialisasi telah memaksa Jepang memperkeras cara dalam rangka mengontrol wilayah-wilayah jajahannya. Peranan negara ini juga besar dalam memberikan fasilitas kepada pihak swasta ikut berperan dalam kegiatan Imperialisme. Usaha-usaha integrasi ekonomi yang dilakukan Jepang atas wilayah-wilayah jajahannya dilancarkan secara intens dan serius. Hal ini membawa dampak positif berupa perbaikan sarana dan fasilitas infrastruktur di Korea dan Taiwan. Jika pada masa sebelum dasawarsa 1930-an, yaitu masa depresi besar dunia dan menjelang Perang Dunia II, Korea, dan Taiwan hanya merupakan wilayah-wilayah gudang beras dan gula buat Jepang, maka setelah dasawarsa 1930-an, Jepang membangun prasarana dan industri di sana. Usaha integrasi ekonomi ini melibatkan pula usaha transformasi sosial, politik untuk menggencarkan usaha mobilisasi ekonomi tersebut.

Harus diakui bahwa kolonialisme merupakan suatu tindakan yang membawa tragedi bagi umat manusia di dunia. Akan tetapi untuk memahami keberhasilan pembangunan ekonomi di kedua negara industri baru tersebut, kita harus memperhitungkan adanya warisan kolonialisme Jepang yang memberi dampak positif. Satu manfaat penting dari pengalamannya di bawah kolonialisme Jepang adalah, Korea dan Taiwan telah berkenalan dengan aneka proses dan kegiatan ekonomi yang kemudian hari mempercepat serta memudahkan keterlibatan mereka dalam usaha industrialisasi. Proses awal industrialisasi yang diperkenalkan Jepang telah ikut melibatkan sekelompok usahawan kecil yang bekerja di sektor pengolahan yang kemudian menjadi cikal bakal kelas pengusaha yang tangguh di Korea dan Taiwan. Lagi pula dengan kekalahan Jepang dan masuknya pengaruh Amerika Serikat di Korea Selatan, negara bekas jajahan ini memperoleh kesempatan untuk mengarnbir alih industri itu dan membelinya secara murah dari pihak Jepang. Faktor penting lainnya adalah adanya tenaga-tenaga terdidik yang siap membangun negaranya. Diperkirakan akibat penjajahan tersebut, di Korea (Selatan) terdapat sekitar 7.000 tenaga tingkat manajerial dan 28.000 kaum profesional serta teknisi terampil. Secara keseluruhan, jumlah orang Korea yang punya keterampilan dan pengalaman bekerja yang cukup memadai di berbagai sektor ekonomi modern mencapai sekitar 440.000 orang.

E. PEMBENTUKAN ALIANSI PERDAGANGAN DUNIA

Aspek ekonomi dari sistem internasional memiliki kekuatan dominan semenjak revolusi industri. Karena jarak semakin diperpendek dan persaingan semakin tajam, adanya kebutuhan akan pasar dan tenaga kerja terampil yang murah, serta upaya mendapatkan bahan mentah dan sumber daya energi, maka aplikasinya terhadap politik internasional menjadi berlipat ganda. Upaya pembangunan sesuai Perang Dunia II dan pertentangan ekonomi-politik antara Barat yang kapitalis dan Timur yang sosialis merupakan faktor-faktor pendukung berikutnya. Meskipun semua masalah ini bertolak dari bidang ekonomi, masalah-masalah itu sangat mempengaruhi sistem politik internasional. Guna menata segenap hubungan ini, dunia menciptakan sebuah sistem ekonomi internasional penunjang, yang banyak di antaranya telah dilembagakan (yaitu, lembaga antar pemerintah yang diatur secara formal) semenjak Perserikatan Bangsa-Bangsa terbentuk. Lembaga-lembaga itu seperti *the Bank for International Settlements (BIS)*, *the Group of Seven (G7)*, *the International Monetary Fund (IMF)*, *the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, *the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)*, *the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, *the World Bank Group (WBG)*, dan *the World Trade Organization (WTO)*, yang akan dijelaskan secara ringkas di bawah ini.

1. *Bank for International Settlements (BIS)*

Didirikan di tahun 1930 dengan kantor pusat berkedudukan di Basle. Beranggotakan empat puluh bank sentral. Memonitori kebijakan keuangan dan arus keuangan. The Basle Committee on Banking Supervision, yang didirikan lewat BIS di tahun 1974, telah membuka jalan dari upaya untuk menciptakan peraturan dari perbankan global.

2. *Group of Seven (G7)*

Didirikan di tahun 1975 yang pada awalnya masih terdiri dari lima negara (Perancis, Jerman Barat, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat) dan kemudian berkembang dengan masuknya Kanada dan Italia. Kegiatan G7 ini merupakan kolaborasi semi-formal pada masalah ekonomi dunia. Pemimpin pemerintahan bertemu pada konferensi tingkat tinggi setiap tahunnya,

menteri keuangan atau pemimpin dari lembaga pemerintah yang mewakili negara masing-masing saling berkonsultasi dalam pertemuan ini. Dewasa ini Rusia ditambahkan ke G7, sehingga menjadi G8.

3. *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*

Didirikan di tahun 1947 dengan berkantor di Genewa. Mempunyai anggota yang mencapai 122 negara digantikan oleh WTO di tahun 1995. GATT merupakan koordinasi dari delapan putaran negosiasi, untuk mengurangi hambatan perdagangan barang lintas batas.

4. *International Monetary Fund (IMF)*

Berdiri di tahun 1945 dengan kantor pusat di Washington DC. Beranggotakan 182 negara. IMF mengawasi aliran uang jangka pendek yang terjadi antar lintas batas dan masalah devisa. Sejak tahun 1979 badan ini juga memformulasikan stabilitas dan perubahan sistem kebijakan untuk suatu negara yang mengalami masalah kronis yang sulit dari hutang antar-lintas batas atau transisi dari suatu negara yang dulunya memakai sistem perencanaan ekonomi komunis.

5. *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*

Berkantor pusat di Montreal, dan berdiri di tahun 1984. Beranggotakan 115 negara mempunyai pengatur keamanan perniagaan saham tersendiri dan (tidak terdapat voting) asosiasi perdagangan dari 69 negara. IOSCO mengembangkan kerangka kerja untuk melakukan supervisi keamanan perniagaan saham dari perusahaan-perusahaan antar-lintas batas.

6. *Organization of Economic Co-operation and Development (OECD)*

Didirikan tahun 1962 dengan kantor pusat di Paris. Beranggotakan 29 negara dengan kemampuan industri berlebih. Mempunyai staf yang terdiri dari 600 para profesional di bidang ekonomi, OECD mempersiapkan laporan dalam saran dan nasihat pada semua tindakan dari pertanyaan makro-ekonomi. Kini OECD telah beranggota lebih dari 30 negara setelah masuknya Korea Selatan dan Singapura.

7. *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*

Berdiri tahun 1964 dengan kantor pusat di Genewa. Mempunyai anggota 187 negara. UNCTAD memonitor perdagangan lintas batas pada kondisi makro-ekonomi, khususnya di negara-negara (negara berkembang) Selatan. Yang menghasilkan suatu kunci bagi *New International Economic Order* pada forum diskusi di tahun 1970-an.

8. *World Bank Group (WBG)*

Terdiri atas koleksi dari 5 agenda, yang untuk pertama kalinya didirikan di tahun 1945, dengan berkantor pusat di Washington DC. Group ini membuat suatu proyek pinjaman dalam jangka waktu yang panjang bagi pembangunan suatu negara yang terbelakang. Seperti halnya IMF, Bank Dunia telah sejak tahun 1979 menjadi suatu hal yang memberatkan pada penyesuaian struktur program-program di negara-negara Selatan dan Asia - Pasifik.

9. *World Trade Organization (WTO)*

Berdiri tahun 1995 dengan kantor pusat di Genewa. WTO merupakan institusi permanen untuk menggantikan posisi GATT. WTO mempunyai agenda yang lebih luas dan menempatkan kekuatan yang lebih besar lagi di dalamnya. untuk mengatur perdagangan internasional.

Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi

A. GLOBALISASI ATAU KAPITALISME GLOBAL

Merujuk kepada buku-buku maupun jurnal-jurnal, era yang akan mendominasi dunia ini untuk saat ini serta masa mendatang adalah era globalisasi dan kapitalisme global. Globalisasi adalah sebuah gejala yang pada saat ini sungguh tidak terelakkan. Televisi dan koran membawa berita-berita dari segala sudut dunia ke meja kantor dan rumah di berbagai pelosok; bukan hanya berita perang, tetapi juga berita olah raga, fashion, musik, dan sebagainya. Orang kini bisa marah, sedih, dan gembira terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak ia lihat dengan mata kepala sendiri. Sementara itu produk-produk, yang tidak bisa dibuat di tanah air, memenuhi rak-rak toko dan etalase. Mereka didatangkan dari segala penjuru dunia, dari minuman, sepatu, makanan, baju, celana, hingga mobil mewah. Dan tidak boleh dilupakan, para pemburu saham, setiap hari mereka menyaksikan harga saham turun-naik bukan hanya yang di Jakarta, tetapi juga di London, Frankfurt, Tokyo, dan New York. Orang dibuat tidak bisa tidur atau sakit jantung gara-gara harga saham melonjak dan tidak menentu.

William Greider mengamati bahwa globalisasi yang sedang terjadi seperti angin topan ini pada akhirnya hanya akan menguntungkan segelintir orang, dan menyengsarakan sejumlah besar, penduduk planet bumi ini. Dalam bukunya *One World, Ready or Not, The Manic Global Capitalism* (1998), ia

melontarkan tesisnya bahwa motor di balik globalisasi adalah yang disebut “kapitalisme global”. Sesuai dengan watak kapitalisme yang rakus dan tidak pernah puas, mereka beramai-ramai menguras kekayaan dunia, masuk ke dalam kantung mereka, dengan memanfaatkan teknologi komputer, mengabaikan semua kesantunan hidup bersama.

Memang para kapitalis global itu telah memungkinkan penyebaran kenyamanan dan kemudahan, tetapi itu semua hanya untuk 10 persen dari penduduk bola dunia; sementara jurang antara si kaya dan si miskin (istilah baru: *digital divide*) menjadi kian menganga. Siapa kapitalis global itu? Mereka adalah para spekulasi uang yang jumlahnya tidak lebih dari 200.000 orang (yang terkenal di antaranya adalah George Soros), dan sekitar 53.000 perusahaan multinasional (*multi-national corporations*) yang memperkerjakan sekitar enam juta orang di seluruh dunia. Harus ditambahkan di sini adalah institusi keuangan internasional, IMF (International Monetary Fund) dan World Bank. Lembaga Keuangan Internasional itu didukung oleh WTO (World Trade Organization) secara langsung atau tidak langsung ikut membantu para kapitalis global untuk membuka pasar di seluruh dunia yang sampai sekitar tahun 1970-an merupakan pasar tertutup. Bagaimana globalisasi akan seks, makanan, dan lain sebagainya seperti shopping center dan supermarket (*K-Mart*, *Wal-Mart*) apakah Amerikanisasi?

Hal ini menyentuh pada tingkat kebudayaan yang juga merupakan unsur intrusif dari negara maju sekaligus alat propaganda di dalam menebarkan bom-bom budaya baru di segala penjuru dunia, yang antara lain melalui MTV yang banyak berisikan materi gaya hidup dan musik anak muda Amerika Serikat dengan disertai penyanyi-penyanyinya (Britney Spears, Shakira, Paula Abdul, Shania Twain) dan juga diikuti dengan film-film buatan Hollywood (*Rambo*, *Rocky*, *Terminator*, *Austin Power*) yang didukung oleh acara berupa pemberian penghargaan piala Oscar. Sehingga menekan budaya lokal sampai ke sudut yang paling sempit sehingga orang dibuat lupa akan budayanya sendiri dan mengindahkan nilai-nilai budaya asing yang masuk ke dalam dirinya. Sebab di jaman sekarang ini orang yang tetap berpendirian teguh pada nilai-nilai lama atau dengan kata lain budayanya akan dipandang ketinggalan jaman ini bisa disebut pula Amerikanisasi atau bisa disebut juga *McDonaldization*, yang merupakan suatu ideologi kebudayaan untuk

membenarkan semua yang disebut “neoliberalisme”.

Regionalisme dengan blok-blok ekonomi yang ada di kawasan masing-masing seperti ASEAN sebagai contoh juga mau tidak mau harus dapat menerima atau mencoba bertahan dari terpaan badai globalisasi yang terasa kencang ini dengan menguatkan kerjasama ekonominya. Sebab pergerakan dan pergeseran atau transformasi secara besar-besaran terjadi dalam hal ini demi memudahkan perdagangan seperti pembebasan tarif bea masuk dan pajak disertai dengan masuknya praktisi asing baik itu tenaga kasar, ahli dari negara luar atau pun barang dari negara maju atau antar negara berkembang sendiri (AFTA dan APEC) semua komponen usaha khususnya Indonesia (sebagai contoh) dalam hal ini harus “berperang” melawan dunia luar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Edward Luttwak (*Turbo Capitalism*, 1999) tentang peranan negara dalam proses penjarahan global ini.

Kalau pada masa 20-30 tahun yang lalu negara-negara terlibat dalam yang disebut *geo-politics*, pada masa sekarang yang terjadi adalah *geo-economics*. Negara-negara kini “berperang” dengan mengerahkan “pasukan” mereka yang terdiri dari para pelaku bisnis internasional dan juga birokrasi yang mereka miliki. Strategi yang dipakai juga mirip pada masa lampau: membentengi diri sambil menyerang lawan. Tentu saja negara-negara maju (AS, Jepang, Eropa Barat) rata-rata memenangkan peperangan ini jika mereka berhadapan dengan negara yang belum maju.

Dalam kaitannya dengan globalisasi ini di mana dibutuhkan dukungan dan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pemerintah negara lain dan dengan MNC (*multinational-corporations*) baik itu tertuang dalam wadah kerangka kerja sama ekonomi regional dalam kawasan (ASEAN, Uni Eropa) ataupun wadah lembaga atau badan internasional (IMF, WTO, World Bank) yang lain. Lebih lanjut demi memajukan roda perekonomian dunia karena dalam era globalisasi sekarang peranan MNC yang cukup besar (FIAT, Microsoft, IBM, General Motors, Royal Dutch/Shell Group, Exxon, Ford Motor, British Petroleum, Toyota Motor Corporation, General Electric, Unilever, Nissan, dan sebagainya). Juga tidak bisa dipungkiri lagi telah masuk ke seluruh dunia melalui produk-produk barang hasil MNC tersebut.

Jean Marie-Le Pen, pemimpin Partai Front Nasional Ekstrem Kanan yang sempat lolos di dalam babak penentuan pemilihan Presiden Perancis

pada bulan April 2002 yang lalu, bukannya memajukan kerjasama tetapi malah berusaha menumbuhkan atau membangkitkan kembali semangat jiwa fasisme serta nasionalisme sempit dengan mengedepankan isu-isu yang dianggap membahayakan bagi sebagian besar masyarakat dunia pada umumnya dan di dalam negeri Perancis itu sendiri. Yang di dalam kampanyenya 2002 yang lalu Le Pen mengedepankan gagasan bahwa arus imigran telah mengurangi kesempatan penduduk Perancis “asli” untuk memperoleh pekerjaan; bahwa naiknya tingkat kriminalitas di Perancis erat kaitannya dengan kehadiran kaum imigran (kaum pendatang dari Afrika Utara) dan juga gagasannya yang lain mengenai Perancis yang harus keluar dari Uni Eropa yang mana menurut Le Pen Perancis dan Uni Eropa mengalami hubungan yang abnormal serta telah memperbudak Perancis dan membuat Perancis kehilangan substansinya.

Mitos-mitos yang berkembang seputar globalisasi semakin terlihat menjadi suatu hal yang mendekati kenyataan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru pula. Pertama secara dramatis yang dikemukakan oleh Keniichi Omae. Ia berpendapat bahwa akibat dari globalisasi, dirumuskan sebagai gempuran dari *Four I - s*, akan lenyaplah yang disebut *nation states*. Hal ini memang cocok untuk dikatakan “dramatis” karena ia meramalkan suatu hal menakutkan yang menimpa sesuatu yang besar. Sekurang-kurangnya hingga tahun 2003 ini belum ada *nation-state* satu pun yang bubar. Negara bangsa masih berdiri, bahkan di beberapa tempat di dunia malah ada tuntutan baru untuk mendirikan negara-bangsa yang baru (Aceh, Papua, Kurdi, Taiwan, dan sebagainya). Negara-bangsa memang mengalami tekanan luar-biasa, yang belum pernah ada pada masa sebelumnya, tetapi negara-bangsa tidak bubar.

Sedang yang kedua dikemukakan oleh Noorena Hertz (*Silent Takeover and the Death of Democracy*) lebih masuk akal. Ia mengatakan akibat globalisasi ekonomi, akan terjadilah *the death of democracy*. Para pemimpin negara saat ini, memang dipilih rakyat, tetapi ternyata mereka lebih sibuk untuk “melayani” pelaku bisnis global yang tidak memilihnya. Para pemimpin negara yang masih memperhitungkan para pemilih dalam negeri (*domestic constituent*), tetapi justru demi memuaskan para konstituen inilah para pemimpin akan melakukan apa saja asal para kapitalis yang telah mengglobal itu mau datang di negaranya. Tentu saja para pemimpin bersaing satu sama lain

karena para investor hanya akan memilih negara yang memberikan syarat-syarat yang paling menguntungkan bisnis mereka.

Berbeda menurut Thomas L. Friedman seperti yang ditulisnya, melalui buku *Memahami Globalisasi: Lexus dan Pohon Zaitun*. Friedman menyebutkan bahwa ciri istimewa globalisasi terdapat pada kata integrasi. Dunia menjadi tempat untuk menjalin hubungan. Karena ancaman maupun peluang yang ada, tergantung dari kepada siapa seseorang dihubungkan. Sistem globalisasi dibangun di tiga keseimbangan yang saling tumpang tindih dan saling mempengaruhi, yaitu keseimbangan tradisional antara negara, lalu negara dengan pasar global, dan keseimbangan antara individu dengan negara.

Pasar global dalam hal ini penting karena dibentuk oleh jutaan investor yang memutar uangnya keliling dunia hanya dengan meng-klik *mouse* komputer. Runtuhnya tembok Berlin memberikan lebih banyak kekuasaan bagi individu, baik untuk mempengaruhi pasar atau pun negara. "Jadi, sekarang Anda tidak hanya memiliki negara adidaya, supermarket, tetapi juga sekarang Anda memiliki individu dengan kekuatan super (*super powerpeople*)," kata Friedman. Beberapa di antara individu dengan kekuatan super itu dalam kondisi sangat marah dan dapat bertindak langsung di pentas dunia. Untuk memperjelas itu, ia antara lain menunjuk contoh Osama bin Laden yang mengendalikan serangan teror di AS, 11 September.

Di era globalisasi ini dimana persaingan dalam berbagi bidang apalagi yang bersentuhan dengan ekonomi amatlah kompetitif, terutama dalam bidang usaha dan perdagangan. Sebagaimana kita ketahui UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di masa krisis ini bisa bertahan, sedang usaha-usaha besar yang sepanjang pemerintahan Soeharto banyak diberikan kemudahan di dalam berbagai hal, termasuk pemberian kredit tidak bisa bertahan. Mengapa UKM dan koperasi tidak seterpurus usaha besar? Pertama, sebagian besar usaha kecil menghasilkan barang-barang konsumsi (*consumer goods*) khususnya yang tidak tahan lama (*nondurable consumer goods*). Kelompok barang ini dicirikan oleh keandalan permintaan terhadap perubahan pendapatan (*income elasticity of demand*) yang relatif rendah.

Artinya seandainya terjadi peningkatan pendapatan pada masyarakat, permintaan atas kelompok barang ini tak akan meningkat banyak; sebaliknya jika pendapatan masyarakat merosot sebagai akibat dari krisis sebagaimana

yang terjadi dalam empat tahun terakhir ini maka permintaan tak akan banyak berkurang. Dengan demikian, secara rata-rata tingkat kemunduran usaha kecil tidak separah yang dialami oleh kebanyakan usaha besar, terutama usaha yang selama ini bisa bertahan karena proteksi, fasilitas istimewa, dan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) lainnya.

Kedua, mayoritas usaha kecil lebih mengandalkan pada *non-banking financial* dalam aspek pendanaan usaha. Hal ini terjadi karena akses usaha kecil pada fasilitas perbankan sangat terbatas. *Ketiga*, pada umumnya usaha kecil melakukan spesialisasi produksi yang ketat, dalam artian hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja (kebalikan dari konglomerasi). Modal yang terbatas menjadi salah satu faktor yang melatar belakangnya. *Keempat*, terbentuknya usaha-usaha kecil baru terutama di sektor informal, sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal karena krisis ekonomi yang berkepanjangan. Banyaknya unit usaha baru di sektor informal ini pada akhirnya membuat tidak terjadi penurunan jumlah UKM dan koperasi, bahkan dalam kenyataannya mengalami peningkatan menjadi satu juta unit.

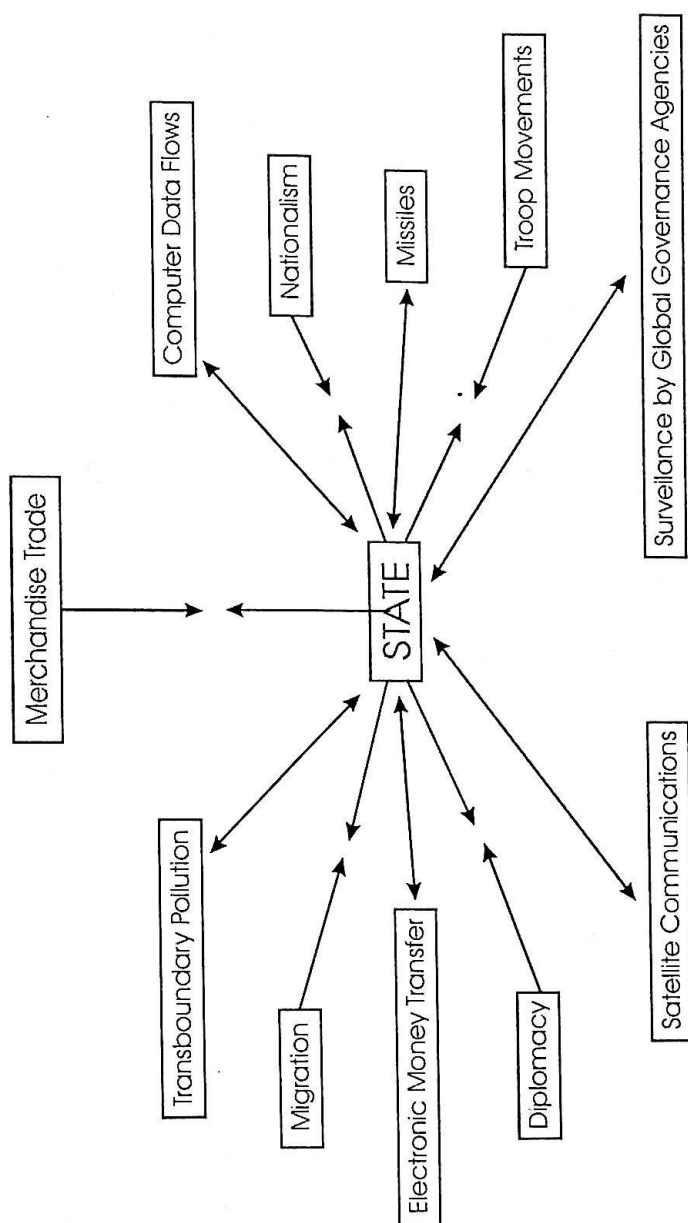
B. NEGARA DALAM SISTEM GLOBALISASI

Kedaulatan dari suatu negara menjadi dasar terhadap suatu wilayah di dunia ini. Dengan tujuan kepada pemerintah-pemerintah untuk melatih secara total dan kewenangan yang eksklusif di antara beberapa spesifikasi atau bidang tertentu, peristiwa-peristiwa yang timbul pada lokasi yang pasti, dan yurisdiksi yang harus dipisahkan secara jelas dari batasan atas demarkasi yang mana secara resmi agar dapat menjaga hal tersebut dalam pengawasan ketat di mana hal ini, dengan adanya globalisasi di mana hubungan sosial timbul mempunyai tuan rumah yang secara kualitas tidak lagi memiliki wilayah dan batasan yang melarut menjadi satu di dalam derasnya aliran arus elektronik dan lainnya, dengan kondisi awal secara krusial yang efektif dari kedaulatan telah berpindah.

Di sisi lain, beberapa angka dari materi pembangunan telah memotong kedaulatan negara tersebut. Negara secara kontemporer dalam hal ini tidak dapat dengan baik secara sendirinya mengontrol fenomena seperti perusahaan global, alat kontrol dari satelit, masalah ekologi global, dan

The State in Globalizing World

(Dalam buku *The Globalization of World Politics* oleh John Baylis and Steve Austin)



perdagangan global dari saham dan surat obligasi. Tidak ada dari hal tersebut yang dapat dikatakan berada dalam ruang wilayah di mana suatu negara dimungkinkan untuk melakukan usaha keras untuk menerapkan yuridiksi secara eksklusif.

Transmisi data komputer, senjata nuklir, dan komunikasi telepon tidak dapat dihentikan dengan melewati tempat pemeriksaan dengan batasan-batasan. Media massa global telah mengurangi peranan dari negara atas pendidikan dan bahasa. Dan di dalam memandang luasnya dan tersebarnya bank deposit dan secara besar dengan menggunakan transfer uang elektronik, negara juga kehilangan pijakan atas kepemilikan dari hal lainnya yang mana telah secara resmi terlebih dahulu menjadi bagian dari suatu kedaulatan, yaitu mata uang nasional.

Sepanjang perubahan materi ini, globalisasi juga telah melepaskan beberapa budaya dan unsur psikologi penting sebagai fondasi dari suatu kedaulatan. Sebagai contoh, hasil dari tumbuhnya jaringan lintas batas, membuat banyak orang memiliki loyalitas sehingga menambah dan mungkin akan dapat mengesampingkan perasaan dari solidaritas nasional yang sebelumnya telah diberikan secara sah kepada kedaulatan dari suatu negara. Dengan pertolongan dari konferensi global, komunikasi global, dan sebagainya, secara tepat ikatan suprateritorial yang mana telah mempererat di dalam pergerakan kewanita-an, di antara kelas-kelas manajerial transnasional, di lingkungan kaum *gay* dan *lesbian*, di antara kalangan orang-orang cacat, dan pada jutaan dari komunitas media-komputer yang didirikan melalui kelompok di internet.

Di waktu yang sama, globalisasi juga, seperti telah disebutkan di atas, sering kali diperkuat lagi dengan lokalisasi dari loyalitas. Sebagai contoh, di kalangan masyarakat pribumi dan grup etnik lain yang menjadi sub-negara tersebut. Sebagai tambahan, banyak orang di dunia globalisasi kontemporer ini telah membuat nilai tambah seperti di dalam pertumbuhan ekonomi, hak-hak asasi manusia, dan menyokong kemampuan dari ekologi sebagai suatu prioritas dibandingkan dengan kedaulatan dari negara yang secara normal diasosiasikan pada penentuan nasib secara nasional.

Negara dalam hal ini cenderung berusaha untuk mengatur tata cara dan penilaian agar mereka tidak kehilangan kedaulatan dalam menghadapi

globalisasi, tetapi mereka tidak mempunyai pilihan untuk menahan hal tersebut. Bahkan pemerintah Cina, yang secara terus menerus berusaha untuk menghidupkan kedaulatan yang bertumpu pada *world order*, menempatkan “interdependensi global” sebagai perhatiannya pada masa sepuluh tahun. *Blueprint* konsep ekonomi RRC di tahun 1990.

Memang ada pelanggaran dari kedaulatan di bawah sistem *Westphalian* pada abad ke 17, tetapi pada waktu itu adalah normal disadari untuk setidaknya mengadakan hipotesis bahwa suatu negara dapat, dengan kekuatan dari institusi dan instrumen yang dimiliki, dapat lolos dan secara legal berdaulat dan kedaulatannya itu dapat efektif. Secara kontras, di bawah kondisi dari globalisasi kontemporer, memerintah dengan berdasarkan atas kekuasaan yang tertinggi dan wilayah yang secara eksklusif mempunyai wewenang telah menjadi sesuatu yang sama sekali susah untuk dilaksanakan. Tidak sebanding dengan banyaknya jumlah bangunan institusi dan legislatif secara sepihak yang akan membolehkan suatu negara besar untuk mencapai kontrol atas kuasa mutlak di luar dari wilayahnya. Seperti halnya banyak negara pasca kolonial yang didirikan selama kurun waktu dari globalisasi tidak pernah berdaulat penuh.

Dewasa ini masalah hak asasi manusia menjadi isu yang hangat dibicarakan di hampir semua belahan dunia. Sebenarnya sudah dari zaman dulu masalah hak asasi dikenal di banyak kawasan di dunia, tetapi yang paling banyak sumber tertulisnya sehingga dengan demikian lebih terkenal ialah negara-negara Barat. Meskipun di banyak negara lain, termasuk negara-negara Dunia Ketiga, kebudayaan setempat telah mengenal hak-hak tertentu warganya, sekali pun tidak begitu eksplisit dirumuskan seperti di Barat. Materinya masih dalam bentuk cerita-cerita, legenda, dan metafor, yang sering tidak memisahkan fakta dari tafsiran, dan sering tidak berbentuk tulisan.

Dengan demikian konsepsi negara-negara Barat dari semula telah mendominasi pemikiran negara-negara yang tergabung dalam PBB yang seusai Perang Dunia II, telah merumuskan suatu dokumen yang dapat diterima secara universal. Hal tersebut dewasa ini masih berlangsung, sekali pun dunia sudah banyak berubah dan proses globalisasi telah menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia.

Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Dalam Preamble "Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik" dari PBB dirumuskan: *These right derive from the inherent dignity of the human person* (Hak-hak ini berasal dari martabat yang inheren dalam diri manusia). Hak ini

sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental) dalam arti bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap “universal”, artinya dimiliki manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin.

Deklarasi HAM yang dicetuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 mengandung makna ganda, baik keluar (antar negara-bangsa) maupun ke dalam (intra negara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negaranya masing-masing. Makna keluar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar negara-bangsa, agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan makna ke dalam, mengandung pengertian bahwa deklarasi HAM sedunia itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat dari masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya. Pelanggaran HAM (*Violation of Human Rights*) bukan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan ketertiban, tetapi penculikan, penyanderaan, penyiksaan, larangan beribadah dan sebagainya.

A. HAM SEBAGAI PROSES GLOBALISASI

Dewasa ini sebagai akibat dari proses globalisasi yang sedang “terjadi di hampir semua bidang”, kita membedakan tiga generasi hak asasi manusia. Generasi pertama adalah hak-hak politik dan sipil, yang sudah lama dikenal dan selalu diasosiasikan dengan pemikiran di negara-negara Barat. Generasi kedua adalah hak ekonomi dan sosial yang gigih diperjuangkan oleh negara-negara sosialis di PBB, dengan dukungan negara-negara Dunia Ketiga. Generasi ketiga adalah hak atas perdamaian dan pembangunan (*development*), yang terutama dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara Dunia Ketiga. Selain itu, mereka juga mengemukakan konsep mengenai relativisme kultural, yaitu pemikiran bahwa hak asasi harus dilihat dalam konteks kebudayaan masing-masing negara, karena hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaan hak asasi manusia itu.

Cikal bakal perumusan konsep hak asasi manusia di dunia Barat dapat

ditelusuri mulai dari filsuf Inggris abad ke-17, John Locke (1632-1704) yang merumuskan beberapa hak alam (*natural right*) yang inheren melekat pada diri manusia. Konsep ini bangkit kembali sesuai Perang Dunia II (pada tahun 1948) dengan dicanangkannya *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB. Dua puluh tahun kemudian dipertegas lagi dalam dua perjanjian (*Covenant*) Internasional, juga beberapa resolusi (hasil) Sidang Umum PBB.

Di Eropa proses *standard setting* diteruskan pada dasawarsa 70-an dengan diterimanya *Helsinki Accord* (1975), dalam dasawarsa 80-an, disusul dengan *African Charter on Human and People's Rights* (Piagam Afrika mengenai Hak Asasi Manusia dan Bangsa-bangsa, 1981). Dalam dasawarsa 90-an disusul dengan *Cairo Declaration on Human Right in Islam* (Deklarasi Cairo mengenai Hak Asasi dalam Islam, 1990), hasil karya Organisasi Konferensi Islam (OKI), *Bangkok Declaration* (*Regional meeting for Asia of the world Conference on Human Right*, 1993), *Vienna Declaration* (*World Conference on Human Rights*, 1993), dan *Human Rights Declaration of AIPO* (*Asean Interparliamentary Organization*, 1993).

Munculnya beragam piagam menunjukkan bahwa hak asasi manusia, sesuai dengan proses globalisasi yang sedang kita alami, tidak lagi menjadi monopoli dunia Barat. Ia sudah menjadi universal sifatnya, sekali pun dapat diwarnai secara khusus berdasarkan kebudayaan dan agama masing-masing negara. Bentuk-bentuk HAM seperti, penculikan, penyanderaan, penyiksaan, larangan beribadah dan lain sebagainya diterangkan secara gamblang oleh Scott David dalam bukunya yang berjudul *Hak Asasi Manusia*.

Dalam pengertian sebagai upaya penegakan harga diri manusia dan keadilan sosial, perjuangan bagi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) telah berlangsung sepanjang sejarah umat manusia. Tetapi HAM sebagai isu global adalah fenomena baru, karena baru akhir-akhir inilah HAM menjadi bagian dari agenda politik dunia. Menyatakan HAM sebagai sebuah isu global berarti menyatakan bahwa HAM dipandang sebagai suatu persoalan nilai yang kontroversial oleh sejumlah penting aktor-aktor internasional dan transnasional yang percaya bahwa tindakan politik atau kebijakan politik pada tingkat global diperlukan demi menghasilkan pemecahan atau solusi yang adil. Dengan kata lain, secara politis, HAM telah menjadi isu yang

menonjol dalam politik internasional.

Selama ini, meningkatnya jumlah dan pengaruh organisasi-organisasi non-pemerintah yang bergerak secara transnasional menjadi salah satu penyebab pokok kemunculan HAM sebagai isu global. Selain itu, keberadaan mereka juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan dan mempertahankan keberadaan HAM. Sedangkan faktor penyebab lain adalah semakin meluasnya tingkat melek huruf dan pendidikan.

Dengan demikian, tuntutan akan keadilan sosial semakin menguat, dan tuntutan ini dibawa dan diperkuat oleh organisasi non-pemerintah yang memiliki solidaritas yang sama. Revolusi komunikasi dan peran media massa juga membuat pelanggaran terhadap HAM, bahkan yang terjadi di wilayah terpencil sekali pun, tidak dapat ditutup-tutupi. Mereka yang menentang pelanggaran itu akan memasukkan isu ini ke dalam forum-forum internasional atau ke dalam opini masyarakat internasional.

HAM memiliki cakupan persoalan yang luas sehingga ancaman terhadap HAM pun beraneka-ragam. Salah satu ancaman yang paling kentara akhir-akhir adalah militerisasi yang walau pun tidak segawat dua dasawarsa yang lalu, masih merisaukan. Perlombaan senjata nuklir antara AS dan USSR di era Perang Dingin merupakan gambaran paling nyata akan adanya ancaman serius kemajuan teknologi militer bagi umat manusia. Sebagai akibat adanya peningkatan kegiatan di bidang militer tadi, ancaman berikutnya terhadap HAM adalah berlangsungnya perang. Sesungguhnya perang, baik itu perang saudara maupun perang antar-negara, diakui secara luas sebagai ancaman paling serius bagi HAM.¹

Bagi penganut paham liberal, bentuk ancaman terhadap HAM bisa muncul dari aktor negara (pemerintah) yang totaliter/otoriter, seperti yang ditunjukkan oleh negara-negara (bekas) sosialis dan beberapa negara dunia ketiga. Dalam konteks ini, kekuasaan negara yang begitu besar menjadikan hampir semua arena kehidupan sosial masyarakat bisa terjangkau olehnya. Daya jangkau negara untuk memasuki arena-arena sosial kemasyarakatan tertentu, seperti pengendalian media massa, oleh kaum liberalis dianggap

¹ Pelanggaran Hak dalam perang, bukan yang berkaitan dengan tentara yang saling bertempur (combatant), tetapi perlakuan pihak "combatant" terhadap penduduk sipil (non-combatant).

sebagai ancaman terhadap HAM. Apalagi bila dikaitkan dengan seringnya terjadi penindasan terhadap pihak oposisi dan pihak yang menentang kebijakan resmi pemerintah, para penganut paham liberal akan memperoleh bukti yang lebih konkret akan adanya ancaman terhadap HAM di negara-negara tipe ini.

Pada masyarakat di negara-negara Dunia Ketiga, ancaman terhadap HAM bisa datang pula dari perusahaan-perusahaan multi-nasional (PMN) raksasa yang beroperasi di negeri mereka. Perusahaan-perusahaan ini biasanya beroperasi tanpa bisa dikendalikan oleh aktor negara, atau pemerintah (host country). Bahkan kadang-kadang terdapat kesan negara tidak peduli. PMN-PMN cenderung mengabaikan soal pencemaran lingkungan, kesejahteraan buruh dan sosial kemasyarakatan di daerah di mana mereka beroperasi.

Tata ekonomi internasional yang tidak egaliter juga bisa menjadi ancaman serius bagi HAM, terutama bagi mereka yang hidup di daerah-daerah miskin dan terbelakang baik dalam skala internasional maupun nasional. Dominasi ekonomi negara-negara industri maju begitu kentara, dan dalam perspektif pihak yang miskin, ini adalah perwujudan dari pelanggaran terhadap HAM. Berbagai lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF cenderung menjadi perpanjangan tangan negara-negara maju. Lembaga-lembaga tersebut umumnya tidak sensitif terhadap isu-isu HAM.

Ancaman terhadap HAM juga bisa datang dari berbagai kelompok teroris yang tampaknya berada dan bertindak di luar kekuasaan pemerintah dan hukum. Penerapan HAM bisa juga terganggu oleh fanatisme agama, kebencian rasial, konflik etnis, tradisi dan struktur patrilineal yang menindas kaum wanita, dan oleh berbagai kekerasan yang muncul akibat ketidakacuhan dan keapatisan.

Meski pun demikian, di samping beragamnya ancaman bagi HAM di hadapan kita juga terhampar beberapa harapan akan terjaminnya penerapan HAM. Menurut Mochtar Mas' oed dalam bukunya *Isyu-isyu Global Masa Kini* memaparkan harapan-harapan tersebut. *Pertama*, HAM telah menjadi topik utama dalam agenda politik global. *Kedua*, meski pun sistem negara-bangsa masih merupakan bentuk dominan organisasi politik dewasa ini, tidak satu pun pemerintah yang berani menyatakan bahwa persoalan HAM tidak sah

untuk dibicarakan secara internasional. *Ketiga*, sebagai akibat dari kecenderungan tadi, negara-negara telah mulai menunjukkan kemauan politik untuk paling tidak melaporkan tindakan-tindakan yang mereka jalankan menyangkut pelaksanaan dan perlindungan HAM kepada badan-badan internasional. *Keempat*, kedinamisan yang terlihat dalam vitalitas lembaga-lembaga internasional, salah satunya adalah Komisi HAM di PBB plus badan-badan di bawahnya telah membuktikan peningkatan potensi mereka. *Kelima*, vitalitas yang telah diperlihatkan oleh sistem HAM Eropa dan Inter-Amerika dan prospek perkembangan mekanisme serupa di bagian yang lain. *Kelima terakhir*, adalah bermunculannya gerakan-gerakan *grass-root* (LSM-LSM) di hampir seluruh penjuru dunia yang mampu mengembangkan sendiri kesadaran mereka akan pentingnya memperoleh dan melindungi hak-hak masyarakat sipil.

B. DEMOKRATISASI

Demokratisasi dalam sistem pemerintahan, terlihat dari realita bahwa HAM telah semakin berkembang dengan munculnya komite HAM diberbagai bagian dunia termasuk di Indonesia telah ada komnas HAM.

Akhir-akhir ini istilah demokrasi dan demokratisasi sering menjadi topik diskusi umum. Demokrasi dapat dilihat sebagai ideologi. Dia dapat juga dilihat sebagai suatu sistem yang mengoperasionalkan ide-ide. Merumuskan suatu ideologi dalam garis-garis besar tidak terlalu sukar, akan tetapi yang paling sulit adalah mengoperasionalkannya.

Perkataan demokrasi memang mempunyai banyak arti namun satu pengertian yang pasti dapat kita setuju adalah demokrasi dapat dipakai untuk menunjukkan bahwa kekuasaan yang sebenar-benarnya ada di tangan rakyat, dan pemerintah hanya menjalankan mandat yang diberikan rakyat dan sesuai dengan aspirasi rakyat peranan lembaga internasional pun makin besar, seperti Amnesti Internasional (NGO), Konvensi *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 1989 No. 169.

Dalam masa perang dingin kita dapat dengan jelas membedakan dua kelompok besar negara yang menyatakan dirinya menganut demokrasi, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di samping itu, ada sejumlah besar Negara Dunia Ketiga yang sebagian terpengaruh oleh salah satu kelompok besar,

sedangkan sebagian terbesar ingin mempertahankan jarak yang sama dari kedua kubu tersebut dan cenderung mengembangkan suatu demokrasi dengan ciri khasnya masing-masing. Dua kelompok besar adalah kelompok negara demokrasi di Barat dan kelompok komunis di Timur atau yang juga disebut *Dunia Pertama* dan *Dunia Kedua*. *Dunia Pertama* kebanyakan menganut liberalisme dan sistem ekonominya berdasarkan persaingan di pasar bebas. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem parlementer dan sistem presidensial. Jumlahnya kira-kira 25 negara (antara lain Amerika Serikat dan Inggris).

Dunia kedua dalam masa jayanya terdiri dari kira-kira 11 (antara lain Uni Soviet dan Eropa Timur) yang berdasarkan ideologi komunisme dan sistem ekonomi yang sangat sentralistis. Sistem pemerintahannya sering disebut sistem majelis (assembly system).

Kelompok "the second world" ini menyatakan bahwa demokrasi mereka lebih murni karena merupakan demokrasi untuk mayoritas rakyat (buruh dan pekerja). Sedangkan di negara-negara liberal demokrasi hanya untuk minoritas kalangan elit kapitalis (itu kata mereka). Selain itu dicanangkan bahwa demokrasinya lebih unggul, karena khususnya memenuhi kepentingan rakyat banyak, sekali pun dalam praktek tindakannya sangat represif.

Dengan gagalnya komunisme baik secara politis maupun secara ekonomis, di era 1990-an alternatif yang tadinya disajikan oleh dunia komunis telah kehilangan pamornya terutama di Eropa Timur. Negara-negara itu di bidang ekonomi mulai berorientasi pada pasar bebas dan di bidang politik secara berangsur-angsur mencari sistem politik baru yang cenderung mirip dengan apa yang terdapat di negara-negara Barat.

Pada saat ini isu demokratisasi sedang menjadi sorotan. Dalam hal ini masyarakat Dunia Ketiga menjadi obyek dari negara besar yang sudah mengklaim diriya sebagai pelaksana dari demokrasi. Sampai sekarang sejumlah besar pemerintah Dunia Ketiga tidak demokratis. Perubahan ke arah sistem demokrasi secara formal di Amerika Latin dan sebagian Asia dan Afrika sub Sahara adalah akibat dari tekanan Internasional maupun dalam negeri. Sejak saat ini demokrasi mendapat dukungan di Barat dan maju dengan mantap di Dunia Ketiga. Singkatnya telah diterima secara luas bahwa tekanan internasional membantu menyakinkan kebanyakan

pemerintah Dunia Ketiga yang non-demokrasi untuk mengadakan pemilihan umum yang kompetitif, jujur, dan adil

Faktor lain yang mengarah kepada transisi demokratisasi adalah tekanan dari masyarakat sipil dalam negeri. Dengan mengambil petunjuk dari transformasi demokratis di Eropa Timur pada akhir 1980-an, kaum demokrat di Dunia Ketiga didorong untuk menekan pemerintah mereka ke arah reformasi politik. Selama beberapa tahun kemudian, puluhan sistem non-demokrasi menyerah kepada demokrasi formal, yaitu, sebagian besar orang mempunyai kesempatan untuk memilih pemerintahannya dengan interval yang teratur. Namun diresmikannya demokrasi formal tidak membawa ke arah demokrasi substantif, yaitu di mana rakyat jelata, pribumi dan kaum miskin, perempuan, kaum muda, golongan minoritas, dan etnik dapat benar-benar menempatkan kepentingannya dalam agenda politik. Dengan kata lain, diciptakannya demokrasi formal yang sementara diterima, itu sendiri belum cukup untuk menggeser keseimbangan kekuatan yang tidak memihak kepentingan kelompok bawah.

Menurut Jeff Hayes dalam bukunya yang berjudul *Demokrasi dan Masyarakat Dunia Ketiga*, menyebutkan bahwa ada tiga macam demokrasi, yaitu:

1. Demokrasi Formal

Demokrasi “formal” ditandai dengan pemilihan umum yang teratur “bebas dan adil”, kompetitif. Biasanya ditandai dengan tidak digunakannya paksaan secara berlebihan oleh negara terhadap masyarakat, secara teoritis lewat pertanggungjawaban pemerintah terhadap yang dipertintah (warga negara) melalui kotak suara, dan dilekatkan “rule of law”. Ada kebebasan sipil dan politik yang cukup untuk menjamin kompetisi sehat dalam pemilihan umum.

Inti demokrasi formal adalah bahwa ada aturan dan ketentuan yang bermakna untuk menentukan perilaku dan kandungan dari pemilihan umum, sementara pemerintah harus mengaturnya dengan memperhatikan proses hukumnya. Dengan demikian, terutama sekali demokrasi formal meliputi ide tentang *pilihan*; sehingga pemerintah yang tidak populer dapat tersingkir karena keputusan masyarakat dalam pemilihan umum yang teratur.

Tetapi, masalahnya bahwa banyak negara yang menjalankan sistem yang memenuhi kriteria demokrasi formal dan pada saat yang sama pemerintah lama mereka belum pernah terkalahkan dalam pemilihan umum, contohnya Mexico, RI (1971-1999), dan Zimbabwe.

2. Demokrasi Permukaan (*facade*)

Demokrasi "permukaan" merupakan hal yang umum di Dunia Ketiga. Tampak luarnya memang demokrasi tetapi sama sekali tidak memiliki substansi demokrasi. Dahulu demokrasi ini lazim terdapat di Amerika Latin. Demokrasi permukaan juga umum di Timur Tengah. Misalnya Presiden Saddam Hussein (Irak), Hafez al-Assad (Siria), Hosni Mubarak (Mesir) dan Muammar Khadafi (Libia) memperoleh kursi kepresidenannya pada tahun 1995 dengan paling sedikit 94 % dari suara pemilih. Tidak perlu dikatakan, di masing-masing kasus ini rezim penguasa tidak memiliki keinginan demokrasi yang sebenarnya.

Banyak rezim yang hanya memiliki kepercayaan demokratis yang tipis dengan kuat didorong oleh pihak Barat untuk meneruskan sistem politik mereka sebagai benteng menghadapi komunisme. Akibatnya, penjelasannya adalah bahwa terdapat aliansi antara pelaku kelas dalam negeri dengan pelaku internasional yang mendukung suatu bentuk demokrasi di Dunia Ketiga yang sangat terbatas. Hingga akhir 1980-an, meskipun demokrasi liberal adalah pilihan, hanya sedikit negara Barat menganggap isu seperti pemilihan yang bebas dan adil atau hak-hak sipil atau pribadi merupakan kondisi yang dipersyaratkan agar mendapat dukungan ekonomi atau perlindungan militer atau diplomatik. Demikian juga Bank Dunia atau IMF tidak menunjukkan komitmen yang serius untuk mendorong pemerintah khususnya, memang tidak ada alasan yang nyata mengapa mereka harus melakukan hal itu.

Perubahan demokrasi akhir-akhir ini di Dunia Ketiga dikendalikan oleh pemerintah Negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan para elit konservatif setempat yang mempunyai kepentingan yang telah mapan dalam membatasi luasnya perubahan politik.

3. Demokrasi Substantif

Demokrasi substantif memperluas ide demokrasi di luar mekanisme formal. Ia mengintensifkan konsep dengan memasukkan penekanan pada kebebasan dan diwakilinya kepentingan melalui forum publik yang dipilih dan partisipasi kelompok. Ia merupakan pendalaman demokrasi di mana semua warga negara mempunyai akses yang mudah pada proses pemerintahan, dan suara di dalam pengambil-keputusan secara kolektif. Terdapat saluran yang efektif atas pertanggungjawaban para pejabat negara. Demokrasi substantif menaruh perhatian pada berkembangnya kesetaraan dan keadilan, kebebasan sipil dan hak asasi manusia, pendeknya 'partisipasi murni dalam pemerintahan oleh mayoritas warga negara'.

Tiga perkembangan memberikan ciri pergeseran dari demokrasi formal ke demokrasi substantif:

1. penekanan yang tegas dan terus-menerus pengawasan sipil terhadap angkatan bersenjata;
2. perluasan sederetan hak-hak manusia dan hak sipil bagi sebagian besar warga negara;
3. saluran yang efektif dari partisipasi massa sehingga mereka yang tidak berdaya -kaum miskin, kelompok minoritas etnis dan agama, perempuan, kaum muda- memiliki suara nyata dalam penentuan arah bangsa.

C. FAKTOR-FAKTOR GLOBAL DEMOKRASI

Puluhan negara Dunia Ketiga akhir-akhir ini mengalami pemilihan yang demokratis, ada beberapa yang baru untuk pertama kalinya selama puluhan tahun. Di dalam buku *Demokrasi dan Masyarakat Sipil Dunia Ketiga* karangan Jeff Haynes, disebutkan bahwa pada tahun 1996, semua negara 23 negara Amerika Latin secara formal adalah demokratis, sementara 7 dari 20 yang sebelumnya adalah negara otoriter di Asia; Bangladesh, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filipina, Korea Selatan dan Taiwan juga menjadi negara demokrasi. Di Afrika sub-Sahara makin banyak rezim yang dipilih, lebih dari separo dari 48 negara di wilayah itu mengadakan pemilihan umum selama 1989-1996. Hanya di Timur Tengah tampak sedikit gerakan ke arah demokrasi,

meskipun terdapat tanda-tanda yang menggembirakan. Di Lebanon, demokrasi telah diperkenalkan kembali setelah 20 tahun, di Jordan melaksanakan pemilihan umum yang cukup "bebas dan adil" pada tahun 1994, dan sejumlah orang Palestina mengalami gerakan-gerakan sementara menuju otonomi di daerah pendudukan Israel.

Sementara tidak mungkin mengabaikan kelompok pro-demokrasi di dalam negeri untuk demokratisasi, tidak layak juga untuk mengabaikan peranan faktor-faktor eksternal. Bukan hanya di Dunia Ketiga, tetapi juga di tempat lain selama masa terakhir ini.

D. LINGKUNGAN HIDUP

Manusia sejak dilahirkan di dunia ini, telah berada mutlak pada suatu lingkungan hidup tertentu. Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya, adalah karena terdapatnya lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut. Lingkungan di mana manusia itu hidup dapat dikategorikan dalam tiga kelompok dasar yang menonjol yakni lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial.

Suatu lingkungan hidup dikatakan dalam keadaan serasi apabila selama interaksi manusia dengan berbagai komponen lingkungan lainnya berada dalam batas-batas keseimbangan atau dapat pulih seketika dalam keadaan seimbang, tetapi apabila timbul gangguan antara interaksi manusia dengan lingkungan disebabkan oleh batas-batas kemampuan salah satu komponen lingkungan sudah terlampaui, sehingga akibatnya tidak dapat lagi menjalankan fungsinya, maka lingkungan sudah menjadi tidak serasi atau tidak seimbang lagi. Di sinilah timbul apa yang disebut masalah lingkungan.

Emil Salim mengamati masalah lingkungan dengan mengaitkan kepada dua hal yang dapat menggoncangkan keseimbangan lingkungan hidup. *Pertama*, adalah perkembangan teknologi yang berhasil diwujudkan oleh akal dan otak manusia. Perkembangan teknologi merubah keadaan yang berada di ruang lingkungan hidup, sehingga timbul gangguan pada sistem lingkungan hidup. *Kedua* adalah ledakan penduduk. Selama pertumbuhan penduduk

berada dalam batas kewajaran, maka pertumbuhan ini tidak mengganggu terlalu banyak keseimbangan lingkungan, tetapi apabila perkembangan teknologi kemudian memungkinkan manusia meningkatkan kesejahteraan, tingkat kematian dapat dikendalikan dan diturunkan, maka timbullah ledakan penduduk yang mengguncangkan keseimbangan lingkungan hidup. Pertumbuhan manusia dalam ruang lingkup yang terbatas akan menimbulkan permintaan besar terhadap air, tempat pemukiman, pembuangan kotoran dan lain-lain.

Dengan meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat dunia umumnya dan kalangan pemerintahan ditingkat negara-bangsa khususnya dan bertambahnya persoalan kemerosotan lingkungan hidup yang sudah menyentuh kehidupan kita sehari-hari, seperti memanasnya suhu bumi dan meningkatnya jenis dan kualitas penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon kita, maka beberapa tahun belakangan ini kita melihat semakin banyaknya isu lingkungan hidup diangkat dalam agenda percaturan internasional.

Masalah utama dari lingkungan hidup adalah pencemaran. Pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Pergeseran bentuk tatanan dari kondisi asal pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masuknya bahan-bahan pencemar atau polutan. Bahan polutan tersebut pada umumnya mempunyai sifat racun (toksin) yang berbahaya bagi organisme hidup. Toksinitas daya racun dari polutan itulah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya pencemaran.

Ancaman yang muncul terhadap lingkungan hidup kita berasal dari dua jenis, yaitu ancaman yang alamiah dan ulah tangan manusia. Siklus dari unsur-unsur yang terdapat dalam lingkungan hidup membentuk keseimbangan tersendiri dan keseimbangan itu akan berubah ketika mendapat pengaruh dari dua jenis ancaman itu.

Perubahan-perubahan yang berlangsung dalam ekosistem dan biosfir, seperti perubahan yang mempengaruhi siklus air, merefleksikan ancaman-ancaman terhadap lingkungan global. Perubahan dalam siklus air merupakan ancaman paling utama, karena perubahan ini akan mempengaruhi iklim global pada umumnya. Sejumlah ancaman dan resiko lingkungan hidup global dapat dikategorikan sebagai berasal dari perubahan iklim global. Ancaman-ancaman tersebut akan diuraikan dalam penjelasan berikut ini:

1. Perubahan suhu global. Penurunan signifikan suhu global akan mengakibatkan masyarakat dunia, khususnya yang berada di belahan bumi utara, menghadapi "zaman es" baru. Akibat lanjutannya adalah perubahan dalam sistem pertanian, perumahan, bahkan pekerjaan di negara-negara kawasan utara. Kenaikan suhu global yang drastis, sebaliknya, mengakibatkan mencairnya es di kutub-kutub bumi sehingga menaikkan permukaan air laut yang akan mengancam keberadaan kota-kota dan daerah-daerah pesisir.
2. Meningkatnya kadar dan konsentrasi karbondioksida di atmosfer akibat kenaikan suhu bumi. Peningkatan unsur karbondioksida ini menciptakan apa yang dikenal sebagai "efek rumah kaca" (*green-house effect*). Semakin banyak kandungan karbondioksida di atmosfer maka semakin tinggi pulalah suhu bumi. Dua hal yang terkait dalam hal ini adalah bahan bakar bumi dan hutan. Bahan bakar bumi sebagai penyebab meningkatnya karbondioksida merupakan kebutuhan manusia sehari-hari. Sementara itu, hutan sebagai penetralisir kadar karbondioksida keberadaannya banyak terancam oleh berbagai usaha industrialisasi.
3. Perubahan iklim global juga bisa datang dari pencemaran air. Pencemaran air biasanya diakibatkan oleh limbah buangan. Akibat pencemaran air yang langsung berhubungan dengan iklim adalah apa yang disebut dengan hujan asam. Hujan ini antara lain berasal dari sumber-sumber air yang tercemar oleh sulfurdioksida (SO_2). Hujan asam berdampak pada berkurangnya pertumbuhan hutan, dan juga mematikan atau mengurangi jumlah ikan di perairan.
4. Semakin berkurangnya keanekaragaman hayati. Akibat dari hal ini dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat dan hilangnya habitat tertentu sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.
5. Ancaman yang berasal dari aktivitas militer, terutama ancaman akan meletusnya perang nuklir. Semua aktivitas yang berkaitan dengan perang tidak hanya mengancam atmosfer global, tetapi juga mengancam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan hidup sekitar kita.

Dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup global, dilakukan berbagai tindakan yang diprakarsai oleh organisasi-organisasi internasional. Di antaranya Konferensi Lingkungan Hidup Dunia pada tahun 1972 di Stockholm yang antara lain menghasilkan pendirian sebuah badan yang menangani permasalahan lingkungan hidup, yaitu *United Nations Environmental Programme (UNEP)*. Konferensi ini merupakan kesempatan pertama yang membicarakan isu lingkungan hidup secara internasional oleh berbagai aktor global. Sejak itu, nilai permasalahan lingkungan hidup benar-benar mengemuka menjadi sebuah isu global lewat berbagai arena dan agenda pembicaraan internasional.

Tahun 1980-an disebut sebagai "dekade penemuan lingkungan". Isu hubungan antara tuntutan sosial dan ekonomi penduduk dan lingkungan alam untuk pertama kali dibicarakan dengan cara ilmiah. Tanda yang dapat dirasakan mengenai meningkatnya perhatian dunia adalah Konferensi Puncak (Earth Summit) di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang disponsori PBB. Lebih dari seratus kepala negara dan 30.000 birokrat dan wakil organisasi non pemerintah bertemu untuk membicarakan 24 juta halaman dokumen persiapan dan untuk membuat keputusan yang luas menyangkut masa depan lingkungan global.

Di seluruh dunia dalam masalah lingkungan hidup telah terbentuk berbagai macam organisasi yang bertujuan untuk melindungi bumi dari kehancuran, seperti Green Peace yang mempunyai anggota di seluruh dunia, WWF (World Wild Fund), Green Parties (Partai-partai politik yang mendukung masalah lingkungan hidup) dan juga termasuk Indonesia yang mempunyai WALHI (Wahana Lingkungan Hidup).

E. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan mengenai isu-isu global kontemporer yang mencakup HAM, Demokratisasi, dan lingkungan hidup ialah sebagai berikut:

1. Dengan adanya dimensi berbeda dengan berbagai persoalan-persoalan konvensional antar bangsa memunculkan sejumlah isu baru dalam arena mutakhir hubungan internasional, isu-isu tersebut tidak hanya menyangkut dimensi aktor namun menyang-

kut pula dimensi nilai dan dimensi kebijakan. Isyu-isyu global juga muncul diiringi dengan adanya perspektif alternatif yang perlu dikembangkan dan dicermati sebagai nilai-nilai yang diakui secara universal.

2. Pengakuan dunia internasional tentang isyu-isyu mengenai HAM telah dimasukan dalam PBB dan organisasi internasional antar bangsa di dunia seperti ASEAN, dan Uni Eropa, antara lain: (UE), ancaman terhadap HAM yang mencakup masalah tindakan militer, kondisi sosial ekonomi, urusan wanita, rasial, dan agama.
3. Dalam kondisi internasional yang masih saling mempengaruhi antar suatu negara yang lebih besar pada negara lain yang lebih kecil di mana demokrasi sering didengungkan namun pada kenyataannya tidak mudah dalam pelaksanaannya. Pada masyarakat Dunia Ketiga yang paling sering menjadi obyek terdapat tiga macam demokrasi yaitu demokrasi formal, demokrasi permukaan, dan demokrasi substantif.
4. Masalah lingkungan hidup menjadi isyu-isyu global yang selalu dibicarakan akhir-akhir ini, karena ternyata banyak hal, yang mengancam masyarakat internasional di dalamnya, seperti perubahan suhu global, peningkatan kadar dan konsentrasi karbondioksida di atmosfer bumi, perubahan iklim bumi yang diakibatkan oleh pencemaran air, ditambah lagi semakin berkurangnya keanekaragaman hayati yang ada saat ini dan yang juga sangat mengkhawatirkan adanya ancaman militer berupa penggunaan energi nuklir yang diperuntukan untuk peperangan (senjata pemusnah masal).

Bentrok Peradaban dan Konflik Etnis

Pembahasan ini penulis awali dengan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan benturan antar-peradaban (*The Clash of Civilizations*), baru kemudian menguraikan masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik etnik (*Ethnic Conflict*). Meski pun pada pembahasannya keduanya akan saling beririsan atau saling berkaitan.

A. THE CLASH OF CIVILIZATIONS (BENTURAN ANTAR PERADABAN)

1. Hakikat Peradaban

Banyak dari kalangan para ahli yang memberikan definisi maupun ciri khas dari apa yang disebut peradaban. Di antaranya seorang sejarawan terkenal yakni Ibnu Khaldun, dalam bukunya *Muqaddimah*, ia memberikan ciri-ciri dari sebuah peradaban, yaitu adanya kekuasaan, pemerintahan, mata pencaharian, penghidupan, keahlian-keahlian, dan ilmu pengetahuan.¹

Sedangkan menurut Koentjaraningrat, peradaban memiliki unsur-unsur seperti kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan-santun pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan. Istilah "peradaban" sering juga dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi,

1 Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Edisi Ketiga, Penerbit Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 8.

ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, dan sistem kenegaraan dan masyarakat kota yang maju dan kompleks.²

Dalam buku *Benturan Antar-Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, karya Samuel P. Huntington, disebutkan ada lima makna sekaligus ciri dari sebuah peradaban.

Pertama, ide tentang peradaban yang dikembangkan oleh pemikir Perancis abad XVIII, yang memperlawankannya dengan konsep “barbarisme”. Suatu peradaban ada jika masyarakat bermukim secara tetap, terdidik, dan maju.

Kedua, merupakan sebuah entitas kultural. Suatu peradaban ada jika masyarakat meyakini nilai-nilai, kualitas moral dan memiliki kebudayaan, teknologi, serta faktor-faktor material tersendiri.

Ketiga, setiap peradaban selalu bersifat komprehensif yang tidak satu pun dari konstituen kesatuannya dapat sepenuhnya terpahami tanpa mengacu pada cakupan (wilayah) peradaban. Bisa ada suatu peradaban berdasar kesamaan agama, kawasan, etnis, bangsa, dan lain sebagainya.

Keempat, peradaban-peradaban bersifat fana namun juga hidup sangat lama; ia berkembang, beradaptasi dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, “realitas-realitas yang benar-benar dapat bertahan dalam waktu yang lama”.

Kelima, karena peradaban-peradaban merupakan entitas-entitas kultural, bukan entitas-entitas politis, sehingga tidak berpegang pada tatanan, penegakan keadilan, kesejahteraan bersama, upaya-upaya perdamaian, mengadakan berbagai negosiasi, atau menetapkan “kebijakan-kebijakan” yang biasa dilakukan oleh sebuah pemerintahan.³ Biasanya peradaban beruang-lingkup beberapa negara atau bangsa, kecuali Cina dan Jepang.

2 Koenjtaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Edisi Kedelapan, Penerbit PT. Rineka Cipta, 1990, hlm. 182.

3 Samuel P. Huntington, *Benturan Antar-Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Edisi Pertama, Penerbit Qalam, 2000, dan buku aslinya *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order* (Touchstone books, 1998) hal. 40-45.

2. Perbedaan Peradaban dan Kebudayaan

Telah disebutkan di atas akan definisi peradaban beserta unsur-unsur dan ciri-cirinya. Banyak beberapa ahli, khususnya di bidang antropologi yang telah memberikan definisi kebudayaan. Di antaranya seorang antropolog, E.B. Tylor (1871) dalam bukunya *Primitive Culture*, pernah mencoba memberikan definisi mengenai kebudayaan, yaitu:

*Kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.*⁴

Selo Soemardjan dan Solaeman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Rasa yang meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas. Di dalamnya termasuk misalnya saja agama, ideologi, kebatinan, kesenian dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, Cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir orang-orang yang hidup bermasyarakat dan yang antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan.⁵

Kebudayaan sebagaimana diterangkan di atas, dimiliki oleh setiap masyarakat. Perbedaanannya terletak pada kebudayaan masyarakat yang satu lebih sempurna daripada yang lain, di dalam perkembangannya untuk memenuhi segala keperluan masyarakat. Di dalam hubungan di atas, maka biasanya diberikan nama "peradaban" (*civilization*) kepada kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang sudah lebih tinggi.⁶

4 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua puluh dua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

5 Ibid.

6 Lihat a.l. Wallerstein, Dawson, Durkheim dan Mauss, Spengler, dan Huntington.

Sebuah peradaban adalah bentuk budaya yang paling tinggi dari identitas budaya kelompok masyarakat manusia yang dibedakan secara nyata dari makhluk-makhluk lainnya.⁷

3. Hubungan Antar-peradaban

Hubungan antar-peradaban berkembang melalui dua fase (dan kini yang ketiga). Selama lebih dari seribu tahun setelah pertama kali munculnya peradaban-peradaban, hubungan antar-peradaban, dengan beberapa pengecualian, tidak jelas, terbatas, sekaligus intens. Hakikat hubungan ini terekspresikan melalui kata-kata para sejarawan ketika mereka menggambarkan "pertemuan-pertemuan" tersebut. Berbagai peradaban terpisahkan oleh ruang dan waktu. Hanya sedikit peradaban yang memiliki keberadaan dalam suatu masa tertentu, dengan sebuah perbedaan yang signifikan, sebagaimana dinyatakan oleh Benjamin Schwartz dan Shamuel Eisenstadt, antara peradaban-peradaban Abad Pertengahan dan sebelum Abad Pertengahan melalui *tem-tem*, yang mereka akui atau tidak, merupakan sebuah perbedaan antara "tatanan-tatanan yang transendental dan tatanan-tatanan duniawi".⁸

Hubungan-hubungan antar-peradaban yang paling signifikan dan dramatis terjadi ketika orang-orang dari suatu peradaban menundukan dan mengeliminasi atau menyingkirkan orang-orang dari peradaban lain.⁹

Pada abad XII, hubungan antar-peradaban bergerak melalui sebuah fase yang didominasi oleh adanya pengaruh langsung dari satu peradaban yang lainnya secara intens, "terpola", dan adanya interaksi-interaksi multi-direksional antar-peradaban. Masing-masing karakteristik yang mencirikan hubungan-hubungan antar-peradaban dari masa-masa sebelumnya perlahan-lahan hilang.

Pertama, dalam pernyataan-pernyataan yang terkenal dari para sejarawan, "ekspansi Barat" berakhir, dan "perlawanan menentang Barat" dimulai.

7 Samuel P. Huntington, *Op.cit.*, hal. 41.

8 *Ibid.*

9 *Ibid.*

Kedua, sebagai hasil dari perkembangan-perkembangan tersebut, sistem internasional melampaui Barat dan bersifat multisivilisasional.¹⁰

Sebuah sistem internasional muncul, Hedley Bull berpendapat, "ketika dua atau lebih negara memiliki hubungan yang memadai, dan saling mempengaruhi keputusan-keputusan masing-masing yang menyebabkan mereka untuk menyatakan diri -setidak-tidaknya dalam beberapa ukuran tertentu- sebagai bagian dari suatu keseluruhan". Sebuah masyarakat internasional bagaimana pun juga, hanya akan ada jika negara-negara yang berada dalam sistem internasional memiliki "kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan yang sama," "menganggap diri mereka terikat oleh seperangkat aturan yang telah disepakati bersama", "saling bekerja sama melalui lembaga-lembaga yang sama".¹¹

4. Peradaban Universal: Maknanya

Sebagian orang menyatakan bahwa abad ini menjadi saksi lahirnya apa yang disebut oleh V.S. Naipul disebut "peradaban universal". Ide tersebut mengimplikasikan adanya pandangan umum bahwa kehadiran suatu budaya senantiasa tidak dapat lepas dari kemanusiaan dan adanya penerimaan secara umum terhadap nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, orientasi-orientasi perilaku-perilaku dan institusi-institusi oleh umat manusia di seluruh dunia.¹²

Elemen terpenting dari setiap kebudayaan atau peradaban adalah bahasa dan agama. Jika sebuah peradaban universal muncul, akan terdapat kecenderungan munculnya sebuah bahasa dan agama universal.

Sejarah mencatat, penyebaran bahasa merefleksikan penyebaran kekuasaan di dunia. Bahasa-bahasa yang memiliki jumlah pengguna yang paling luas -bahasa Inggris, Mandarin, Spanyol, Perancis, Arab, dan Rusia- adalah negara-negara (bahasa) yang secara aktif mempromosikan bahasa mereka kepada masyarakat-masyarakat (bangsa) lain.

10 Ibid.

11 Lihat Heddy Bull, *The Anarchical Society*, 1977: 9-13; Adam Watson, *Evolution of International Society*, 1992: 30-33.

12 Ibid, hal. 56-57 (Huntington).

Sebuah agama universal memiliki keterkaitan dengan munculnya sebuah bahasa universal. Pada akhir abad XX terjadi kebangkitan agama di seluruh dunia. Kebangkitan tersebut melibatkan intensifikasi kesadaran keagamaan dan menggejalanya gerakan-gerakan fundamentalis.¹³

Tabel: *Persentase Jumlah Pemeluk Agama-Agama Besar Dunia*¹⁴
(Dalam persentase)

Agama \ Tahun	1900	1970	1980	1985 kira-kira	2000 kira-kira
Kristen Barat (katolik dan protestan)	26,9	30,6	30,0	29,7	29,9
Kristen Ortodoks	7,5	3,1	2,8	2,7	2,4
Islam	12,4	15,3	16,5	17,1	19,2
Hindu	12,5	12,8	13,3	13,5	13,7
Budhist	7,8	6,4	6,3	6,2	5,7
Kepercayaan Cina (Chinese Folk)	23,5	5,9	4,5	3,9	2,5
Kesukuan (tribal)	6,6	2,4	2,1	1,9	1,6
Atheis/tidak beragama	0,2	19,6	20,9	21,3	21,5

Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan jumlah pemeluk dua agama besar, Kristen dan Islam, selama 80 tahun. Pemeluk agama Kristen Barat pada tahun 1900-an diperkirakan sebesar 26,9% dari seluruh jumlah penduduk dunia dan menjadi 30% di tahun 1980-an. Jumlah pemeluk agama Islam mengalami kenaikan yang lebih dramatis dari 12,4% di tahun 1900-an menjadi 16,5%, atau menurut perhitungan lain, 18% pada tahun 1980-an. Selama dekade abad XX, Islam maupun Kristen mengalami peningkatan jumlah yang signifikan di Afrika, dan terutama Kristen, di Korea Selatan.

¹³ Ibid, Huntington, 1998, hal. 119-121.

¹⁴ Ibid, Huntington, 1998, Tabel 3.3, hal. 65.

Namun pada tahun 2025, jumlah pemeluk agama Kristen hanya akan mencapai 25% dari jumlah penduduk dunia. Sebaliknya, sebagai hasil kenaikan jumlah penduduk dunia yang luar biasa, jumlah pemeluk agama Islam terus mengalami kenaikan secara dramatis, dan mencapai sekitar 20% dari seluruh penduduk dunia pada peralihan abad XX, yang beberapa tahun kemudian, akan mencapai kurang lebih 30% dari seluruh penduduk dunia pada tahun 2025.¹⁵

B. PERGESERAN PERADABAN

1. Pasang-Surut Kekuasaan Barat

Terdapat *dua gambaran* tentang kekuasaan Barat dalam kaitan dengan peradaban-peradaban lain. *Pertama*, keunggulan dan kemenangan total dominasi Barat. Pecahnya Uni Soviet benar-benar menjadi tantangan bagi Barat. Sebagai hasilnya, dunia menjadi dan akan tergantung pada tujuan-tujuan, prioritas-prioritas, serta kepentingan-kepentingan bangsa-bangsa Barat, dan barangkali Jepang. Sebagai satu-satunya negara *super power*, Amerika Serikat -bersama dengan Inggris dan Perancis- mampu membuat keputusan-keputusan penting dalam kaitan dengan persoalan-persoalan politik dan keamanan; dan -bersama dengan Jerman serta Jepang- dalam persoalan-persoalan ekonomi.

Barat adalah satu-satunya peradaban yang memiliki kepentingan-kepentingan substansial di berbagai peradaban atau wilayah-wilayah lain dengan pengaruhnya yang besar baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun keamanan. Masyarakat-masyarakat non-Barat umumnya memerlukan bantuan Barat dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan-tujuan serta melindungi kepentingan-kepentingan mereka.

Gambaran *Kedua* tentang Barat, sungguh sangat berbeda. Ia adalah sebuah peradaban yang sedang mengalami kemerosotan, baik di dalam bidang politik, ekonomi, maupun militer, dibanding peradaban-peradaban lain. Kemenangan Barat dalam Perang Dingin telah melahirkan kejayaan, namun menguras banyak energi. Barat kini harus lebih banyak memusatkan perhatian pada persoalan-persoalan dan kebutuhan-kebutuhan internal,

15 Ibid, hal. 65-66; *World Christian Encyclopedia*, Oxford University Press, 1982.

karena dihadapkan pada pertumbuhan ekonomi yang lamban, populasi yang stagnan, pengangguran, defisit negara yang sangat besar, kemerosotan etika kerja, tingkat pendapatan rata-rata masyarakat yang rendah, dan dalam berbagai wilayah, termasuk Amerika Serikat, terjadi disintegrasikan sosial, meningkatnya jumlah penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan berbagai bentuk kejahatan. Kekuatan ekonomi dengan cepat bergeser ke Asia Timur, demikian pula dengan kekuatan-kekuatan militer dan politik yang akan segera menyusul. Kesediaan masyarakat-masyarakat non-Barat untuk menerima arahan atau kebijakan-kebijakan Barat segera memudar dengan cepat, seiring dengan mudarnya kepercayaan-diri serta keinginan Barat untuk melakukan dominasi.¹⁶

2. Kebangkitan Islam dalam Perspektif Huntington

Gambaran penting dua dekade terakhir adalah kebangkitan Islam. Satu faktor penting yang mendasari timbulnya kebangkitan itu adalah perasaan kebersamaan yang intens dan luas di antara kaum muslimin umumnya yang tidak ingin kehilangan identitas Islam.¹⁷

Ketika negara-negara Asia, karena kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi, semakin yakin pada kemampuan sendiri, umat Islam menegaskan bahwa ajaran Islam merupakan satu-satunya sumber identitas, makna stabilitas, legitimasi, kemajuan, kekuatan dan harapan yang dinyatakan melalui slogan "Islam adalah jalan keluar" (Islam is our best solution). Kebangkitan Islam ini, dalam makna yang paling dalam dan paling luas, merupakan fase akhir dari hubungan antara Islam dengan Barat; sebuah upaya untuk menemukan "jalan keluar" yang tidak lagi melalui ideologi-ideologi Barat, tapi di dalam Islam. Ia merupakan perwujudan dari penerimaan terhadap modernitas, penolakan terhadap kebudayaan Barat, dan re-komitmen terhadap Islam sebagai petunjuk hidup dalam dunia modern. Kebangkitan Islam merupakan pengejawantahan usaha-usaha yang dilakukan oleh umat Islam untuk mencapai tujuan ini. Ia adalah sebuah

¹⁶ Ibid, Huntington, 1998, hal. 82-83 dan 301.

¹⁷ William Montgomery Watt, *Titik Temu Islam-Kristen; Persepsi dan Salah Persepsi*, Cetakan Pertama, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.

bentuk luas dari gerakan intelektual, kultural, sosial, dan politis yang menyebar di seluruh dunia Islam.

“Fundamentalisme” Islam umumnya diidentikan dengan gerakan politik Islam, padahal ia hanyalah salah satu komponen dari kebangkitan Islam yang lebih luas. Kebangkitan tersebut mencakup ide-ide, praktik-praktik, retorika, dan “pengembalian” ajaran Islam yang dilakukan oleh umat Islam.

Jumlah penduduk usia muda yang berpendidikan menengah akan menjadi kekuatan penting bagi Kebangkitan Islam dan berpengaruh terhadap munculnya militansi, militerisme Muslim, dan migrasi. Sebagai hasilnya, tahun-tahun pertama abad XXI, lahirlah kebangkitan kekuatan dan kebudayaan non-Barat. Itulah yang menjadi sebab terjadinya benturan antara peradaban-peradaban non-Barat dengan peradaban-peradaban Barat, bahkan benturan antara masing-masing peradaban.¹⁸

Namun perlu diketahui, apa yang telah disebutkan oleh Huntington mengenai “benturan peradaban” ini, yang juga menjadi topik utama dalam tesisnya itu, telah banyak mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Di antaranya adalah seorang intelektual Islam, DR. Yusuf Qardhawiy, dalam bukunya *Umat Islam Menyongsong Abad ke-21*, mengatakan, “pemikiran Huntington dibangun di atas prinsip bahwa sejarah belum berakhir, konflik belum usai, dan *file* sejarah belum dikunci, dengan runtuhnya Uni Soviet sekalian lenyapnya bahaya komunisme. Masih ada sebuah anak panah dalam busur sejarah yang belum dilemparkan. Konflik masih terus berlangsung, faktor-faktor penyebab terus saja ada, namun ia bukan lagi persoalan ideologi yang beragam seperti komunisme yang diktatoris dan kapitalisme yang liberalis. Bukan pula disebabkan faktor kepentingan ekonomi yang bertabrakan antara berbagai negara di dunia.

Namun, konflik yang terjadi di masa depan ini faktor penyebabnya adalah masalah peradaban atau kebudayaan. Usaha setiap peradaban untuk mengokohkan eksistensinya dan menancapkan pandangannya tentang manusia, kosmos, agama, kehidupan, dan sejarah itulah yang melahirkan konflik.

18 Samuel P. Huntington, *Op.cit.*, 46-51.

Huntington menjelaskan bahwa di dunia ini terdapat 7 atau 8 peradaban. Inilah yang akan saling berperang di masa depan, yaitu peradaban Barat, peradaban Konfusius, peradaban Jepang, peradaban Islam, peradaban India, peradaban Kristen Ortodoks, peradaban Amerika Latin, atau bisa jadi peradaban Afrika.

Perang di masa depan, menurutnya -setelah keruntuhan negeri komunis yaitu Uni Soviet- bahwa bentuknya adalah perang antar-peradaban yang berlawanan, khususnya ketujuh peradaban di atas.

Namun tidak ada suatu standar yang jelas yang dipakai Huntington untuk mengklasifikasikan peradaban sebagaimana tersebut di atas. Sebagian peradaban hanya didasarkan pada fenomena, yaitu peradaban Barat. Sebagian lain didasarkan pada pertimbangan wilayah, antara lain peradaban India, Jepang, dan Amerika Latin, meskipun dimasukkan juga unsur lain, yaitu pada unsur Latin.

Sebagian lagi didasarkan pada unsur agama, yaitu peradaban Islam dan Kristen Ortodoks, meskipun ia memasukkan unsur etnis bersama agama.

Yang lain dilandaskan pada faktor filsafat, yaitu peradaban Konfusianisme (yang dibangun oleh seorang filosof Cina bernama Konfusius).

DR. Yusuf Qardhawy merasakan bahwa unsur agama disembunyikan oleh Huntington dalam klasifikasi ini. Huntington enggan menyebutkan secara lugas, kecuali hanya pada dua peradaban, yakni Islam dan Kristen Ortodoks.

Kenyataannya, agama merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi pembentukan peradaban atau kebudayaan. Ini diakui Huntington sendiri, ketika ia menyebutkan komponen kebudayaan, yang terdiri dari bahasa, sejarah, tradisi, dan seterusnya. Ia kemudian mengatakan bahwa komponen terpenting dalam pembentukan peradaban adalah agama. Dengan demikian, ia menyingkap sendiri sesuatu yang ia pendam di dadanya, yakni anggapan bahwa agama berada di belakang konflik yang mengancam ini, bahkan menurutnya suatu keniscayaan.

Dalam hal ini, Huntington sepakat dengan beberapa pemikir Barat yang berpandangan bahwa agama merupakan inti dari kebudayaan, dan kebudayaan berbeda-beda secara prinsip, seiring dengan perbedaan agama.

Di antara hal yang patut dipuji dari Huntington, ia mengakui bahwa di dunia ini terdapat beragam peradaban, di mana satu dengan yang lain memiliki karakteristik yang khas. Ini persoalan penting. Ia membantah sebagian orang yang menganggap bahwa sekarang ini hanya ada satu peradaban atau satu kebudayaan, yaitu kebudayaan Barat atau peradaban Barat, dengan asumsi bahwa kebudayaan adalah peradaban, atau bahwa ia adalah inti peradaban".¹⁹

3. Benturan Peradaban, Benturan Kepentingan, atau Benturan Agama? ²⁰

Banyak kalangan yang menentang Huntington, tentang teori konflik peradabannya, dengan mengatakan bahwa motivasi sebenarnya yang ada di balik peperangan adalah kepentingan negara besar dan ambisi para pemimpin, bukan konflik peradaban.

Ini dikemukakan oleh DR. Bicco, ketika berdiskusi tentang peradaban di PBB melalui wawancaranya di saluran TV Al-Jazirah, Qatar. DR. Abid al-Jabiri juga mengemukakan hal yang sama dalam komentarnya atas Huntington dan bukunya, *Problematika dalam Pemikiran Modern*. Ia menulis berikut ini:

"Jika saja penulis memikirkan masalah-masalah kontemporer untuk benar-benar memahaminya dan mencari solusi yang memihak kepentingan kemanusiaan secara umum, dengan asumsi bahwa ia yakin betul terhadap tesis *Konflik Peradaban* ini sebagai sesuatu yang mengancam keamanan dunia internasional di masa depan, maka seharusnya si penulis mengakhiri uraiannya dengan mengajak semua pihak, semua negara dan bangsa, untuk menyadari bahaya ini, kemudian meminta dan menyarankan mereka untuk membuat langkah-langkah pasti yang bisa menjamin sirnanya bahaya ini. Alih-alih demikian, penulis justru menempuh jalan yang lain, yang sangat berlawanan. Sejak awal, ia bermain dengan asumsi-asumsi, tidak sekedar asumsi akan hadirnya suatu kejadian tertentu, namun asumsi yang dianggap sebagai kemestian

19 Yusuf Qardhawy, *Umat Islam Menyongsong Abad Ke-21*, Cetakan Pertama, Penerbit Era Intermedia, 2001.

20 Ibid.

sejarah, yang telah mengendalikan rodanya di masa lalu dan akan mengendalikannya di masa datang. Demikianlah, ia merekonstruksi sejarah seluruhnya dengan gambaran yang melahirkan konflik peradaban itu, di masa lalu maupun di masa kini, sambil berusaha untuk mengumpulkan sampel data-data yang mendukung “kenyataan sejarah” yang ia klaim ini. Ia memilih sampel dari sana-sini, kemudian menafsirkannya dengan sesuatu yang jauh dari bingkainya, lalu yang justru menjauhkan dari bingkainya, lalu membungkusnya dengan berbagai argumen yang tidak relevan. Lalu ia ulang-ulang sampel itu berkali-kali, melompat-lompat dan memutarbalikannya. Senjata logika untuk semua itu adalah paralogisme “pemutarbalikan logika” atau “pemutarbalikan argumentasi”, namun dengan ungkapan yang logis.”

“Tujuan dari semua itu adalah menciptakan ketakutan dan kekhawatiran. Bersamaan dengan itu, memformat pembaca untuk menerima produk tesisnya dan menanggung segala akibatnya, seolah-olah itu adalah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Ada pun konklusi yang bisa ditarik dari tulisan itu adalah: keharusan Barat untuk terus mengembangkan kekuatan militernya, lalu keharusan untuk mengalokasikan dana yang semestinya di jalan itu.”

Bila kita melihat pada tesis Huntington ini, sebenarnya ia sudah begitu transparan menyebutkan bahwa di balik konflik antar-peradaban ini, yakni antara Barat dan Islam, adalah konflik agama. Ini bisa dilihat pada Bab 9, dengan judul *Politik Global Peradaban*, ia menyebutkan beberapa konflik ini, di antaranya:

- Term *la guerra fria* merupakan istilah yang digunakan oleh orang-orang Spanyol abad XIII untuk melukiskan “hubungan yang tidak menyenangkan” antara mereka dengan umat Islam Mediterranean, dan pada tahun 1990-an, sebagian orang melihatnya sebagai “perang dingin peradaban” yang kemudian kembali terulang dalam hubungan antara Barat dengan Islam.
- Konflik antar-peradaban mengambil dua bentuk. Pada tingkatan lokal atau mikro, garis persinggungan konflik terjadi di antara negara-negara tetangga yang memiliki perbedaan peradaban, antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam satu negara, dan antara

kelompok-kelompok, sebagaimana halnya yang terjadi di negara-negara bekas Uni Soviet dan Yugoslavia, sedang berusaha mendirikan negara-negara baru di balik "puing-puing" negara terdahulu. Garis persinggungan konflik utamanya membentang antara masyarakat-masyarakat Muslim dan non-Muslim.

Islam adalah satu-satunya peradaban yang mampu membuat Barat selalu berada dalam keraguan antara hidup dan mati, dan ia telah melakukannya, setidaknya dua kali (Ketika Turki Utsmani melemahkan kekuatan Byzantium dan kemudian menaklukkan sebagian besar wilayah Balkan serta Afrika Utara, serta mengepung Konstantinopel pada tahun 1453, kemudian pada tahun 1529 menyerbu Wina).

- Bahwa 50% dari seluruh peperangan yang terjadi di pelbagai negara antara tahun 1820 sampai dengan 1929 merupakan perang agama antara umat Islam dengan Kristen.
- Konflik, di satu pihak disebabkan adanya perbedaan kondes Islam, terutama yang menyangkut pandangan hidup, mentransendensikan dan menyatukan antara agama dengan politik *versus* konsep Kristen yang memisahkan antara Tuhan dengan Kaisar.
- Tingkatan konflik antara Islam dengan Kristen senantiasa dipengaruhi oleh siklus pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, perubahan teknologikal, dan intensitas komitmen keagamaan.
- Ada lima faktor yang menjadi sebab terjadinya konflik antara Islam dengan Barat (baca: Kristen) pada akhir abad XX.
- Selama Islam tetap sebagai Islam (dan akan tetap demikian), Barat tetap Barat (yang tampaknya tidak dapat dipastikan), konflik fundamental antara dua peradaban besar dan dua *way of life* ini akan terus terjadi di masa yang akan datang sebagaimana ia pernah terjadi empatbelas abad yang lalu.
- Selama limabelas tahun, antara tahun 1980-1995, menurut Departemen Keamanan AS., Amerika Serikat telah melakukan tujuh-

belas operasi militer di Timur Tengah, seluruhnya diarahkan untuk menyerang Islam. Tidak pernah dilakukan bentuk-bentuk operasi militer AS yang demikian itu terhadap peradaban-peradaban lain.

- Bagi Barat, yang menjadi “ganjalan” utama bukanlah fundamentalisme Islam, tetapi Islam itu sendiri, sebuah peradaban yang masyarakatnya berbeda dengan kebudayaan mereka yang diyakini memiliki keunggulan dan terobsesi dengan inferioritas kekuatan mereka.

4. Hubungan Antara Islam dan Kristen dalam Perspektif DR. Yusuf Qardhawy

DR. Yusuf Qardhawy dalam bukunya memiliki sebuah pandangan bagaimana seharusnya hubungan antara Islam dengan Kristen:

Kita harus mencegah orang-orang yang berlebihan dan menyulut api fitnah dari kedua kubu, muslim (pemeluk agama Islam) dan non-muslim (non-Islam), yang bodoh lagi tidak mengerti apa yang mereka lakukan, dan orang-orang fanatik yang telah dibutakan dan dibisukkan oleh fanatismenya sehingga tidak melihat dan tidak mendengar.

Di samping itu, kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada orang-orang yang menyiramkan Minyak ke bara api dari luar negeri, dengan mengaku ingin melindungi minoritas dari tekanan agama. Mereka senang membesar-besarkan masalah, biji dibilang buah, tikus dibilang unta. Jika tidak menemukan biji atau tikus yang akan dibesar-besarkannya, mereka merekayasa hal-hal yang fiktif sebagai alasan untuk mencampuri urusan dan masa depan kita, sebagaimana yang mereka lakukan di Mesir, Sudan, dan sebagainya.

Dengan tegas para intelektual dan tokoh-tokoh Kristen yang bijak menolak intervensi asing ini. Mereka berpendapat bahwa tidak ada yang akan melindungi mereka selain toleransi Islam, syariat Islam, kerjasama dan sikap saling pengertian antar berbagai elemen bangsa untuk tidak menerima campur tangan asing yang hanya akan mengeruhkan suasana, memperburuk hubungan, memutus jalinan cinta kasih.

Tokoh-tokoh Islam dan Kristen harus menyadarkan semua pihak bahwa sektarianisme tidak ada hubungannya dengan sikap beragama sedikit pun. Sikap beragama berdiri di atas cinta kasih, sementara sektarianisme

berdiri di atas kebencian. Sikap beragama yang benar adalah toleransi terhadap perbedaan, sementara sektarianisme adalah fanatisme melawan pihak lain. Sikap beragama bersifat konstruktif, sementara sektarianisme bersifat destruktif. Sikap beragama menghidupkan, sementara sektarianisme bersifat membinasakan.²¹

5. Perbedaan Konflik Peradaban dan Konflik Budaya

Telah disebutkan di atas, bahwa peradaban itu bersifat lebih luas daripada budaya. Seperti yang ditelaah dikatakan oleh Yusuf Qardhawy ketika memberikan komentarnya tentang pemikiran Huntington atas pembagian 7 atau 8 peradaban.²² Lebih luasnya konflik peradaban ini bisa dilihat dari segi banyaknya pihak yang terlibat dalam konflik. Misalnya ketika Perang Salib, atau Konflik Balkan yang melibatkan banyak pihak, yang bermotivasi kesamaan agama -karena solidaritas sesama penganut agama yang sama, dan lain-lain.

Sedangkan konflik budaya sifatnya lebih sempit/terbatas, ditinjau dari segi jumlah pihak yang terlibat konflik, serta hal yang menyebabkan konflik terjadi (motivasi konflik). Misalnya konflik di Sampit, yang hanya melibatkan antara warga pendatang (Mandura) dan suku Dayak. Faktornya hanya fanatisme suku, adat-istiadat, atau karena perebutan lahan mata pencaharian (faktor ekonomi), di mana itu semua merupakan bagian dari budaya.

Tetapi konflik atau benturan kebudayaan ini bisa saja tanpa melibatkan atau menggunakan senjata, yakni di mana suatu masyarakat tetap memegang teguh kebudayaan internal, dan menolak kebudayaan yang datang dari luar, yang kian terus "menggempur", yang bilamana masyarakat itu tidak mempertahankan kebudayaannya aslinya, niscaya akan terkikis, dan lama-kelamaan akan menghilang kemudian masyarakat tersebut akan terwanai oleh kebudayaan yang datang dari luar. Misalnya budaya barat dengan budaya timur (non-barat), di mana masyarakat ini (non-barat) tetap mempertahankan eksistensi kebudayaannya dan menolak akan terjadinya akulturasi dengan

²¹ Ibid

²² 8 peradaban (major contemporary civilization) menurut S. P. Huntington adalah: 1). Sinic (Cina), 2). Jepang, 3). Hindu, 4). Islam, 5). Ortodox, 6). Barat (Western), 7). Amerika Latin, dan 8) Afrika (African). yang ke-8 disebutnya mungkin (probably).

kebudayaan barat yang dianggap negatif.

Bukan berarti menolak adanya *modernisasi*, tetapi mereka (masyarakat timur) menolak adanya *westernisasi*.

C. ETHNIC CONFLICT (KONFLIK ETNIS)

1. Pengertian Konflik, Etnik, Ras, dan Rasialisme

Pengertian konflik menurut A.. Dahlan Nasution dalam bukunya *Politik Internasional, Konsep dan Teori*, adalah persaingan, apakah lugas, semu, atau berupa sesuatu yang bersifat potensi, adalah suatu hal yang normal dalam hubungan antar negara yang bermula dari perkembangan sistem negara kebangsaan.²³ Menurut Donald H. Weiss dalam bukunya *Menyelesaikan Konflik Secara Bijaksana*, bahwa konflik biasanya meletus karena ketidaksepakatan, tidak terbuka, tidak bersahabat, atau tidak kooperatif. Konflik melibatkan ketidaksepakatan tentang apa yang benar, baik, atau indah, tetapi berbeda dengan ketidaksepakatan yang sederhana dalam hal setidaknya satu orang percaya, benar, atau keliru, bahwa haknya untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya telah disangkal. Apa yang mungkin dimulai sebagai sebuah ketidaksepakatan sederhana berubah menjadi "kata-kata perang".²⁴

Dan yang dimaksud dengan *etnik* adalah yang berkenaan dengan kelompok sosial yang mempunyai kedudukan tertentu dipandang dari keturunan, adat, bahasa, agama, dan sebagainya.²⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan *ras* adalah golongan orang, yang jelas sekali memiliki ciri-ciri lahiriah yang sama atau sangat mirip, yang membedakannya dari golongan lain, misal warna kulit, postur tubuh, bentuk muka, rambut, dan sebagainya. *Rasialisme* adalah rasa emosional atas keunggulan dan kesempurnaan ras sendiri yang berdasarkan pra-anggapan, bahwa ras lain jauh lebih rendah. Rasialisme ini tidak berdasarkan ilmu, berlawanan dengan norma-norma etis, perikemanusiaan, dan hak-hak asasi.²⁶

23 T. May Rudy, *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2002.

24 Donald H. Weiss, *Menyelesaikan Konflik Secara Bijaksana*, Penerbit Binarupa Akasara, 1994.

25 Arman YS. Chaniago, *Kamus Bahasa Indonesia*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 1997.

26 B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

2. Cara Penyelesaian Konflik

Holsti mengungkapkan cara penyelesaian konflik ke dalam enam bagian, yaitu:

1. Melakukan penarikan tuntutan.

Penyelesaiannya adalah salah satu atau kedua belah pihak menahan diri untuk tidak melakukan tindakan fisik atau mendesak perundingan memenuhi tuntutan, atau menghentikan tindakan yang pada dasarnya akan menyebabkan tindakan balasan yang bermusuhan. Intinya bahwa salah satu pihak mengakhiri klaim/tuntutan dan pihak lain menerima.

2. Penaklukan

Akhir penaklukan dengan kekerasan tetap mencakup berbagai persetujuan dan perundingan di antara negara yang bermusuhan.

3. Tunduk atau membentuk *Deterrence* (Penangkalan).

Kriteria yang dipakai untuk membedakan kepatuhan atau penangkalan dari penaklukan ialah ada atau tidak adanya implementasi ancaman untuk memakai kekerasan. Meski pun tidak terjadi kekerasan, perlu diketahui bahwa sikap tunduk merupakan akibat dari penerapan ancaman militer sebagai bentuk penyelesaian konflik dengan cara tidak damai. Pihak yang melakukan penangkalan atau penundukan akan menunjukkan kepada pihak lain bahwa kemungkinan resiko untuk melanjutkan tindakan atau mempertahankan tuntutan akan lebih besar dibanding melakukan kembali tuntutannya dan menghentikan sama sekali tindakannya.

4. Kompromi

Kompromi adalah penyelesaian konflik atau krisis internasional yang menuntut pengorbanan dari posisi yang telah diraih oleh pihak yang bersengketa. Masalah utama dalam mencapai kompromi adalah bagaimana meyakinkan pihak yang bersengketa untuk menyadari bahwa resiko untuk tetap mempertahankan atau melanjutkan konflik di antara mereka jauh lebih besar dibanding resiko untuk melakukan penurunan tuntutan atau menarik mundur posisi militer dan diplomatik.

5. Penyelesaian melalui pihak ketiga.

Akibat yang agak rumit dari penyelesaian konflik atau krisis internasional berdasarkan kompromi ialah penyelesaian melalui pihak ketiga. Bentuk penyelesaian seperti ini mencakup penyerahan persetujuan dan itikad untuk menyelesaikan masalah berdasarkan berbagai kriteria keadilan.

6. Penyelesaian secara damai.

Penyelesaian melalui cara-cara damai (perundingan, konsiliasi, dan lain-lain) sehingga masing-masing pihak yang bersengketa secara perlahan dapat menerima keadaan posisi yang baru.²⁷

Dalam strategi penyelesaian konflik, masalah sokongan dari negara-negara lain serta pengakuan internasional cukup berperan.²⁸

Negara-negara baru bermunculan akibat perpecahan yang terjadi dengan negara induknya dan juga lenyapnya negara lain karena bersatu dengan yang lainnya (integrasi). Ada pula pergantian pemerintah secara inkonstitusional. Timbulnya suatu negara yang baru akibat pemisahan diri dengan negara induknya, tidak dengan begitu saja menjadi anggota masyarakat internasional. Mereka harus mendapat pengakuan dari negara-negara lain agar diterima sebagai komunitas masyarakat internasional.²⁹

Pengakuan itu bisa berupa:³⁰

a. Pengakuan tidak langsung.

Pengakuan tidak langsung atau diam-diam melebihi masalah kehendak negara yang dinyatakan dalam pemberian pengakuan. Kehendak tersebut diungkapkan hanya apabila keadaan-keadaan secara tegas mengindikasikan kemauan untuk menjalin hubungan resmi dengan baru atau pemerintah baru.

27 T. May Rudy, *Op.cit.*

28 *Ibid.*

29 Lihat: T. May Rudy, *Hukum Internasional I*, Refika Aditama, Bandung, 2002.

30 *Ibid.*

b. Pengakuan bersyarat.

Negara-negara diakui secara bersyarat, berupa suatu kewajiban yang harus dipenuhi negara tersebut.

c. Pengakuan Kolektif.

Pengakuan diberikan secara terpisah antara pengakuan kepada suatu negara dan pengakuan terhadap kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara baru tersebut. Dalam praktek sebagian negara digambarkan adanya perbedaan antara pengakuan *de jure* dan *de facto*. Pengakuan *de jure* berarti menurut negara yang mengakui, negara mau pemerintah yang diakui secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat internasional. Pengakuan *de facto* berarti menurut negara yang mengakui, untuk sementara dan secara temporer serta dengan segala reservasi yang layak di masa mendatang, bahwa negara atau pemerintah yang diakui telah memenuhi syarat berdasarkan fakta (*de facto*), (Starke, 1992: 186-187).

*Sumber-sumber Konflik Kontemporer*³¹

Tingkat	Contoh
Global	Transisi geopolitik, pembagian Utara-Selatan
Regional Negara	Pola patron, demografi sosial lintas perbatasan
Sosial	Masyarakat yang lemah, pembagian budaya, ketidakseimbangan etnis
Ekonomi	Ekonomi yang lemah; sumber alam yang miskin, kerugian relatif
Politik	Pemerintah yang lemah; pemerintah partisan, rezim yang tidak mempunyai legitimasi
Kelompok Konflik	Mobilisasi konflik, dinamika antar-kelompok
Elit/Individual	Kebijakan kelompok eksklusionis, kepentingan faksional, kepemimpinan yang serakah

*Negara-negara yang Terlibat Konflik Antara Tahun 1995-1997*³²

Lokasi	Insepsi	Pelaku Konflik Utama	Kematian
Afganistan	1978	Rabbani vs. Hekmatyar Taleban vs. Dostum, Masood	> 1-2 juta
Albania	1997	Pemerintah Albania vs. Pemberontak	> 1.500
Algeria	1992	Pemerintah Algeria vs. FIS, GIA, dsb. (Islam)	> 60.000
Angola	1975 /1992	Pemerintah Angola vs. UNITA	> 500.000
Azerbaijan	1988	Pemerintah Azerbaijan vs. Armenia (Nagorno - Karabakh)	> 50.000
Bangladesh	1973	Pemerintah Bangladesh vs. SB. (Chittagong)	> 3.000

31 Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Cetakan Pertama, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

32 Ibid.

Bosnia - Herzegovina	1992	Pemerintah Bosnia-Herzegovina vs. orang-orang Bosnia-Kroasia, vs. orang-orang Serbia-Bosnia (FRY)	> 100.000
Burundi	1993	Pemerintah Burundi vs. milisi Hutu, dsb.	> 100.000
Kamboja	1975	Pemerintah Kamboja vs. PDK (Khmer Merah)	> 2 juta
Chad	1966	Pemerintah Chad vs. CSNPD, MDD	> 100.000
Kolumbia	1978	Pemerintah Kolumbia vs. FARC, ELN, EPL, (Para Baron KoCain)	> 30.000
Kroasia	1991	Pemerintah Kroatia vs. orang-orang Serbia-Kroasia (FRY)	> 10.000
Siprus	1964	Pengawal Nasional Siprus vs. Tentara Turki dan Turki Siprus	> 5.000
Mesir	1992	Pemerintah Mesir vs. Jama'ah Islamiyyah	> 1.000
Georgia	1991	Pemerintah Georgia vs. pemberontak Abkhazian dan pemb. Ossetian Selatan	> 17.000
Guatemala	1968	Pemerintah Guatemala vs. URNG	> 45.000
India		Pemerintah India vs.	
	1979	ULFA (Assam)	> 5.000
	1981	KLF/KCF (Sikh)	> 20.000
	1989	JKLF dsb. (Kashmir)	> 15.000
	1992	BdSF (Bodo)	> 1.000
Indonesia		Pemerintah Indonesia vs.	
	1975	Fretilin (Timor Timur)	> 100.000
	1984	OPM (Irian Jaya)	> 10.000
Irak	1980	Pemerintah Irak vs. KDP, PUR (Kurdi), Shi'a., Sairi, dsb.	> 500.000
Iran	1979	Pemerintah Iran vs. Mujahidin E Khalq, KDPI (Kurdi)	> 5.000
Israel	1948	Pemerintah Israel vs. PLO, Hamas, Hizbullah, Jihad Islam, PFLP	> 13.000
Kenya	1992	Pem. Kenya vs. perlawanan suku-suku	> 1.500
Libanon	1976	Pemerintah Libanon vs. Hizbullah, SLA	> 15.000

Liberia	1989	Pemerintah Liberia/ECOWAS vs. NPFL, faksi Krahn, dsb.	> 200.000
Meksiko	1994	Pemerintah Meksiko vs. EZLN, EPR	> 1.000
Moldova	1992	Pemerintah Moldova vs. pemberontak Trans-Dniestr	> 1.000
Myanmar	1948	Pemerintah Myanmar vs. KNU (Karen) dsb.	> 14.000
Pakistan	1986	Pemerintah Pakistan vs. MQM	> 1.500
Papua Nugini	1989	Pemerintah Papua Nugini vs. BRA	> 15.000
Peru	1980	Pemerintah vs. Sendero Luminoso MRTA (Tupac Amaru)	> 28.000
Filipina	1968	Pemerintah Filipina vs. NPA, MNLF, MILF	> 30.000
Rusia	1991	Pemerintah Rusia vs. pejuang Chechen, (Chechnya)	> 20.000
Rwanda	1990	Pemerintah Rwanda vs. Pasukan berani mati Hutu	> 800.000
Sierra Leone	1989	Pemerintah Sierra Leone vs. (hasil eksekutif), RUF	> 20.000
Somalia	1991	USC (Mahdi) vs. USC (Aidid)	> 400.000
Afrika Selatan	1996	ANC vs. IFP	> 15.000
Sri Lanka	1983	Pemerintah Sri Lanka vs. LTTE (Tamil)	> 35.000
Sudan	1983	Pemerintah Sudan vs. SPLA, NDA	> 1,5 juta
Tajikistan	1992	Pemerintah Tajikistan/CIS vs. UTO	> 30.000
Turki	1983	Pemerintah Turki vs. PKK (Kurdi)	> 20.000
Uganda	1994	Pemerintah Uganda vs. LRA	> 1.000
Inggris	1969	Pemerintah Inggris vs. IRA	> 3.000
Sahara Barat	1973	Pemerintah Maroko vs. Polisario	> 15.000
Zaire	1993	Pemerintah Zaire vs. ADFCLS	> 20.000

3. Contoh-contoh Konflik Etnis yang Terjadi di Berbagai Belahan Dunia

a. Antara Chechnya dengan Pemerintah Federasi Rusia.

Bermula dari adanya pertikaian yang terjadi antara masyarakat Ortodoks Ossetian dan kaum Muslim Ingush pada tahun 1992-1993. Yang terakhir bergabung dengan bangsa Chechen dan kaum Muslim lainnya yang dideportasi ke Asia Tengah selama masa Perang Dunia II. Masyarakat Ossetia mengambil-alih kekayaan bangsa Ingush. Pada tahun 1956-1957, mereka diizinkan kembali dan mengambil alih kekayaan mereka serta diberi otoritas untuk mengatur wilayah masing-masing. Pada November 1992, bangsa Ingush menyerbu bekas wilayah republik mereka dan mendapatkan kembali wilayah Prigodny, yang menurut pemerintah Rusia, termasuk dalam wilayah kekuasaan bangsa Ossetian. Rusia pun akhirnya melakukan intervensi besar-besaran dan mengerahkan kesatuan-kesatuan Cossacks-nya untuk membantu masyarakat Ortodoks Ossetian. Salah seorang pengamat menggambarkan: "Pada bulan November 1992, perkampungan-perkampungan masyarakat Ingush di Ossetia dikelilingi dan dilindungi oleh tank-tank Rusia. Mereka yang selamat dari pengeboman dibunuh dan dibuang. Pembunuhan besar-besaran dilakukan oleh kesatuan khusus polisi Ossetian, OMON, dan pasukan Rusia yang dikirim ke wilayah itu untuk 'menjaga perdamaian' dan memberikan perlindungan". *The Economist* melaporkan, "sulit untuk memahami begitu banyak kerusakan yang terjadi selama kurang dari satu minggu." Inilah "pembersihan etnis yang pertama kali terjadi di wilayah Federasi Rusia."³³ Dan konflik antara pejuang muslim Chechnya dengan pemerintah Rusia masih berlanjut hingga sekarang. Chechnya menuntut lepas dari pemerintah Federasi Rusia menjadi sebuah negara yang merdeka.

2. Antara Bosnia dengan Serbia-Kroasia

Pecahnya Yugoslavia dimulai pada tahun 1991 ketika Slovenia dan Kroasia, dengan meminta dukungan dari negara-negara Eropa Barat berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Jerman pun memberi respons, dan

³³ *The Economist*, February, 1993.

respon tersebut sebagian besar disebabkan oleh karena sama-sama sebagai penganut Katolik. Pemerintah Bonn melakukan hal itu karena mendapat tekanan dari hierarki Katolik Jerman, mitra koalisinya Partai Persatuan Masyarakat Kristen, Bavaria, dan *Frankfurter Allgemeine Zeitung* dan media (massa) lainnya. Jerman memberikan pengakuannya pada Desember 1991, sebelum Uni Eropa melakukannya.

Austria dan Italia segera memberikan pengakuan terhadap kedua negara baru tersebut dan hal itu diikuti oleh negara-negara Barat lainnya, termasuk Amerika Serikat.

Setelah memperoleh pengakuan dari Barat atas kemerdekaannya, Kroasia mengembangkan kekuatan militernya, sekali pun PBB menjatuhkan embargonya terhadap seluruh republik bekas Yugoslavia pada September 1991. Bantuan persenjataan mengalir dari negara-negara Barat seperti Jerman, Polandia, dan Hongaria, begitu pula datang dari negara-negara Amerika Latin, seperti Panama, Chili, dan Bolivia. Spanyol pun turut mengeksport persenjataannya yang sebagian besar dikontrol oleh Opus Dei.

Dukungan Barat terhadap Kroasia tersebut pada akhirnya memicu terjadinya pembersihan etnis dan pelanggaran hak asasi manusia serta hukum perang yang dilakukan oleh Serbia. Pada tahun 1995, Kroasia melakukan serangan besar-besaran terhadap orang-orang Serbia di Krajina.

Pada tahun 1994, Amerika Serikat memberikan dukungan kepada pasukan Kroasia, dengan tidak mempedulikan embargo PBB terhadap Kroasia, berupa latihan militer dan pengiriman jenderal-jenderal sebagai penasihat militer mereka.

Dukungan terhadap Serbia datang dari kalangan Ortodoks, nasionalis Rusia, para pejabat militer, kalangan parlemen, dan para pemimpin Gereja Ortodoks, juga para sukarelawan Rumania dan Yunani, yang mendaftarkan diri sebagai anggota pasukan Serbia.

Rusia dalam memberikan dukungan terhadap Serbia dengan berbagai cara. Antara lain memanfaatkan posisinya baik di PBB maupun di luar PBB. Pada 1994, Rusia memveto resolusi Dewan Keamanan PBB, yang diajukan oleh negara-negara Muslim, melarang pengiriman bantuan dari Serbia ke Bosnia untuk warga Kroasia dan Serbia.

Begitu pula dukungan terhadap Bosnia berdatangan dari negara-negara Muslim, seperti Arab Saudi, Iran, Turki, Pakistan, Algeria, Mesir dan Sudan. Secara individual maupun kolektif, negara-negara Islam berulang kali menunjukkan solidaritas mereka terhadap saudara-saudara mereka seagama, Bosnia. Iran, pada tahun 1992, menyatakan bahwa pembasmian etnis yang dilakukan oleh warga Kristen Serbia terhadap Muslim Bosnia merupakan konflik agama.

Bantuan militer berdatangan ke Bosnia yang kebanyakan melalui Kroasia. Sebagai imbalannya, Kroasia memperoleh sepertiga bagian dari seluruh persenjataan yang dikirim, namun dengan maksud supaya dapat menghadapi kekuatan Bosnia di masa yang akan datang, melarang tank-tank dan artileri berat melintasi wilayah mereka.

Pada masa musim dingin tahun 1994, dengan kekuatan militernya, Bosnia berani menerjunkan diri dalam pertempuran dan berhasil mengalahkan pasukan koalisi Kroasi, dan pada musim semi kembali terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Serbia serta mampu mengalahkan mereka.

Perang di Bosnia adalah perang peradaban. Tiga negara yang memainkan peran primer berasal dari berbagai peradaban dan agama yang berbeda. Negara-negara dan organisasi-organisasi Islam berada di belakang umat Islam Bosnia dan memposisikan diri sebagai "lawan" dari Kroasia dan Serbia. Negara-negara dan organisasi-organisasi Kristen Ortodoks berdiri di belakang Serbia dan memposisikan diri sebagai "lawan" dari warga Kroasia dan Muslim. Namun pada umumnya, mereka (Serbia dan Kroasia) tidak berbeda pandangan terhadap Muslim Bosnia. Serbia yang memimpikan menjadi "Serbia Raya" dan Kroasia menjadi "Kroasia Raya".³⁴

3. *Macedonia, Albania dan Kosovo* ³⁵

Setelah perang pecah di Yugoslavia pada tahun 1991, ada alasan untuk merasa takut bahwa konflik ini akan menyebar ke kawasan Balkan. Konflik Kosovo, yang memicu disintegrasi Yugoslavia pada tahun 1987, tetapi bersifat

³⁴ Ibid.

³⁵ Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, Op.cit.

akut; Macedonia adalah negara lemah, dengan kemampuan untuk bertahan yang diragukan; dan transisi penuh kekacauan di Albania dari sistem komunisme ternyata memberikan banyak hal untuk diperhatikan. Di Kosovo, komunitas orang-orang Albania (90% dari seluruh jumlah penduduk) hidup dalam kekuasaan polisi Serbia sejak pemberlakuan otonomi pada tahun 1989.

Kekerasan di Kosovo pada tahun 1988 tentu saja meningkatkan resiko melubernya konflik ini ke Macedonia, dan anggota KLA (Kosovo Liberation Army) serta senjata curian dari Albania muncul di Macedonia.

Pada tahun 1998, KLA bertindak atas inisiatif mereka sendiri, menguasai sebagian besar kawasan pertanian Kosovo, termasuk kawasan di dekat perbatasan Albania. KLA juga memenangkan dukungan yang meluas di antara para penduduk Albania Kosovo. Tetapi pada bulan Agustus sebuah kekuatan militer Serbia yang kuat disertai oleh unit-unit kepolisiannya mengusir KLA dari sebagian besar kawasan yang dikuasai, menyebabkan penduduk Albania harus mengungsi dari kota-kota dan desa-desa. Pada bulan September 1998 sejumlah 240.000 orang telah terusir dari rumah mereka, dan bencana sedang berlangsung.

Serbia	Albania
Posisinya adalah bahwa Kosovo harus tetap merupakan bagian Serbia. Kepentingan dasar Serbia termasuk: - Identifikasi Kosovo dengan "Serbia lama" dan peran penting sentral yang ada dalam kesadaran nasional orang-orang Serbia; - Gereja dan kawasan bersejarah Serbia berasosiasi dengan ini; - Komunitas Serbia di Kosovo; - Sumber-sumber pertambangan	Posisinya adalah bahwa Kosovo harus merdeka. Kepentingan dasar orang-orang Albania termasuk: - Identifikasi Kosovo dengan Illiria sebelum migrasi Slav; - Ikatan yang kuat dengan bangsa Albania di negara tetangganya; - Kemarahan karena diperlakukan sebagai warga negara kelas dua di negara mereka sendiri; - meningkatnya keyakinan bahwa hak asasi manusia dan

dan mineral; - Strategi perlindungan terhadap pegunungan sekitar Kosovo; Juga ada ketakutan untuk menerima kemerdekaan Kosovo: - Ketakutan terhadap Albania yang lebih besar; - Ketakutan akan terpecah-pecahnya Serbia karena masalah etnis.	pengendalian secara menyeluruh terhadap pembangunan ekonomi hanya dilakukan jika mempunyai kemampuan politik guna menentukan kebijakan sendiri. Ada ketakutan orang-orang Serbia akan menggunakan kekuatan jika status quo dipertahankan.
---	---

Tanggung jawab atas terjadinya kekerasan di Kosovo haruslah ditujukan pada Presiden Milosevic, yang merampas otonomi orang-orang Albania Kosovo, dan juga merampas pekerjaan dan sekolah-sekolah mereka, serta rezim pemerintahan yang kekuatan pengamanannya menindas pendirian yang berbeda dengan sangat brutal.

4. *Konflik Maluku*

Konflik ini terjadi, awalnya ketika pada tanggal 19 Januari 1999, saat umat Islam sedang merayakan 'Iedul Fitri, tiba-tiba suasana riang, teduh dan sejuk di hari penuh maaf itu hilang, berganti dengan suasana yang menyedihkan, api kerusuhan pun mulai menyala.

Menurut Thamrin Amal Tomagola (1999), seseorang Sosiolog dari UI, jerami kering bahan bakar kerusuhan di Ambon ini, selain berasal dari tingkat lokal, juga ada dari tingkat nasional. Huru-hara Ambon ini adalah salah satu hasil godokan proses sejarah selama era-pembangunan Orde Baru., tempat faktor lokal bertemu dengan faktor supralokal, yang kemudian mengendap dan tersumbat dalam selokan dan lorong-lorong sosial pemukiman kumuh dan pengap dalam kota Ambon.

Faktor lokal tersebut dapat runutkan sebagai berikut. Pada saat para penjajah menginjakan kakinya di pasir putih Maluku dimulai oleh bangsa Portugis dan kemudian diikuti oleh Spanyol dan Belanda di Maluku Utara

telah berdiri dengan kukuh empat kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jajolo. Dari keempat kerajaan Islam ini, Kerajaan Ternate lah yang terkuat dan terlama berjaya. Hampir seluruh daerah pantai di Maluku Utara, sebagian Pulau Seram, daerah Gorontalo di Sulawesi Utara, dan Filipina Selatan, diislamkan oleh Kerajaan Ternate. Bangsa penjajah, terutama Belanda, tidak punya pilihan selain berusaha menanamkan pengaruhnya di luar wilayah Kerajaan Ternate, yaitu di daerah pedalaman Halmahera dan Maluku Selatan. Misi Kristen Protestan diizinkan Belanda berkiprah di daerah-daerah tersebut. Jadilah Maluku terbagi dua: bagian utara mayoritas Islam, sedangkan bagian selatan dominan Kristen Protestan.

Sejalan dengan politik memecah belah (*divide et impera*), Belanda secara diskriminatif mendorong pembangunan pendidikan di Maluku Selatan yang Protestan. Sejak saat itu, terbentuklah suatu segregasi wilayah berbasis agama di Maluku. Warga Protestan Maluku Selatan yang berpendidikan banyak yang terserap ke dalam birokrasi Belanda, sedangkan yang tidak berpendidikan bergabung dengan tentara kolonial Belanda.

Wujud segregasi sosial berbasis agama bahkan terus berlanjut ke tingkat satuan wilayah yang lebih kecil. Di tingkat desa dan kelurahan dalam suatu kecamatan yang sama dapat ditemukan dengan mudah apa yang disebut "kampung Islam dan kampung Kristen".

Faktor supralokal nya adalah faktor politik pemerintah yang sangat sentralistik. Peran pemerintah yang mendominasi terhadap pemerintah daerah, bukan saja banyak sumber daya ekonomi yang tersedot ke pusat, tetapi juga konsentrasi perhatian dan komitmen pemerintah daerah lebih mendorong untuk menyenangkan pusat. Dan faktor yang kedua, yaitu intrusi sistem ekonomi kapitalisme pinggiran Orde Baru ke kota menengah dan kecil, termasuk Ambon.

Itulah sebabnya mengapa aksi massa perusakan ini tidak terbatas di kota besar, tetapi telah menyebar merata baik ke kota menengah maupun kecil. Mal-mal pusat belanja yang menjamur, yang membutuhkan ruang dalam kota yang sudah sempit, dan secara kasar menggusur pemukiman penduduk, tempat usaha, dan pasar tradisional. Penduduk Ambon melihat bahwa bukan saja fasilitas umum untuk mereka tidak terurus, tetapi juga rumah dan tempat

usaha mereka tergusur oleh modal yang berkolusi dengan pemda setempat. Selama 32 tahun mereka hanya dapat menggerutu dalam diam.³⁶

Kontlik yang terjadi di Maluku, berpangkal dari kepentingan politis suatu kelompok, yakni FKM (Front Kedaulatan Maluku), yang ingin memisahkan Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian konflik ini meluas menjadi konflik SARA.

Alexander Hermanus Manuputy, yang lebih dikenal sebagai Alex Manuputy, adalah Direktur Eksekutif Front Kedaulatan Maluku. Ia juga pendukung Republik Maluku Selatan (RMS). Pendanaan RMS Ambon yang disinyalir dibiayai para pendukung RMS di Belanda, versi lain menyebutkan bahwa RMS dibiayai Freemasonry, salah satu organisasi Zionis Israel.

Sikap pemerintah Indonesia terhadap FKM ini sudah jelas, yakni pada tanggal 10 Mei 2002, melalui Menko Polkam, Susilo Bambang Yudhoyono meminta Penguasa Darurat Sipil Maluku, Saleh Latuconsina, untuk membubarkan FKM/RMS.³⁷

36 A. Tuhana Taufik, *Konflik Maluku*, Edisi Pertama, Penerbit Gama Global Media, Yogyakarta, 2000.

37 *Media Indonesia*, Edisi Jum'at, 17 Mei 2002, No. 7874 Tahun XXXIII.

Perubahan Global Lingkungan Hidup

Dalam menjalani kehidupannya manusia sangat tergantung pada alam. Karena hampir semua aktivitas manusia berkaitan dengan alam. Namun seiring dengan berkembangnya pengetahuan manusia didukung dengan pesatnya kemajuan teknologi, membawa pengaruh yang buruk bagi pelestarian alam yang seharusnya dijaga guna menunjang seluruh rangkaian kehidupan manusia.

Saat ini pencemaran lingkungan yang berasal dari aktivitas manusia sudah sangat bermacam-macam dan memprihatinkan. Akibat yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan salah satunya adalah meningkatnya suhu panas bumi yang ditimbulkan akibat rusak atau menipisnya lapisan ozon, yang seharusnya berfungsi melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang berlebih. Apabila dibiarkan terus menerus akan membahayakan kelangsungan hidup organisme yang terdapat di muka bumi. Karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya berskala kecil tapi bersifat dunia.

Oleh karena itu beberapa negara ikut ambil bagian dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya dengan mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi tentang bumi pada bulan Juni 1992 di Rio de Janeiro, yang membahas segala aspek yang berkaitan dengan bumi dan aktivitas manusia yang mempengaruhi pencemaran lingkungan.

Tanggapan efektif terhadap ancaman lingkungan yang kini berkembang akan mewajibkan, bahwa pengertian kemanusiaan tentang hubungan dengan sistem alami bumi, melintasi ambang yang baru. Selama tahun delapan puluhan terjadi pergeseran di medan lingkungan yang menyebabkan perubahan-perubahan haluan besar pada beberapa masalah penting. Mereka memberikan alasan agar optimis dalam menangani ancaman-ancaman yang lebih besar, sebab mereka menunjukkan, bahwa pembalikan-pembalikan penting mungkin terjadi dalam waktu yang agak singkat. Akan tetapi mereka juga menimbulkan kecemasan karena tampaknya sering membawa krisis sebelum pengertian orang cukup berubah untuk membantu tanggapan politik yang efektif. Dengan masalah-masalah seperti perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk, suatu kelanjutan pola tersebut berarti, bahwa banyak kerusakan yang tidak dapat diubah lagi akan terjadi, sebelum adanya tanggapan masyarakat.

Memburuknya kondisi fisik bumi yang telah didokumentasikan dalam seri terakhir tentang laporan semacam itu sekarang mengalami perubahan. Dan belum ada prospek apa pun yang dapat diduga sebagai titik balik di masa mendatang. Sekarang kita sedang berpacu untuk menghentikan memburuknya lingkungan sebelum hal itu tak terkendali lagi, sebelum hal itu membawa kehancuran ekonomi serta kekacauan sosial.

Timbul kesadaran bahwa bumi itu satu walau dunia itu terbagi bagi atas beberapa negara/bangsa, dalam bentuk sejumlah prakarsa dan organisasi internasional, dan konferensi regional dan prakarsa lembaga non pemerintah yang menyoroti segala aspek tentang pemanasan global.

A. KERANGKA TEORITIS

1. Pemanasan Global

Bumi dikelilingi oleh atmosfer yang terdiri dari atas campuran berbagai gas. Di dalam atmosfer juga terdapat debu, jelaga dan partikel halus lain. Hidup kita sangat bergantung kepada atmosfer, langsung maupun tidak langsung.

Atmosfer juga mempengaruhi kondisi di bumi, antara lain banyaknya sinar ultraviolet gelombang pendek yang sampai ke bumi, suhu, iklim dan

derajat keasaman air hujan. Pengaruh itu sangat bergantung kepada susunan gas dalam atmosfer. Susunan gas dalam atmosfer itu sebagian ditentukan oleh proses alam dan sebagian lagi ditentukan oleh kegiatan manusia. Proses alam dan kegiatan manusia juga saling mempengaruhi.

2. Pencemaran Lingkungan

Disadari atau tidak, problem lingkungan ini telah menjadi salah satu momok yang sangat menakutkan bagi sebagian manusia. Kenapa sebagian? Karena memang hanya sebagian dari masyarakat dunia yang begitu repot mengurus masalah ini, sementara sebagian lainnya (sengaja atau tidak) sibuk pula meningkatkan pencemaran di muka bumi ini.

3. Kemajuan Teknologi dan Efek Sampingnya

Ilmu dan teknologi senantiasa berusaha menemukan sarana dan prasarana untuk menambah kesejahteraan hidup manusia, dan kita menyaksikan keberhasilannya dalam melaksanakan tugas tersebut.

Ada pun sarana dan prasarana yang memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia yang dihasilkan dari kemajuan teknologi antara lain dalam bidang komunikasi dan kesehatan.

B. REALITA PEMANASAN GLOBAL

Pemanasan Global bukan sebuah teori ilmiah yang samar-samar. Jika benar-benar sedang terjadi pada skala yang cukup berarti, maka pemanasan global mempunyai implikasi praktis yang penting bagi seluruh umat manusia dalam waktu yang tidak terlalu jauh ke depan.

1. Pengertian Pemanasan Global

Gas dalam atmosfer yang molekulnya terdiri dari lebih dua atom yang mempunyai sifat menyerap sinar matahari gelombang panas, yaitu sinar infra merah atau gelombang panas. Gas-gas itu disebut gas rumah kaca. Bumi yang terkena sinar matahari menjadi panas, panas ini dipancarkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa, tetapi terserap oleh gas rumah kaca. Dengan diserapnya gelombang panas oleh gas rumah kaca maka naiknya

suhu atmosfer yang menyelimuti bumi sehingga suhu dipermukaan bumi pun meningkat. Inilah yang disebut dengan Pemanasan Global.

Apakah Efek Rumah Kaca itu ?

Bumi yang terkena sinar matahari menjadi panas. Kemudian panas ini dipancarkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa, tetapi terserap oleh gas rumah kaca. Dengan diserapnya gelombang panas ini oleh gas rumah kaca, maka naiknya suhu atmosfer yang menyelimuti bumi sehingga suhu dipermukaan bumi pun naik. Inilah yang disebut dengan Efek Rumah Kaca.

Kemudian dapat pula terjadi efek gabungan, di mana dampak dari masing-masing gas yang terkandung tergantung tidak hanya pada sifat-sifat rumah kacanya, tetapi juga pada masa hidupnya dalam atmosfer.

2. Penyebab Terjadinya Pemanasan Global

Pemanasan global secara umum disebabkan oleh 2 hal yaitu:

1. Pembakaran bahan fosil dalam industri, mobil, pembangkit listrik dan sebagainya.
2. Emisi buatan CFC (klorofluokarbon). CFC inilah yang merusak lapisan ozon sehingga memungkinkan sinar ultraviolet yang membahayakan itu menembus bumi.

Di samping itu peningkatan suhu bumi juga disebabkan oleh timbunan Gas-gas Rumah Kaca seperti karbondioksida, metana, nitrat oksida dan klorofluokarbon (CFC) di atmosfer. Timbunan ini memperangkap panas dari matahari sehingga menimbulkan peningkatan suhu.

Menurut *Inter Governmental Panel on Climate Change* (IPCC atau Panel antar Pemerintah tentang perubahan iklim) ada dua hal yang dipastikan sebagai penyebab terjadinya pemanasan global, yaitu:

1. Adanya Efek Rumah Kaca di bumi.
2. Adanya gas-gas yang mengakibatkan Efek Rumah Kaca kini meningkat dalam atmosfer akibat ulah manusia.

Di arena internasional, banyak pihak menuduh negara-negara dunia ketiga sebagai biang keladi pemanasan global karena pembakaran hutan besar-besaran di negara tersebut. Pembakaran itu melepaskan karbondioksida ke atmosfer.

3. Kebakaran Hutan

Indonesia termasuk negara kaya akan sumber daya alam, yang salah satu keberadaannya terdapat di dalam hutan. Kerusakan hutan dapat diakibatkan karena pencurian hasil hutan, perambahan (pembukaan) hutan, bencana alam, dan juga kejadian kebakaran hutan.

Dari segi pengelolaan tanah dan air (pengatur hidrologis), hutan dapat berfungsi sebagai pengatur ketersediaan air bagi daerah-daerah di sekitarnya terutama bagi daerah hilir karena dengan adanya hutan maka ketersediaan air pada musim kemarau dapat tercukupi dan pada saat musim penghujan dapat tertahan sehingga tidak terjadi banjir.

Hutan di Indonesia merupakan hutan tropik terluas nomor dua di dunia setelah Brazil. Hutan tropik seperti di Indonesia ini sangat khas sehingga sumber daya alam hayati (sumber plasma nutfah) tersebut sangatlah tinggi nilainya karena tidak banyak negara lain yang mempunyai kekayaan sumber daya tersebut. Dengan demikian, kejadian kebakaran hutan di Indonesia khususnya yang terjadi pada tahun 1997/1998 selain menimbulkan dampak pada beberapa negara tetangga (Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam) juga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia.

Kebakaran hutan bersumber pada 3 (tiga) sebab utama yaitu:

1. Manusia karena kesengajaan;
2. Manusia karena kelalaian, dan
3. Peristiwa alam.

Pada umumnya peristiwa alam yang dapat menimbulkan kebakaran hutan secara langsung adalah letusan gunung berapi atau petir, tetapi hal ini jarang sekali dialami. Menurut Dirjen PHPA atau Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (1994) bahwa rata-rata lebih dari 30.000 ha hutan terbakar

setiap tahunnya, dan 90% penyebabnya adalah perbuatan manusia sedangkan 10 % -nya disebabkan oleh peristiwa alam.

Kebakaran hutan hanya dapat terjadi apabila terdapat nyala api, sedangkan proses nyala api dapat berlangsung apabila ada tiga unsur yaitu bahan bakar, udara/oksigen dan sumber api. Dengan demikian, apabila salah satu unsur tersebut tidak ada, maka proses nyala api tidak akan dapat berlangsung. Secara formula kebakaran hutan dapat dituliskan seperti di bawah ini (Hartono, 1988):

Sellulosa (karbon) + oksigen (O_2) + sumber (api) $\longrightarrow$

$CO_2 + H_2O + \text{energi panas}$

Ada tiga tipe atau bentuk kebakaran hutan (Dirjen PHPA: 1994), yaitu:

1. Kebakaran bawah (*ground fire*).

Biasanya terjadi pada hutan bertanah gambut dan/atau pada tanah yang mengandung mineral seperti batu bara, karena adanya bahan-bahan organik di bawah lapisan serasah yang mudah terbakar. Api dimulai dari membakar serasah dan kemudian membakar bahan-bahan organik yang berada pada lapisan di bawahnya. Kebakaran bentuk ini tidak menampilkan nyala api sehingga sulit dideteksi.

2. Kebakaran permukaan (*surface fire*).

Kebakaran yang terjadi pada permukaan tanah. Api membakar serasah, semak-semak dan anakan pohon. Kebakaran ini tidak sampai membakar tajuk pohon karena pohon-pohonnya jarang atau dari jenis yang sulit terbakar.

3. Kebakaran tajuk (*crown fire*).

Kebakaran yang terjadi pada tajuk-tajuk pohon. Api berawal dari serasah (kebakaran permukaan), kemudian merambat ke tajuk pohon karena adanya tajuk, seperti tumbuhan liar atau cabang dan ranting-ranting kering yang menyentuh serasah hutan. Kebakaran model ini yang paling sulit dikendalikan karena merambat sangat cepat searah dengan arah angin.

4. Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Lingkungan

Definisi kebakaran hutan menurut Keputusan Menteri Kehutanan No. 195/Kpts-II/1986 adalah suatu keadaan di mana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Karena itu, kebakaran hutan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan yaitu lingkungan fisik, hayati, kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Dampak negatif pada lingkungan fisik antara lain meliputi penurunan kualitas udara akibat kepekatan asap yang memperpendek jarak pandang sehingga mengganggu transportasi, mengubah sifat fisika-kimia dan biologi tanah, mengubah iklim mikro akibat hilangnya tumbuhan, bahkan dari segi lingkungan global ikut memberikan andil terjadinya efek rumah kaca. Dampak pada lingkungan hayati antara lain meliputi menurunnya tingkat keanekaragaman hayati, terganggunya suksesi alami, terganggunya produksi bahan organik dan proses dekomposisi. Dampak pada kesehatan yaitu timbulnya asap yang mengganggu kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin, lanjut usia, ibu hamil dan anak balita seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma bronkial, bronkitis, pneumonia, iritasi mata dan kulit. Dampak sosial yaitu hilangnya mata pencaharian, rasa keamanan dan keharmonisan masyarakat lokal (Kantor Meneg LH: 1998). Selain itu, diduga kebakaran hutan ini dapat menghasilkan racun dioksin, yang dapat menyebabkan kanker dan kemandulan bagi wanita (*Tempo*, 27 Juni 1999).

Sedangkan dampak ekonomi antara lain meliputi dibatalkannya jadwal transportasi darat-air dan udara, hilangnya tumbuh-tumbuhan terutama tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, biaya pengobatan masyarakat, turunnya produksi industri dan perkantoran, serta anjloknya bisnis pariwisata. Menurut perkiraan WWF (*World Wild Fund*) dan *Canadian IDRC'S Economic and Environmental Project in South East Asia* (EEPSEA), nilai kerugian akibat kebakaran hutan tahun 1997/1998 yang ditanggung 3 (tiga) negara (Indonesia, Malaysia dan Singapura) mencapai 1,45 miliar dolar (US). Angka ini hampir sama dengan total kerugian akibat tragedi Bhopal (bocornya instalasi pabrik Union Carbide di India pada 1984) dan Exxon Valdez (tumpahnya jutaan ton minyak dari sebuah tanker di Alaska, Amerika Serikat pada 1989), atau sama dengan sekitar 2,5 persen GNP Indonesia sebelum krisis moneter (*Tempo*, 28 Desember 1998).

Sebenarnya apabila kebakaran hutan ini terkendali, maka dapat berdampak positif antara lain mempermudah dan menghemat biaya dalam tahap pembukaan lahan, membantu peremajaan alam, mempercepat proses mineralisasi hara tanah, memusnahkan hama dan penyakit tanaman (Armanto dan wildayana, 1998).

5. Upaya Menangani Permasalahan Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan

Kasus kebakaran hutan di Kalimantan Timur tahun 1997/1998 diperkirakan apabila dibiarkan secara alami, maka untuk mengembalikan kesuburan tanah seperti semula memerlukan waktu 30 sampai 50 tahun (Alikodra, 1998).

Ada kemungkinan waktu pemulihan tersebut bisa dipersingkat. Caranya dengan memasukkan input energi (rekayasa) pada tanah yang terbakar. Tindakan ini mungkin bisa mereduksi tidak harus menunggu 30-50 tahun, tetapi tentunya dengan modal yang cukup besar.

Cara yang paling baik adalah dengan meneliti unsur hara yang hilang, kemudian mengembalikan humifikasi dan kesuburan tanah, yaitu sebagai berikut:

1. Tanam dengan jenis-jenis pohon lebih dahulu yaitu dengan menggunakan tanaman yang bisa mempercepat kesuburan tanah seperti Leguminosae (kacang-kacangan), sehingga tanaman ini bisa mengikat kembali unsur hara mineral yang ada pada tanah melalui bintil-bintil akarnya.
2. Selanjutnya mencari spesies yang cepat tumbuh yang bisa mengembalikan iklim mikro, misalnya tanaman sengon (*Albizia*). Kayu-kayu ini bisa tumbuh dengan baik dalam satu tahun.
3. Penanaman Leguminosae dan *Albizia sp.* ini harus diikuti dengan penanaman spesies lokal, sehingga nantinya masih ada hutan alam yang utuh. Caranya dengan mengerahkan masyarakat untuk mencari bibit lokal, mempercepat pembibitan pada musim penghujan di samping menanam Leguminosae dan *Albizia sp.* Ini harus secepatnya dilakukan jangan sampai tanah terbuka pada

musim penghujan karena akan mengakibatkan terjadinya erosi sehingga lama-lama tanah akan miskin unsur hara.

Untuk mengurangi erosi lapisan kesuburan *top soil* yang terbakar bisa dilakukan konservasi tanah dan air, yaitu dengan menggunakan batu yang dipasang untuk mengurangi erosi.

C. PENCEMARAN LINGKUNGAN

Lingkungan mengandung sumber daya alam yang dibutuhkan oleh organisme, termasuk manusia, baik untuk kebutuhan dasar maupun di atas kebutuhan dasar (industrialisasi). Oleh karena itu lingkungan selalu dimanfaatkan oleh semua organisme hidup.

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Pergeseran bentuk tatanan dari kondisi asal pada kondiusi yang buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masuknya bahan - bahan pencemar atau polutan. Bahan polutan tersebut pada umumnya mempunyai sifat racun (toksin) yang berbahaya bagi organisme hidup. Toksisitas daya racun dari polutan itulah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya pencemaran.

2. Hal-hal Yang Mencemari Lingkungan

Suatu tatanan lingkungan hidup yang dapat tercemar atau menjadi rusak disebabkan oleh banyak hal. Namun yang paling utama dari sekian banyak penyebab tercemarnya suatu tatanan lingkungan adalah limbah. Limbah dalam konotasi sederhana dapat diartikan sebagai sampah. Limbah atau dalam bahasa ilmiahnya disebut polutan, dapat digolongkan atas beberapa kelompok berdasarkan:

Jenis : limbah padat dan limbah cair

Sifat : limbah organik dan non organik

Sumber : limbah rumah tangga atau domestik dan limbah industri

3. Senyawa Kimia Sebagai Bahan Pencemar

Limbah kimia organik meski dalam rentang waktu yang cukup lama, masih akan diuraikan oleh mikroorganisme pengurai (dekomposer), untuk kemudian dapat digunakan kembali. Sedangkan untuk kimia non organik, tidak akan mengalami proses daur ulang, seperti sampah plastik. Di samping itu, senyawa-senyawa kimia non organik yang mengandung unsur logam berat, meski dapat terurai menjadi senyawa-senyawa sederhana, akan tetap menjadi limbah beracun yang dapat merugikan manusia.

Lingkungan dapat diartikan sebagai media atau suatu areal, tempat atau wilayah yang di dalamnya terdapat bermacam-macam, bentuk aktivitas yang berasal dari ornamen-ornamen penyusunnya. Ornamen tersebut ada dalam bentuk lingkungan, merupakan suatu bentuk sistem yang saling mengikat, saling menyokong kehidupan kita.

Suatu lingkungan hidup dapat dikatakan tercemar apabila telah terjadi perubahan-perubahan dalam tatanan lingkungan itu sehingga tidak sama lagi dengan bentuk asalnya, sebagai akibat dari masuknya suatu zat atau benda asing ke dalam tatanan lingkungan itu. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kemasukan benda asing itu, memberikan pengaruh (dampak) buruk terhadap organisme yang sudah ada dan hidup dengan baik dalam tatanan lingkungan tersebut. Sehingga pada tingkat lanjut dalam arti bila lingkungan tersebut telah tercemar dalam tingkatan yang tinggi, dapat membunuh dan bahkan menghapuskan satu atau lebih jenis organisme yang tadinya hidup normal dalam tatanan lingkungan itu. Jadi pencemaran lingkungan adalah terjadinya perubahan dalam tatanan lingkungan asli menjadi suatu tatanan baru yang lebih buruk dari tatanan aslinya.

Aktivitas kehidupan manusia yang sangat tinggi yang dilakukan oleh manusia ternyata telah menimbulkan bermacam-macam efek yang buruk bagi kehidupan manusia dalam tatanan lingkungan hidupnya. Aktivitas yang pada prinsipnya merupakan usaha manusia untuk dapat hidup dengan layak dan berketurunan dengan baik, telah merangsang manusia untuk melakukan tindakan yang menyalahi kaidah yang ada dalam tatanan lingkungan hidupnya. Akibatnya terjadi pergeseran keseimbangan dalam tatanan lingkungan dari bentuk asal ke bentuk baru yang cenderung lebih buruk.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa yang paling utama dari sekian banyak penyebab tercemarnya suatu tatanan lingkungan hidup adalah limbah. Limbah padat adalah semua bahan sisa atau bahan buangan yang sudah tidak berguna dan berbentuk benda padat. Limbah padat dapat berupa kaleng bekas minuman, daun bekas membungkus, kertas dan lain sebagainya. Limbah cair adalah semua jenis bahan sisa yang dibuang dalam bentuk larutan atau berupa zat cair, dapat berupa air bekas pencucian pemurnian emas yang mengandung unsur-unsur merkuri, busa deterjen dan lain sebagainya. Limbah organik adalah semua jenis bahan sisa atau bahan buangan yang merupakan bentuk-bentuk organik, dalam arti bahan buangan tersebut akan dapat terurai dan habis dalam tatanan lingkungan dengan adanya organisme-organisme pengurai (dekomposer). Contoh limbah ini adalah bangkai hewan dan tanaman, bekas daun pembungkus, kertas dan lain sebagainya. Limbah non organik adalah semua jenis bahan sisa atau bahan buangan yang tidak dapat terurai dan habis dalam tatanan lingkungan. Contoh untuk limbah jenis ini adalah sampah plastik. Limbah industri adalah semua jenis bahan sisa atau bahan buangan yang berasal dari hasil samping suatu proses perindustrian. Limbah industri dapat menjadi limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan manusia.

Limbah (sampah) organik, meski akan dapat diuraikan oleh dekomposer, dalam jumlah yang banyak tetap menimbulkan masalah-masalah lingkungan. Limbah organik yang tidak terkontrol akan menimbulkan masalah lingkungan, seperti pencemaran pemandangan (pencemaran estetika), pencemaran bau (bau yang busuk) dan bahkan banyak penyakit lingkungan. Sebagai contoh, untuk penyakit yang disebabkan oleh limbah organik adalah diare, muntaber, dan TBC.

Ada pun untuk limbah industri, kerugian yang dapat ditimbulkan lebih luas lagi. Limbah tersebut berperan sebagai bahan polutan yang menjadi sebab terpolusinya (tercemarnya) suatu tatanan lingkungan yang dimasukinya. Polutan yang dihasilkan dari sektor industri dapat dibedakan atas dua kategori, yaitu:

1. Polutan hasil proses produksi.
2. Polutan yang ditimbulkan dari penggunaan hasil produksi seperti penggunaan pestisida.

Pencemaran yang dapat menghancurkan tatanan lingkungan hidup, biasanya berasal dari limbah-limbah yang sangat berbahaya dalam arti memiliki daya racun (toksisitas) yang tinggi. Limbah beracun tersebut pada umumnya berupa limbah, apakah itu berupa persenyawaan kimia atau hanya dalam bentuk unsur atau ionasi. Biasanya senyawa kimia yang sangat beracun bagi organisme hidup dan manusia adalah senyawa kimia yang mempunyai bahan aktif dari logam berat. Daya racun yang dimiliki oleh bahan aktif dari logam berat akan bekerja sebagai penghalang kerja enzim dalam proses fisiologi atau metabolisme tubuh. Sehingga proses metabolisme terputus. Di samping itu bahan beracun dari senyawa kimia juga dapat terakumulasi atau menumpuk dalam tubuh, akibatnya timbul problem keracunan kronis.

4. Penggunaan dan Kebutuhan Bahan Kimia

Pada dasarnya, semua organisme hidup termasuk manusia merupakan suatu bentuk kesatuan kimia yang sangat kompleks. Untuk hidup dan kehidupannya, semua organisme tergantung pada bermacam-macam bentuk persenyawaan kimia. Persenyawaan tersebut secara gamlang dibedakan atas:

1. Senyawa-senyawa kimia organik.

Seperti karbohidrat (zat asam arang), molekul-molekul protein, molekul-molekul lemak, vitamin dan sebagainya.

2. Senyawa-senyawa kimia an-organik.

Seperti garam-garam mineral dan lain sebagainya.

Semua bahan tersebut diperoleh manusia dari bahan makanan yang dimakannya. Tetapi karena jumlah bahan makanan secara alamiah yang ada dalam tatanan lingkungan hidup terbatas, dan besarnya kebutuhan akan makanan terus meningkat, manusia berusaha melakukan bermacam-macam usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Manusia bertani dan terus mengembangkan sistemnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karenanya untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin manusia mendampingkan sistem pertanian dengan teknologi, maka terciptalah bahan atau senyawa kimia yang berfungsi untuk meningkatkan produk pertanian.

C. KEMAJUAN TEKNOLOGI DAN EFEK SAMPINGNYA

Telah disebutkan sebelumnya bahwa peranan teknologi sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia. Namun yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah teknologi nuklir.

Dibanding dengan teknologi-teknologi lainnya, teknologi nuklir barangkali merupakan teknologi yang oleh sebagian besar masyarakat awam dirasa paling jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali bersentuhan dengan masalah-masalah kehidupan mereka sehari-hari. Namun di bawah ini akan diuraikan lebih jelas mengenai nuklir itu sendiri dan dampak yang timbulkannya bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi ini.

1. Pengertian Nuklir

Dalam ilmu fisika nuklir merupakan bagian yang sangat kecil dari atom di mana massa suatu atom terpusatkan. Awal penguasaan teknologi nuklir oleh umat manusia dimulai ketika Wilhelm K. Roentgen (1845-1923), fisikawan berkebangsaan Jerman, pada tahun 1895 menemukan sejenis sinar aneh yang belum pernah diketahui sebelumnya. Sinar ini diberi nama sinar-X yang akhirnya dikenal dengan istilah sinar Roentgen. Berawal dari itu penelitian demi penelitian terus dilakukan, tidak hanya oleh Roentgen sendiri tetapi juga oleh ahli-ahli fisika lain yang berasal dari berbagai negara untuk mempelajari reaksi kimia yang dihasilkan oleh benda yang disebut nuklir itu.

2. Manfaat Nuklir

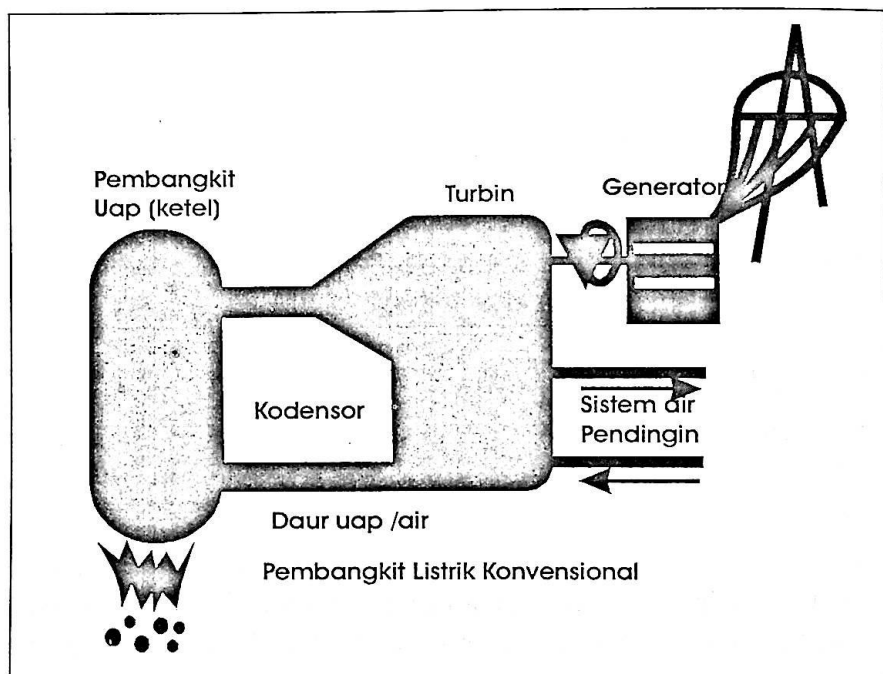
Seperti telah disebutkan bahwa nuklir tidak lain adalah inti atom. Oleh sebab itu, baik reaksi nuklir maupun energi nuklir selalu berkaitan dengan inti atom.

Inti atom ternyata menyimpan tenaga yang luar biasa besarnya. Tenaga yang luar biasa ini dapat digunakan oleh manusia dalam menunjang kebutuhan hidupnya sehari-hari. Contoh satu gram U-235 (salah satu bahan radio aktif pembentuk nuklir) dapat dipakai untuk mensuplai kebutuhan listrik pesawat televisi selama lebih dari 15 tahun, dengan asumsi pesawat televisi tersebut hanya dinyalakan selama 12 jam perhari. Bahkan dengan

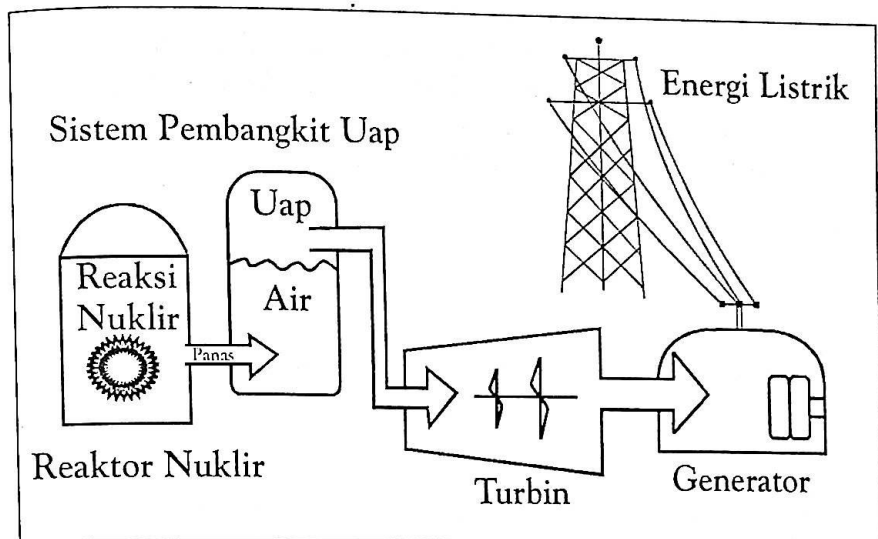
perhitungan yang sama, satu gram U-235 dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan listrik pada suatu rumah tangga dengan daya 900 watt, (daya sedang untuk ukuran rumah tangga, dengan asumsi pemakaian maksimum selama 12 jam per hari) selama lebih dari satu setengah tahun.

Melihat besarnya energi yang dapat dihasilkan oleh reaksi nuklir, maka timbul keinginan dalam diri manusia untuk memanfaatkan energi nuklir tersebut. Saat ini energi nuklir telah dimanfaatkan manusia untuk menggerakkan kapal selam, sumber energi pada wahana ruang angkasa dan kebutuhan listrik bagi rumah tangga. Di bawah ini adalah bagan yang memperlihatkan perbandingan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan uap dan pembangkit listrik yang menggunakan tenaga nuklir.

Di bawah ini adalah bagan yang memperlihatkan perbandingan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan uap dan pembangkit listrik yang menggunakan tenaga nuklir.



a) Proses kerja PLTU



b) Proses kerja PLTN

Gambar: Perbandingan proses kerja PLTU dan PLTN (Sumber: ATOMOS)

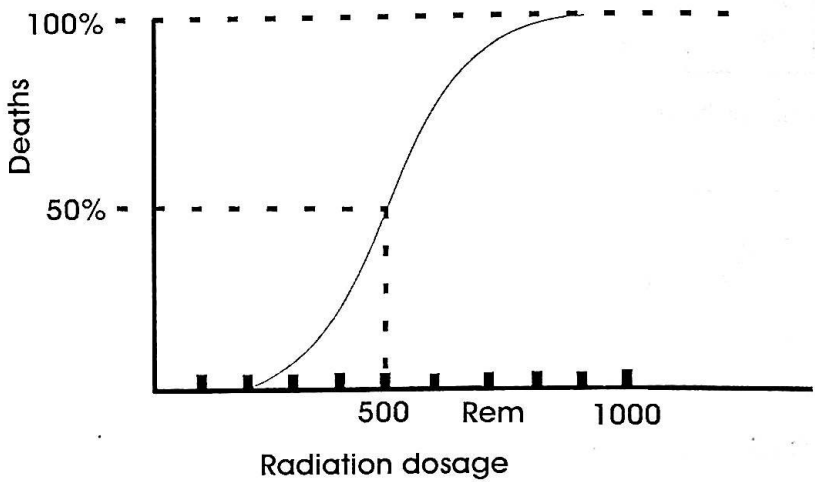
3. Dampak yang Ditimbulkan Oleh Nuklir

Setiap benda di samping memiliki segi positif, ia juga memiliki segi negatif yang dapat merugikan, tidak hanya bagi penggunanya tetapi juga lingkungan sekitarnya. Begitu pula dengan nuklir. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh nuklir adalah radiasi.

Beberapa efek radiasi yang merugikan dapat dilihat secara langsung terhadap:

1. Tubuh manusia, seperti kerontokan rambut dan kerusakan kulit. Para ahli biologi pun memastikan bahwa efek radiasi dapat menimbulkan kerusakan somatik berupa kerusakan sel-sel jaringan tubuh yang memberi peluang timbulnya kanker dan kerusakan genetika berupa mutasi sel-sel reproduksi sehingga memberi peluang terjadinya cacat pada keturunan.
2. Limbah radio aktif merupakan hasil samping dari kegiatan manusia dalam pemanfaatan teknologi nuklir yang tidak dapat dipakai atau

didaur ulang. Apabila limbah ini terbuang atau terlepas langsung ke lingkungan maka seluruh organisme yang ada di muka bumi ini akan punah, karena efek radiasi yang timbulkannya. Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan dosis dan dampak radiasi bagi kehidupan manusia di negara Amerika Serikat.



Radiation exposures in the United State*

	Millirems**
Natural sources	
A. External to the body	
1. From cosmic radiation	50.0
2. From the earth	47.0
3. From building materials	3.0
B. Inside the body	
1. Inhalation of air	5.0
2. Elements found naturally in human tissues	21.0
Total, natural sources	126.0
Man-made sources	
A. Medical procedures	
1. Diagnostic x-rays	50.0 (up to 95 in 1970)
2. Radiotherapy x-rays, radioisotopes	10.0
3. Internal diagnosis, therapy	1.0
Subtotal	[61.0]
B. Atomic energy industry, laboratories	0.2
C. Luminous watch dials, television tubes, radioactive industrial wastes, etc.	2.0
D. Radioactive fallout	4.0 ***
Subtotal	[6.2]
Total, man-made sources	67.2
Overall total	193.2

* Estimated average exposures to the gonads. based on the 1963 report of the Federal Radiation Council and adapted from I. Asimov and T. Dobzhansky, Ref. 6.

** One thousandth of a rem.

*** Down to 1.0 in 1970.

D. PENUTUP

Ketika seorang senator Amerika Serikat menyaksikan betapa kotor dan cemarnya bumi oleh ulah manusia, maka ia mengambil prakarsa, bersama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, untuk mencurahkan satu hari bagi ikhtiar penyelamatan bumi dari berbagai kerusakan. Hari yang dipilih adalah tanggal 22 April, dijadikan Hari Bumi. Ada pun maksud utama terbentuknya Hari Bumi adalah menggugah kepedulian manusia dan masyarakat pada lingkungan yang cenderung semakin rusak, karena bumi adalah bagian dari lingkungan hidup.

Dalam proses pembangunan yang dilaksanakan manusia selama ini, orang cenderung mengambil manfaat bumi dan mengembalikan limbah racun ke dalam bumi. Bisakah cara-cara seperti tersebut terus berlanjut?

Ketika jumlah manusia dunia masih terbatas, dampak pengaruh perbuatan manusia kurang kentara. Tapi apabila jumlah manusia dunia melewati jumlah lima milyar jiwa, tekanan penduduk pada bumi semakin terasa.

Suatu program kerja lingkungan telah disepakati oleh Kongres Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, di antaranya berisi program konservasi dan pengelolaan sumber daya alam dan mencakup dari masalah lingkungan di dasar laut sampai ke udara atmosfer, baik mencakup alam mati maupun lingkungan hidup.

Kemudian di bawah ini penyusun lampirkan sejumlah Prakarsa Organisasi Internasional yang bekerja pada berbagai aspek masalah pemanasan global.

The World Climate

Konperensi *The World Climate* yang pertama diadakan tahun 1979 sebagai tanggapan atas kekhawatiran mengenai dampak potensial dari kegiatan manusia atas suhu global. Salah satu hasil dari konperensi itu adalah didirikannya *The World Climate Programme* (WCP) di bawah bantuan *the World Meteorological Organization* (WMO), *the United Nations Environment Programme* (UNEP) *the United Nations Environment, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) dan *the International Council of Scientific Unions* (ICSU).

WCP mengadakan lokakarya di Villach, Austria pada tahun 1985, untuk meninjau penelitian mengenai efek rumah kaca. Sebuah persetujuan diambil bahwa konsentrasi gas-gas rumah kaca akan menjadi dua kali lipat sekitar tahun 2030, yang akan berkisar antara 1, 5-4, 5 C, meskipun efek penuh tidak akan terasa pada beberapa dekade.

Dua lokakarya kemudian diadakan pada tahun 1987, dengan bantuan *the Stockholm Environment Institute*, satu diadakan di Villach, dan satu lagi diadakan di Bellagio, Italia. Hal ini menegaskan perkembangan Perubahan Global Consensus Gains dan menyusun agenda untuk sebuah konferensi internasional yang akan diadakan di Toronto, Kanada.

Aktivitas WCP juga meliputi *World Climate Data Programme* yang membantu negara-negara mengadakan sistem koleksi data; serangkaian program penelitian ke dalam aspek khusus dari suhu dunia; dan penelitian khusus area dampak suhu dan aspek-aspek yang berbeda dalam pemanasan global.

The World Ocean Circulation Experiment (WOCE), juga dikoordinasi oleh WCP, suatu usaha ilmiah yang sangat besar, meliputi 40 negara besar, untuk meningkatkan pengetahuan mengenai peranan laut dalam menentukan suhu global. Juga meliputi penelitian mengenai laut sekarang ini, permukaan dan temperaturnya, serta pola angin, dengan menggunakan satelit dan penelitian di kapal.

The Second World Climate Conference

The second world climate conference diadakan pada akhir tahun 1990 di Jenewa Switzerland, dengan sponsor dari WMO, UNEP, UNESCO dan ICSU. Diskusi berdasarkan pada hasil dari tiga lokakarya IPCC Working Groups, dengan memperhatikan bahwa pemanasan global tidak dapat dihindarkan jika konsentrasi pada gas-gas rumah kacaselanjutnya akan bertambah. Meskipun masyarakat Eropa setuju untuk menstabilkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2000, namun Amerika dan Uni Soviet tetap tidak berubah dalam menentang setiap sasaran khusus.

The Advisory Group on Greenhouse gases.

The Advisory Group on Greenhouse Gases (AGGG) didirikan oleh WMO, UNEP dan ICSU untuk memastikan bahwa ada pelaksanaan yang

memadai dari lokakarya WCP. Disusun berdasarkan laporan yang diadakan sekali dalam dua tahun dari penelitian internasional dan regional berhubungan dengan gas-gas rumah kaca dan juga penilaian mengenai tingkat kecepatan pertambahan gas rumah kaca di atmosfer.

The International Geosphere-Biosphere Programme

Program ini didirikan oleh ICSU pada tahun 1986 yang bertujuan untuk menguraikan dan memahami interaktif fisik, kimia dan proses biologi yang mengatur seluruh sistem bumi, perubahan yang terjadi di dalam system dan cara mereka mempengaruhi gerakan manusia.

The 1988 Toronto Conference on The Changing Atmosphere

Sebuah konferensi dengan nama The Changing Atmosphere: Implication for Global Security diadakan di Toronto pada bulan Juni 1988 yang diwakili oleh keseluruhan dari 45 Negara dan 15 organisasi internasional.

Konferensi menyetujui keterangan ilmiah pada pemanasan global. Di antara rekomendasi itu ialah:

1. Mengurangi emisi karbondioksida sebanyak 20 % pada tahun 2005 melalui pemanfaatan energi secara efisien dan modifikasi suplay;
2. Menghentikan penebangan hutan dan menambah penanaman hutan;
3. Memperkuat protokol Montreal tahun 1988 pada emisi CFC agar melenyapkan emisi pada tahun 2000 dan mengurangi emisi dari gas-gas penipisan ozon;
4. Mengajukan perkembangan dari konvesi global secara menyeluruh untuk protokol guna melindungi atmosfer;
5. Mencurahkan meningkatnya sumber daya untuk program penelitian yang menyangkut bidang sains dan aspek politik dari masalah, mendukung penilaian yang berkelanjutan dari hasil penelitian dan mendorong diskusi mengenai tanggapan dan strategi, yang berhubungan dengan Pemerintah;

6. Mendirikan dana perwalian untuk membantu Negara Dunia ketiga dan untuk mendorong Negara-negara ini berpartisipasi dalam usaha nasional mengenai monitoring riset adaptasi dan kontrol;
7. Meningkatkan bantuan untuk organisasi non pemerintah dan pendidikan untuk mengizinkan pemrakarsa dan pengembangan kampanye dan program-program pendidikan.

The Montreal Protocol

UNEP memegang peranan penting dalam koordinasi aksi internasional untuk mengendalikan perusakan lapisan ozon. Peran ini membawa Protokol Montreal pada hakikat dari Pengosongan Lapisan Ozon yang ditandatangani pada tahun 1988. Protokol Montreal menyetujui tiga tingkatan pada bagian emisi CFC.

Sejumlah besar negara manufacturing Dunia Ketiga, termasuk Cina, India, dan Brazil, tidak mau menandatangani protokol ini kecuali mereka diberi bantuan keuangan akses teknologi untuk pengganti manufacturing CFC.

Pertemuan selanjutnya di London pada tahun 1990 menyetujui untuk mempercepat proses dan menghapus setahap demi setahap CFC dan zat-zat pengosongan ozon lainnya pada tahun 2000. Daftar baru yang lain mempertimbangkan pemotongan sebesar 50% pada tahun 1995, 85% tahun 1997, dan pengeluaran terakhir pada tahun 2000.

Kemajuan dibuat pada pertemuan yang diadakan pada tahun 1990 pada pengalihan teknologi dari dunia industri, dengan delegasi Cina India dan Cina merasa sanggup merekomendasi dukungan perjanjian dengan pemerintahnya. Menteri Lingkungan India, Maneka Gandhi, mengatakan bahwa perjanjian sekarang ditentukan bahwa bila teknologi pengganti untuk manufacturing tidak dialihkan maka tidak akan ada kewajiban bagi India untuk menghentikan pembuatan CFC.

Kemudian terdapat pula sejumlah Konperensi regional dan Prakarsa Lembaga non Pemerintah yang memusatkan pada aspek regional pada pemanasan global, antara lain:

Climate Action Network (CAN)

Climate Action Network adalah pertukaran informasi internasional antara lembaga non pemerintah yang terlibat dalam pemanasan global. CAN merupakan serangkaian kontak nasional dan regional di seluruh dunia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alikodra, "Butuh 50 Tahun untuk Pulihkan Hutan Kaltim", Surat Kabar *Harian Republika*, tanggal 30 April 1998, Jakarta.
- B. Hartono, *Kebakaran Hutan*, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Bogor, 1988.
- Baylis. John and Steve Smith, *Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, Oxford University Press, New York, 1997, 1998.
- Bertram. Christoph, *Konflik Dunia Ketiga dan Keamanan Dunia*, Cetakan Pertama, Penerbit Bina Akasara, Jakarta, 1988.
- B.N. Maroun., *Kamus Politik*, Cetakan Pertama, Penerbit PT. Midas Surya Grafindo, Jakarta, 1996.
- Brown. Lester R., dkk, *Dunia di Tepi Ujung Kebinasaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1990.
- Chaniago. Amran YS., *Kamus Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit PustakaSetia, Bandung, 1997.
- Clarke. J. Leonard *Future Perfect*
- Couloumbis. A Theodore, and James H. Wolfe, *Introduction to International Relations: Power and Justice*, Third Edition, Alih Bahasa Mercedes Marbun, Bandung, Putra A. Bardin, 1999.
- Davidson. Scott, *Hak Asasi Manusia*, Grafiti, Jakarta, 1993.
- D. Dwidjoseputro, *Ekologi Manusia dengan Lingkungannya*, Erlangga, Jakarta, 1994.

- D. Setjamidjaja dan Ignatius W., *Dasar-dasar Ilmu Tanah*, Universitas Terbuka, Jakarta, 1994.
- E. Armanto dan E. Wildayana, "Analisis Permasalahan Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas", *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, Volume 18 No. 4 Tahun 1998, Jakarta.
- Emil Salim, *Kembali ke Jalan Yang Lurus ESAI- ESAI 1966-1999*, Alvabet, Jakarta, 2000.
- Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, *Survei dan Pemetaan Tanah Semi Detail Daerah Samarinda Propinsi Kal-Tim untuk Evaluasi Kerusakan dan Dampak Kebakaran Hutan Dari Api Bawah Tanah Terhadap Lingkungan*, Banjarmasin, 1995.
- Firor. Jhon, *Perubahan Atmosfer: Sebuah Tantangan Global*, PT. Rosda Jayaputra, Jakarta, 1995.
- Foley. Gerald, *Pemanasan Global; Siapakah yang Merasa Panas?*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Harian KOMPAS 17 April 1998, "Mengapa Hutanmu Terbakar", Jakarta.
- Haris Munandar, *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 1994.
- Haynes. Jeff, *Demokrasi Masyarakat Sipil dan Dunia Ketiga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000.
- Hero Utomo dan Koentjorojakti, *Ekonomi Politik Internasional di Pasifik*, Jakarta, Airlangga, 1994.
- Huntington. Samuel P., *Benturan Antar-peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Cetakan Pertama, Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2000.
- Jones. Walter S., *Logika Hubungan Internasional Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional, dan Tatanan Dunia 2*, PT Gramedia, Jakarta, 1993.
- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia (Dampak, Faktor dan Evaluasi)* Jilid 1, Jakarta, 1998.

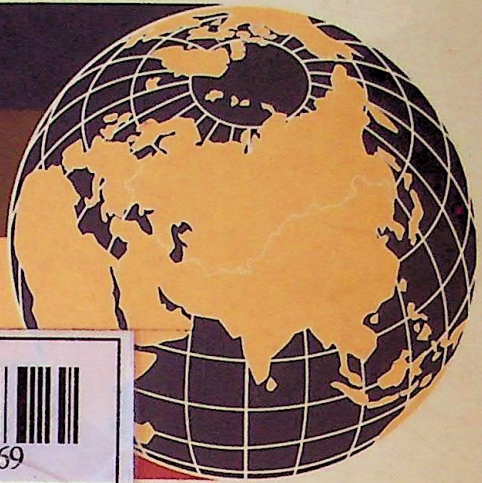
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cetakan Kedelapan, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Mochtar Mas'ood dan Riza Noer Arfani, *Isyu-Isyu Global Masa Kini*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Majalah TEMPO No. 16/XXVII/21 - 27 Juni 1999, "Racun Dioksin di Sekitar Kita", Jakarta.
- Majalah TEMPO No.12/XXVII/22 - 28 Desember 1998, "Kebakaran Hutan Kalimantan (Mencabik Surga, Menuai Untung)", Jakarta.
- Media Indonesia, Edisi Jum'at, 17 Mei 2002, No.7874 Tahun XXXIII.
- Miall, Hugh., Ramsbotham, Oliver., dan Woodhouse, Tom., *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Melala, dan Mengubah KanfUk Bersumber Palmk, Sasial, Agama dan Ras*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Mukhlis Akhadi, *Pengantar Teknologi Nuklir*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku IV: Global*, Bina Cipta, Bandung, 1982.
- Nangoy. Ronald, *Bisnis Internasional (Aspek dan Perkembangannya)*, Center for Strategic and International Studies (CSIS), 1992.
- Palar. Heryando, *Pencemaran & Toksikologi Logam Berat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Qardhawy. Yusuf, *Umat Islam Menyongsong Abad ke-21*, Cetakan Pertama, Penerbit Era Intermedia, 2001.
- Schindele. W., *Investigations of the Steps Needed to Rehabillate the Areas of East Kalimantan Seriously Affected by Fire*, Balai Penelitian Kehutanan, Jakarta, 1989.
- Soemirat. Juli, *Epidemiologi Lingkungs*n, Gadjah Mada University Press, Bandung, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Sosialogi: Suatu Pengantar*, Cetakan Keduapuluh dua, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

- T. May Rudy, *Studi Strategis; dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Cetakan Pertama, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Tuhana Taufiq A., *Konflik Maluku*, Edisi Pertama, Penerbit Gama Global Media, Yogyakarta, 2000.
- Tim PKA Dep. Kehutanan dan Perkebunan, "*Laporan Situasi Kebakaran Hutan di Beberapa Taman Nasional*. Jakarta, 1998.
- WALHI, *Reformasi di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tim Badan Eksekutif WALHI, Jakarta, 1998.
- Watt. William Montgomery, *Titik Temu Islam-Kristen; Persepsi dan Salah Persepsi*, Cetakan Pertama, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.
- Weiss. Donald H., *Menyelesaikan Konflik Secara Bijaksana*, Cetakan Pertama, Penerbit Binarupa Akasara, Jakarta, 1994.
- Wirawan. N., *Sahaya Kebakaran Hutan dan Pencegahannya*; Makalah Diskusi Nasional Kebakaran Hutan Pengaruhnya terhadap Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup, 22 Oktober 1997, KEHATI, Jakarta.

KARTU BUKU

Penulis : Rudi, May.....
Judul : ..Hubungan internasional..
.....kontemporer dan masalah..
.....masalah global.....
No. Gol. : 327 = 992.21.....

PERPUSTAKAAN SESKOAD



20072469

Perubahan dunia beserta paradigmanya adalah sebuah proses multidimensi yang menuju pada sebuah tatanan dunia tanpa batas sekat antar negara. Sistem sosial demikian menimbulkan akses informasi tanpa batas. Dengan kondisi tatanan seperti itu akan banyak memberi dampak, baik negatif maupun positif, pada perubahan sosial budaya suatu masyarakat di sudut mana pun di bumi ini.

Sebuah nada miris beranggapan bahwa globalisasi adalah situasi yang sengaja ciptakan untuk mengkapitalismekan dunia yang dikendalikan oleh arogansi internasional, sedangkan di seberang visi itu juga ada yang beranggapan bahwa globalisasi merupakan kehendak jalinan sistem sosial yang bergerak dan berubah ke arah yang lebih kompleks.

Terlepas dari segala bentuk polemik, yang jelas proses globalisasi sudah berjalan, bahkan sudah di depan mata kita. Mau tidak mau kita harus masuk pada sistem itu, tetapi masalahnya bagaimana kita mensiasati kondisi ini agar memberi kontribusi positif bagi sistem sosial kita.

Segala bentuk isu, konsep, serta paradigma global, dalam buku ini sehingga memberi suatu gambaran j sedang terjadi dalam sistem sosial kita.

Penulis adalah pengajar di Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas I alumnus dari International Universi Kebangsaan Malaysia.



05391

